



Kumpulan Ikan Barakuda



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Laporan Capaian Renja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015

Salah Satu Kekayaan Alam Teluk Cenderawasih: Ikan Pari

Laporan Capaian Renja dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Tahun 2015 Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015



Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Jakarta, Februari 2016

KATA PENGANTAR



Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2015 maka berakhir pula rangkaian pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) untuk tahun bersangkutan. Laporan Capaian Renja 2015 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Dengan Tahun 2015 Ditjen KSDAE disusun dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Ditjen KSDAE Tahun 2015.

Laporan Capaian Renja 2015 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Dengan Tahun 2015 Ditjen KSDAE menyajikan gambaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen KSDAE sepanjang tahun 2015, termasuk permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan Capaian Renja 2015 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Dengan Tahun 2015 Ditjen KSDAE ini sesungguhnya juga merupakan kompilasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan di seluruh satker lingkup Ditjen KSDAE, baik di pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran Tahun 2015.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Capaian Renja 2015 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Dengan Tahun 2015 Ditjen KSDAE ini. Oleh karena itu masukan dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan dan perbaikan kinerja Ditjen KSDAE di masa yang akan datang. Semoga Laporan Capaian Renja 2015 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Dengan Tahun 2015 Ditjen KSDAE ini bisa menjadi sarana evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Ditjen KSDAE selama tahun 2015 serta dapat mendorong peningkatan kualitas dan semangat kerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Ditjen KSDAE. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa pemikiran, kritik, dan saran, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2016
Direktur Jenderal KSDAE

Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc.
NIP. 195609291982021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A LATAR BELAKANG	1
B TUGAS DAN FUNGSI	1
C STRUKTUR ORGANISASI	2
BAB II RENCANA KERJA TAHUN 2015.....	7
A RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019	7
B RENCANA KERJA TAHUN 2015.....	17
C RENCANA ANGGARAN/PEMBIAYAAN TAHUN 2015	21
BAB III CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2015	23
A CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2015	23
B CAPAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015	79
C CAPAIAN RENSTRA 2015-2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015.....	82
BAB IV PENUTUP	86
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi Tahun 2015	3
Tabel 2. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2015	4
Tabel 3. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015	4
Tabel 4. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2015	5
Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2015	5
Tabel 6. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019	10
Tabel 7. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019	11
Tabel 8. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2015-2019	12
Tabel 9. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019	12
Tabel 10. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2015-2019	13
Tabel 11. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Tahun 2015-2019	14
Tabel 12. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2015-2019	15
Tabel 13. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019	17
Tabel 14. Indikator Kinerja Kegiatan dan target tahun 2015	17
Tabel 15. Rincian Pagu Anggaran Per Satker lingkup Ditjen KSDAE tahun 2015	22
Tabel 16. Rata-rata capaian kegiatan Ditjen KSDAE Tahun 2015	23
Tabel 17. Capaian Indikator Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	23
Tabel 18. Kategori Permohonan Kerjasama Tahun 2015	38
Tabel 19. Capaian Indikator Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	38
Tabel 20. Kawasan Konservasi yang mencapai Nilai Persentase METT 70%	42
Tabel 21. Capaian luas kawasan hutan konservasi pada zona pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	48
Tabel 22. Pencapaian kinerja jangka menengah/ selama 5 tahun (tahun 2015-2019)	48
Tabel 23. Capaian Indikator Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik	50
Tabel 24. Data peningkatan populasi satwa prioritas terancam punah tahun 2015	51
Tabel 25. Capaian Indikator Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	56
Tabel 26. Capaian Indikator Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial	66
Tabel 27. Capaian Indikator Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE	73
Tabel 28. Alokasi Nilai Setiap Komponen dan SubKomponen SAKIP	75
Tabel 29. Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian SAKIP	75
Tabel 30. Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2015	79
Tabel 31. Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Satker Tahun 2015	80
Tabel 32. Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja	80
Tabel 33. Realisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Satker Tahun 2015	81
Tabel 34. Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja	81
Tabel 35. Capaian Renstra 2015-2019 sampai dengan Tahun 2015 Ditjen KSDAE	82
Tabel 36. Perbandingan Target 5 Tahun dan capaian Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi tahun 2015	82
Tabel 37. Perbandingan Target 5 Tahun dan capaian Kegiatan Kawasan Konservasi tahun 2015	83
Tabel 38. Perbandingan Target 5 Tahun dan capaian Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik tahun 2015	83
Tabel 39. Perbandingan Target 5 Tahun dan capaian Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2015	84
Tabel 40. Perbandingan Target 5 Tahun dan capaian Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial tahun 2015	85
Tabel 41. Perbandingan Target 5 Tahun dan capaian Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	3
Gambar 2.	Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2015.....	4
Gambar 3.	Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2015 Berdasarkan Jabatannya.....	5
Gambar 4.	Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita.....	8
Gambar 5.	Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE	10
Gambar 6.	Diskusi Penggalan Materi dan Pembahasan NSPK Terkait Penataan Zona/Blok	25
Gambar 7.	Koordinasi Penataan Zona/Blok pada UPT Balai Besar KSDA Jawa Barat	25
Gambar 8.	Nara Sumber dan Peserta Pelatihan Penataan Zona/Blok di Malang	26
Gambar 9.	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Zonasi/Blok	26
Gambar 10.	Diskusi Pemantapan Materi Dalam Rangka Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2014 di BBTN. Bromo Tengger Semeru	27
Gambar 11.	Bimbingan Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi/Review Kawasan Konservasi di Balai KSDA Jambi	28
Gambar 12.	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Terkait Inventarisasi Kawasan Konservasi di	30
Gambar 13.	Pegawai Direktorat PIKA pada Acara Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM/Pembinaan Pegawai di Kuningan Jawa Barat	31
Gambar 14.	Peserta Workshop Sinkronisasi Pengelolaan Informasi Kawasan Konservasi	32
Gambar 15.	Rapat Penyusunan NSPK Terkait inventarisasi dan informasi kawasan konservasi.....	32
Gambar 16.	Informasi dan publikasi konservasi alam	33
Gambar 17.	Kegiatan Pengukuran dan pencatatan keliling pohon di Plot Permanen REDD zona rehabilitasi TNMB, tanggal 8 -15 Juli 2015	33
Gambar 18.	Peserta Koordinasi Terkait Pembentukan KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional	35
Gambar 19.	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen KSDAE dengan	36
Gambar 20.	Rencana Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Penyeberangan Ferry di CA Selat Laut pada Balai KSDA Kalimantan Selatan	37
Gambar 21.	Koordinasi terkait Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi pada Jalan di TN Manusela yang akan ditanam Kabel Optik PT. Telkom	37
Gambar 22.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kerjasama di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto	38
Gambar 23.	Rapat pembahasan penyempurnaan form METT	40
Gambar 24.	Sebaran 521 Kawasan Konservasi tahun 2015	40
Gambar 25.	Pemanfaatan getah damar mata kucing (<i>Shorea javanica</i>) oleh masyarakat di	49
Gambar 26.	Kegiatan monitoring polulasi gajah di BKSDA Aceh	52
Gambar 27.	Aktivitas Elang Jawa di sekitar sarang di BTN Alas Purwo	53
Gambar 28.	Dukungan pada event Tomini Sail 2015.....	57
Gambar 29.	Aktivitas pengunjung asal Eropa memandikan Gajah di Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuseur	57
Gambar 30.	Pengunjung mancanegara sedang mendokumentasikan indahnya danau kelimutu	58
Gambar 31.	Pameran Promosi Konservasi Alam di Jakarta pada Event Deep & Extreme Indonesia 2015	59
Gambar 32.	Pameran Konservasi Alam Mobile di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).....	59
Gambar 33.	Pameran Kaltim Expo 2015 yang di ikuti BKSDA Kalimantan Timur	60
Gambar 34.	Petugas BTN Meru Betiri memberikan informasi pada pameran Greentex, Grahadi Bandung.	60
Gambar 35.	Pameran tingkat nasional yang di ikuti BBTN Bromo Tengger Semeru di Bali, dengan tema Tourism Trade Investment.	60
Gambar 36.	Kegiatan fasilitasi pembentukan forum jasa wisata alam di Balai Taman Nasional Merbabu dan Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	62
Gambar 37.	Sarana Prasarana yang dibangun oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam dalam rangka mendukung pariwisata alam	62
Gambar 38.	Kegiatan Penguatan Kelembagaan pemanfaatan air di Taman Nasional Gunung Merapi	63
Gambar 39.	Kegiatan Bimtek Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Taman Nasional Betung Kerihun	63
Gambar 40.	Pengukuran penampang sungai menggunakan alat bantu waterpass di SPTN III Kalibaru, tanggal 3 – 7 Agustus 2015.	63

Gambar 41. Kegiatan pemanfaatan energi air (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di TN Gunung Halimun Salak)	64
Gambar 42. Rapat Pembahasan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Energi Air PT. Brantas Cakrawala Energi di Ruang Rapat Komodo, Ditjen. KSDAE	64
Gambar 43. Potensi panas bumi di yang berada di kawasan konservasi adalah Suoh, Kab. Lampung Barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	65
Gambar 44. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan karbon	65
Gambar 45. Kegiatan Praktek Lapangan di Taman Keanekaragaman Hayati Kiara Payung Prov. Jawa Barat dan Peninjauan lokasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi pada Wilayah Kerja Mitra Swasta.....	69
Gambar 46. Direktur Jenderal KSDAE Membuka Secara Resmi Lokakarya Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan KEE	70
Gambar 47. Prof. Emil Salim memberikan keynote speech dalam Lokakarya Nasional Pengelolaan Ekosistem Karst.....	72
Gambar 48. Taman Keanekaragaman Hayati Kiara Puyung, Provinsi Jawa Barat.....	73
Gambar 49. Perkembangan Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2010 – 2015.	79

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, atau lebih dikenal dengan sebutan keanekaragaman hayati, merupakan bagian terpenting dari sumberdaya alam, yang terdiri atas keanekaragaman tipe ekosistem, keanekaragaman jenis flora dan fauna, serta keanekaragaman sumberdaya genetik. Oleh karenanya, upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi penting, karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur keanekaragaman hayati akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, yang tidak sepadan jika dinilai dengan materi dan pemulihannya tidak mudah untuk dilakukan.

Penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Jenderal KSDAE antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Ditjen KSDAE merupakan instansi yang diberikan mandat untuk melaksanakan upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan ekosistem di Indonesia. Komitmen kinerja yang harus dicapai Ditjen KSDAE telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Ditjen KSDAE. Untuk memberikan panduan dan arah pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen KSDAE selama tahun 2015, maka disusun Rencana Kerja (Renja) 2015 (Revisi) Suplemen Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019. Perlu guna memberikan menggambarkan hasil capaian pelaksanaan anggaran dan kegiatan lingkup Ditjen KSDAE dalam suatu tahun anggaran, maka perlu disusun Laporan Capaian Renja 2015 dan Progres Capaian Renstra 2015-2019 Sampai Dengan Tahun 2015 Ditjen KSDAE.

B. Tugas dan Fungsi

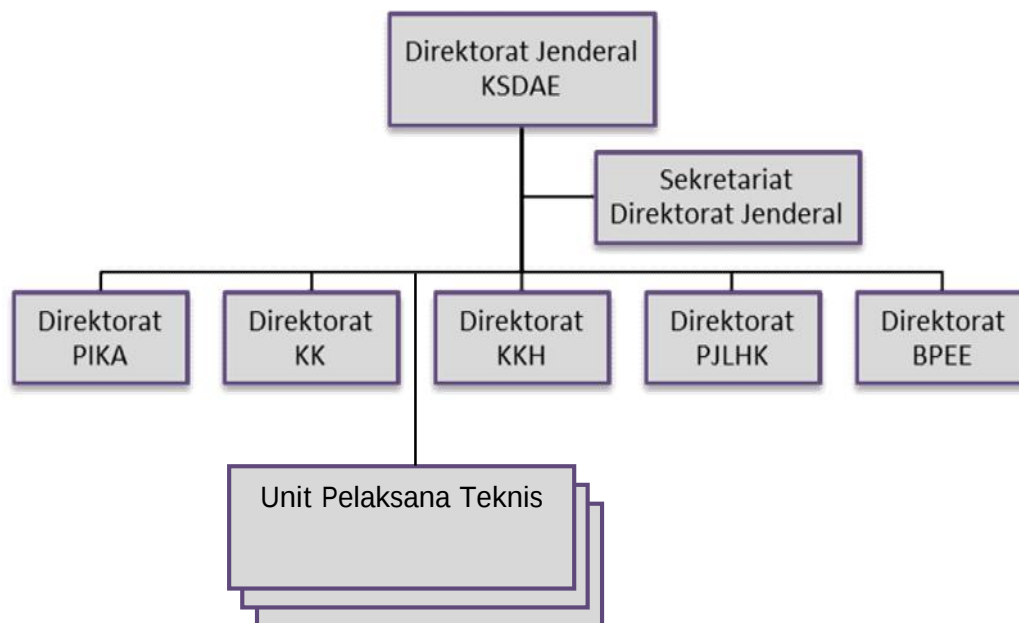
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengamanatkan bahwa Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan taman nasional dan taman wisata alam, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa serta taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik baik insitu maupun eksitu, pemanfaatan jasa lingkungan dan kolaborasi pengelolaan kawasan, dan pengelolaan ekosistem esensial;
7. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem; serta
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi

Ditjen KSDAE adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen KSDAE dipimpin oleh Direktur Jenderal. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, susunan organisasi Eselon II Lingkup Ditjen KSDAE, yaitu: 1). Sekretariat Ditjen; 2). Direktorat Pemolaan dan Informasi Kawasan Alam (PIKA); 3). Direktorat Kawasan Konservasi (KK); 4). Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati (KKH); 5). Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK); 6) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE). Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, Ditjen KSDAE memiliki organisasi pelaksana teknis yang terdiri atas UPT Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan UPT Taman Nasional (TN). Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal KSDAE adalah sebagaimana bagan pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sumberdaya dan Sarana Pendukung

a. Kawasan Konservasi

Jumlah luas kawasan konservasi sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 521 lokasi/unit dengan luasan sebesar 27.108.486,54 Ha, yang terdiri dari: 225 unit cagar alam (CA), 75 unit suaka marga satwa (SM), 50 unit Taman Nasional (TN), 115 unit taman wisata alam (TWA), 23 unit taman hutan raya (Tahura), 13 unit taman buru, dan 18 unit Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA). Rekapitulasi fungsi dan luas kawasan konservasi tahun 2015 disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Fungsi dan Luas Kawasan Konservasi Tahun 2015

No.	Fungsi Kawasan	Jumlah Unit	Luas (Ha)
1.	Cagar Alam	222	3.957.691,66
2.	Cagar Alam Laut	5	152.610,00
3.	Suaka Margasatwa	71	5.024.138,29
4.	Suaka Margasatwa Laut	4	5.588,25
5.	Taman Nasional	43	12.328.523,34
6.	Taman Nasional Laut	7	4.043.541,30
7.	Taman Wisata Alam	101	257.323,85
8.	Taman Wisata Alam Laut	14	491.248,00
9.	Taman Buru	13	220.951,44
10.	Taman Hutan Raya	23	351.680,41
11.	KSA-KPA	18	275.190,00
	Jumlah	521	27.108.486,54

Sumber : Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019

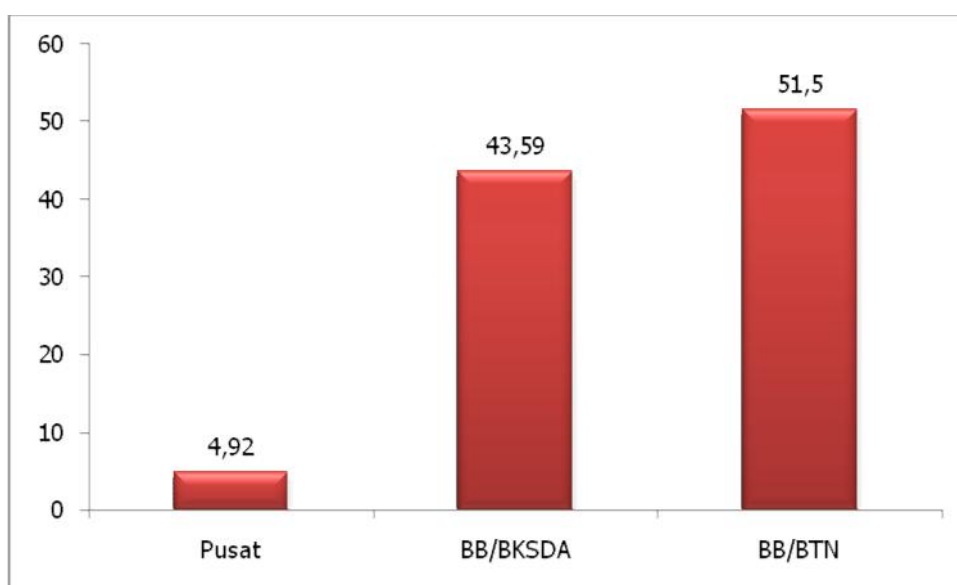
b. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2015 Ditjen KSDAE didukung pegawai sebanyak 8055 orang. Penyebaran pegawai pada Ditjen KSDAE adalah sebagaimana Tabel 2 dan Gambar 2:

Tabel 2. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Tahun 2015

Satker	Jumlah Pegawai	%
Pusat	396	4,92
BB/BKSDA	3.511	43,59
BB/BTN	4.148	51,50
Total	8.055	100

Sumber : Bag. Kepegawaian Setditjen KSDAE, 2015 (per 19 Januari 2016)



Gambar 2. Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2015

Latar belakang pendidikan pegawai Lingkup Ditjen KSDAE bervariasi mulai dari lulusan jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang Strata Tiga (S3). Berikut disajikan perbandingan distribusi pegawai lingkup Ditjen KSDAE tahun 2015 berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 3:

Tabel 3. Sebaran Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015

	S3	S2	S1/D4	D3	SMU/D1/D2	SLTP	SD	JUMLAH
UPT	10	453	2.011	476	4.455	151	103	7.659
PUSAT	6	102	128	40	109	6	5	396
JUMLAH	16	555	2.139	516	4.564	157	108	8.055
%	0,20	6,89	26,55	6,41	56,66	1,95	1,34	100

Sumber : Bag. Kepegawaian Setditjen KSDAE, 2015 (per 19 Januari 2016)

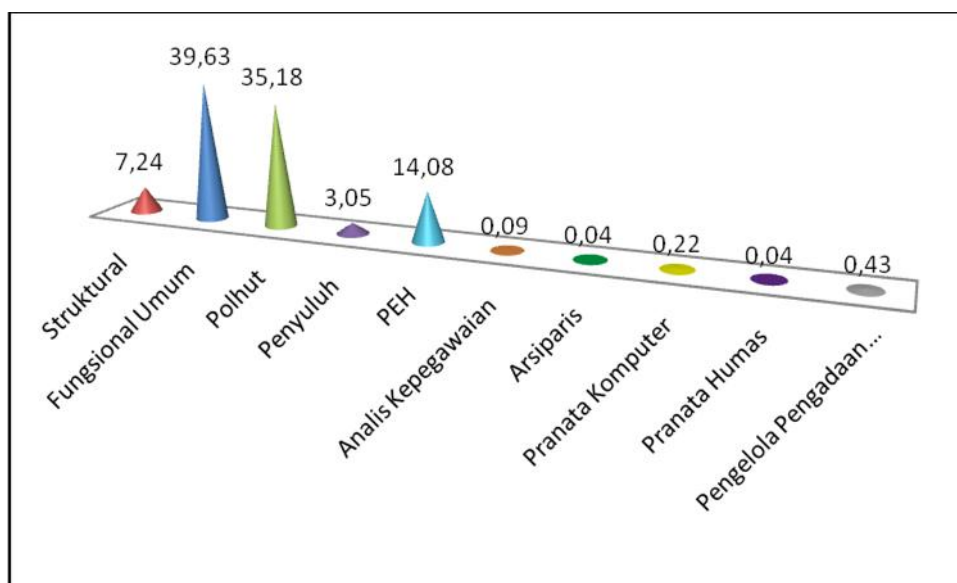
Berdasarkan jenis jabatannya, pegawai lingkup Ditjen KSDAE yang terbesar yaitu fungsional umum yang mencapai 3.192 orang (39,63%) dan Polisi Kehutanan sebesar 2.834 orang (35,18%). Besarnya jumlah Polisi Kehutanan memang bisa dipahami

mengingat banyaknya kawasan yang harus dijaga dan permasalahan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem yang sangat kompleks sehingga menuntut adanya tenaga pengamanan dalam jumlah yang cukup untuk ditempatkan di lapangan dan menjadi ujung tombak kegiatan perlindungan hutan. Gambaran selengkapnya komposisi pegawai lingkup Direktorat Jenderal KSDAE berdasarkan jabatannya adalah sebagaimana Tabel 4:

Tabel 4. Komposisi Pegawai Lingkup Ditjen KSDAE Berdasarkan Jabatan Tahun 2015

No	Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Struktural	583	7,24
2	Fungsional Umum	3.192	39,63
3	Polhut	2.834	35,18
4	Penyuluh	246	3,05
5	PEH	1.134	14,08
6	Analisis Kepegawaian	7	0,09
7	Arsiparis	3	0,04
8	Pranata Komputer	18	0,22
9	Pranata Humas	3	0,04
10	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa	35	0,43
	Jumlah	8.055	100,00

Sumber : Bag. Kepegawaian Setditjen KSDAE, 2015 (per 19 Januari 2016)



Gambar 3. Persentase Sebaran Pegawai Ditjen KSDAE Tahun 2015 Berdasarkan Jabatannya

Dilihat dari komposisi umur, pegawai lingkup Ditjen KSDAE baik di pusat maupun dari UPT terlihat bahwa komposisi tertinggi jumlah pegawai pada umur 31-36 tahun sejumlah 1604 orang (19,91%) sebagaimana Tabel 5:

Tabel 5. Rekapitulasi Pegawai Ditjen KSDAE Berdasarkan Umur Tahun 2015

Unit kerja	>=56 <60	>=51 <56	>= 46 <51	>=41 <46	>=36 <41	>=31 <36	>=26 <31	>=21 <31	< 21	Jumlah
PUSAT	41	119	53	45	48	52	33	5		396
BB/BKSDA	252	684	491	565	558	666	238	55	2	3.511
BB/BTN	190	683	461	675	717	886	438	94	4	4.148
Jumlah	483	1.486	1.005	1.285	1.323	1.604	709	154	6	8.055

Bila dilihat dari tabel di atas, jumlah pegawai Ditjen KSDAE pada tahun 2015 sebaran umur terbanyak berada di kisaran umur 31-36 tahun (19,91%). Dari Tabel di atas juga dapat dilihat bahwa pegawai Ditjen KSDAE yang berusia 56-60 tahun berarti dalam lima tahun ke depan pegawai Ditjen KSDAE yang memasuki usia pensiun berjumlah 483 orang (5,99%) dan dalam 10 tahun ke depan jumlah pegawai Ditjen KSDAE yang memasuki usia pensiun bertambah banyak yaitu 1.486 orang (18,44%). Oleh karena itu, perlu adanya strategi kepegawaian terkait dengan kebutuhan SDM bagi organisasi, khususnya Ditjen KSDAE sehingga untuk 10 tahun ke depan bisa mendapatkan pegawai-pegawai baru dengan penempatan posisi sama dengan pegawai yang akan pensiun.

c. Sarana dan Prasarana

Aset atau Barang Milik Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2015 dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi mencapai Rp. 1.595.496.206.868,-. Secara lebih rinci aset Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015 terdiri atas:

1) Aset Lancar

Aset lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya satu tahun, yaitu kas, piutang dan persediaan. Nilai aset lancar Direktorat Jenderal KSDAE per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 17.111.488.820,-;

2) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi. Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan kantor, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai aset tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.544.496.206.868,-;

3) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam asset lancar, asset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya antara lain TP/TGR, aset tak berwujud, aset lain-lain dan aset yang dibatasi penggunaannya. Nilai aset lainnya pada Direktorat Jenderal PHKA per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 23.906.911.590,-.

BAB II RENCANA KERJA TAHUN 2015

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015-2019. Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 disusun sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE untuk pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi selama lima tahun.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi dan misi pembangunan tahun 2015-2019 menjadi peta jalan seluruh Kementerian dan/atau Lembaga penyelenggara negara dalam merancang arah pembangunan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakannya. Prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019. Sembilan agenda prioritas yang lebih dikenal dengan sebutan Nawa Cita tersebut, diuraikan sebagaimana dalam Gambar 4. Berdasarkan uraian rencana pelaksanaan Nawa Cita, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE terutama tertuang dalam agenda ketujuh.

Nawa Cita juga menguraikan sub agenda dan sasaran yang menjadi amanat bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, peran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015-2019, yaitu: (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

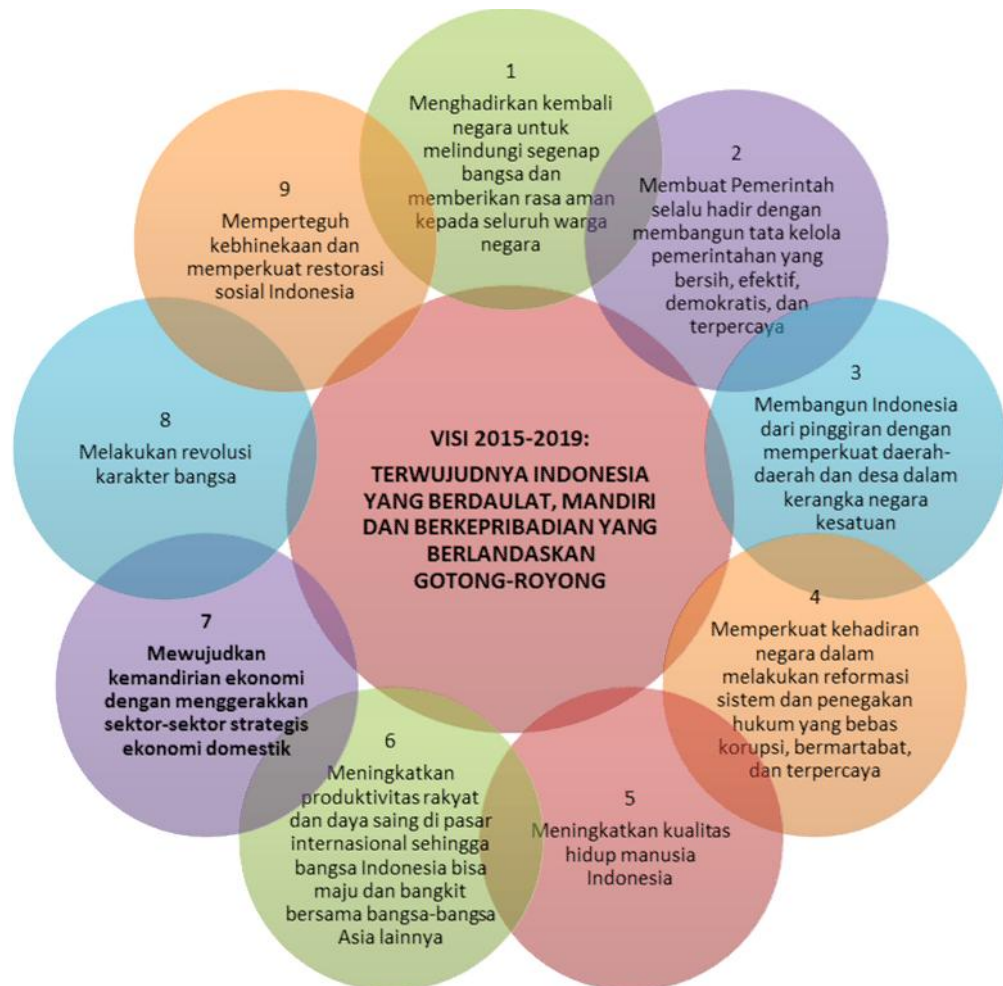
Visi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 :

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 :

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;

- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



Gambar 4. Visi Pembangunan Nasional 2015-2019 dan Nawa Cita

Untuk memastikan manifestasi dari peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembangunan nasional, dirumuskan sasaran strategis yang menjadi panduan dan pendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019. Sasaran strategis dimaksud, yaitu: (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2013 sebesar 63,12. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan

ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; serta (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1990 diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia, berasaskan keserasian dan keseimbangan, sebagaimana Gambar 7. Dengan demikian maka sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal KSDAE adalah kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati terpelihara dan terlindungi serta dimanfaatkan secara lestari untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Tujuan pembangunan bidang KSDAE adalah Mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.

Namun demikian, untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka rumusan tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu dari sisi pemanfaatan nilai keekonomian kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, serta dari sisi upaya perlindungan dan pengawetan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati itu sendiri.

Dari 3 sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mewujudkan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Memanfaatkan potensi SDH dan LH secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan (sasaran strategis kedua); serta (2) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (sasaran strategis ketiga).

Peran dalam pencapaian sasaran strategis kedua akan dibuktikan dan diukur dengan besaran penerimaan devisa negara dan penerimaan negara bukan pajak dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi serta pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam. Adapun peran dalam pencapaian sasaran strategis ketiga antara lain akan dibuktikan dan diukur dengan peningkatan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) serta peningkatan populasi 25 jenis satwa liar terancam punah prioritas.

Sehingga, sasaran program Ditjen KSDAE dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati
2. Peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati



Gambar 5. Upaya Pokok dan Tujuan Pembangunan Bidang KSDAE

2. Target Kinerja Tahun 2015-2019

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan. Setiap kegiatan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja mandiri (pusat dan UPT di daerah) di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Masing-masing kegiatan memiliki target capaian kinerja (indikator kinerja kegiatan), yang menggambarkan langkah atau tahapan pencapaian sasaran kegiatan.

Kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target capaian kinerja kegiatan pada Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem tahun 2015-2019 diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam adalah terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Adapun indikator kinerja kegiatan (IKK) dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam diuraikan sebagaimana Tabel 6:

Tabel 6. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30	60	90	120	150
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100	200	310	420	521
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA,	521	521	521	521	521

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
	KPA dan TB di seluruh Indonesia					
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20	40	60	80	100

b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Kawasan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi diuraikan sebagaimana Table 7:

Tabel 7. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50	100	150	200	260
2.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30	60	90	120	150
3.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
4.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77	77	77	77	77
5.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
6.	Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
7.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	34	34	34

c. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik adalah terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik diuraikan sebagaimana Tabel 8:

Tabel 8. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data 2013	2	4	6	8	10
2.	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2	4	6	8	10
3.	Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10	20	30	40	50
4.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Trilyun	5	10	15	20	25
5.	Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	10	20	30	40	50
6.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7	7	7	7	7
7.	Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	1	3	5	7	10
8.	Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4	8	12	16	20
9.	Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1	1	1	1	1
10.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10	20	30	40	50

d. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi diuraikan sebagaimana Tabel 9:

Tabel 9. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,15	1,50
2.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
3.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	20	40	60	80	100
4.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah	5	10	15	20	25

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
	sebanyak 25 Unit					
5.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50
6.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5
7.	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1	2

e. Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial diuraikan sebagaimana Tabel 10:

Tabel 10. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13	26	39	43	48
2.	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3	16	30	44	48
3.	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	3	16	30	44	48
4.	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-	2	4	5	6
5.	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	1	2	4	6
6.	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60	120	180	240	300

f. Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai Besar/Balai KSDA di seluruh Indonesia. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati diuraikan sebagaimana Tabel 11:

**Tabel 11. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
Tahun 2015-2019**

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30	60	90	120	150
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100	200	310	420	521
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521	521	521	521	521
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20	40	60	80	100
6.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50	100	150	200	260
7.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30	60	90	120	150
8.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
9.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77	77	77	77	77
10.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20	100	100	100	100
11.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	34	34	34
12.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2	4	6	8	10
13.	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2	4	6	8	10
14.	Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	10	20	30	40	50
15.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7	7	7	7	7
16.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10	20	30	40	50
17.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,15	1,50
18.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
19.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20	40	60	80	100
20.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5	10	15	20	25
21.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50
22.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5
23.	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200	2.400	3.600	4.800	6.000
24.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

g. Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Balai/Balai Besar Taman Nasional. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional diuraikan sebagaimana Tabel 12:

Tabel 12. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	10	20	30	40	50
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10	20	30	40	50
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50	50	50	50	50
4.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20	40	60	80	100
5.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10	20	30	40	50
6.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10	20	30	40	50
7.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
8.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa	50	50	50	50	50

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
	selama 5 tahun					
9.	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000	40.000	60.000	80.000	100.000
10.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	34	34	34
11.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2	4	6	8	10
12.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7	7	7	7	7
13.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10	20	30	40	50
14.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	0,25	0,50	0,80	1,15	1,50
15.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3,50	7,50	11,50	15,50	20,00
16.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	20	40	60	80	100
17.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5	10	15	20	25
18.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5	15	25	35	50
19.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1	2	3	5
20.	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1	2
21.	Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200	2.400	3.600	4.800	6.000
22.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

h. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Adapun IKK dan tahapan pencapaian IKK dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagaimana Tabel 13:

Tabel 13. IKK dan Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00

Komponen atau proses dari tahapan pencapaian target IKK (keluaran/output), yang dapat berupa paket-paket pekerjaan, dibedakan antara proses yang dilaksanakan oleh satuan kerja di tingkat pusat dengan satuan kerja tingkat UPT. Proses yang dilaksanakan di tingkat pusat merupakan jabaran dari level operasional tugas dan fungsi satuan kerja di tingkat pusat, sedangkan proses yang dilaksanakan oleh UPT merupakan jabaran dari level teknis operasional di tingkat tapak.

Untuk keseragaman proses dari tahapan pencapaian target IKK di seluruh satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, maka komponen dari setiap IKK telah diupayakan untuk distandarkan. Adapun dalam pelaksanaannya, komponen dimaksud bersifat opsional di setiap satuan kerja, mengingat adanya kondisi-kondisi yang spesifik di masing-masing satuan kerja di seluruh Indonesia.

Dalam rangka memastikan pencapaian sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diperlukan pedoman pelaksanaan pencapaian target kinerja sebagai penjelasan lebih lanjut atas Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019, maka telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.14/KSDAE-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2015

Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui delapan kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; (6) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati; (7) Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional; serta (8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE. Indikator kinerja kegiatan dengan target tahun 2015 tersaji dalam Tabel 14:

Tabel 14. Indikator Kinerja Kegiatan dan target tahun 2015

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015
Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	1. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit
	2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen
	3. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	10.000 Ha
	4. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha
	5. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit
	6. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi.	34 Provinsi
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik	1. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	2%
	2. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies
	3. Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10 Unit
	4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Trilyun	Rp 5 T
	5. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M
	6. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data
	7. Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	1 PIC
	8. Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4 PRG
	9. Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 Unit
	10. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	1. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	3.500.000 Orang
	3. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit
	4. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit
	5. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan	5 Unit

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015
	konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	
	6. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-
	7. Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK.	-
Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial	1. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13 KEE
	2. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3 Paket Data
	3. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	3 Dokumen
	4. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-
	5. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-
	6. Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies
Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS
	6. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70 poin pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit
	7. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen
	8. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	10.000 Ha
	9. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	77 Desa
	10. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit
	11. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi	34 Provinsi
	12. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline	2%

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015
	data tahun 2013	
	13. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies
	14. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M
	15. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data
	16. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit
	17. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang
	18. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	3.500.000 Orang
	19. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit
	20. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit
	21. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit
	22. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-
	23. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang
	24. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00 Poin
	25. Jumlah kelembagaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang difasilitasi pembentukannya	13 KEE
	26. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3 Paket Data
Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	10 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50 Paket Data
	4. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS
	5. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 Unit
	6. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10 Dokumen
	7. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk	10.000 Ha

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015
	penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	
	8. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	50 Desa
	9. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha
	10. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi	34 Provinsi
	11. Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	2%
	12. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data
	13. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit
	14. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang
	15. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	3.500.000 Orang
	16. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit
	17. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit
	18. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit
	19. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-
	20. Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-
	21. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang
	22. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00 Poin
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	77,00 Poin

C. RENCANA ANGGARAN/PEMBIAYAAN TAHUN 2015

Total Pagu Alokasi Program KSDAE pada Tahun 2015 adalah Rp. 1.590.879.426.000,- untuk 83 Satuan Kerja (Satker) yaitu 6 satuan kerja pusat, 27 satuan kerja KSDA, dan 50 satuan kerja Taman Nasional. Dengan rincian per-satuan kerja sebagaimana Tabel 15:

Tabel 15. Rincian Pagu Anggaran Per Satker lingkup Ditjen KSDAE tahun 2015

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp.)
1	SEKRETARIAT DITJEN KSDAE	40.701.911.000
2	DIREKTORAT PIKA	15.741.377.000
3	DIREKTORAT KK	27.200.000.000
4	DIREKTORAT KKH	26.987.118.000
5	DIREKTORAT PHLHK	17.439.729.000
6	DIREKTORAT BPEE	18.341.243.000
7	BALAI BESAR/BALAI KSDA (27 satker)	647.819.727.000
8	BALAI BESAR/BALAI TN (50 satker)	783.275.947.000
-	SATUAN KERJA LAMA (PHKA)	13.372.374.000
	TOTAL	1.590.879.426.000

Anggaran tersebut merupakan pagu alokasi anggaran terakhir setelah dilakukan beberapa kali revisi dan penambahan pagu hibah luar negeri dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi APBN-P tanggal 29 Juli 2015 dengan pagu sebesar Rp. 1.547.011.816.000,-;
2. Revisi Antar Program tanggal 8 September 2015 dengan tambahan pagu sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan Hibah Luar Negeri Sebesar Rp. 19.200.000.000,- dengan total pagu menjadi Rp. 1.586.211.816.000,-; dan
3. Hibah Langsung pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik (Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati) sebesar Rp. 4.667.610.000,-, sehingga total pagu alokasi anggaran terakhir adalah Rp. 1.590.879.426.000,-.

BAB III CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2015

A. CAPAIAN RENCANA KERJA TAHUN 2015

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari periode perencanaan jangka menengah tahun 2015-2019. Berikut disampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE selama tahun 2015 sesuai Rencana Kerja 2015 (Revisi) Suplemen Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2015-2019. Ditjen KSDAE melaksanakan 8 (delapan)) kegiatan yang di mana 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Kegiatan Pengelolaan Taman nasional merupakan cerminan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker pusat Ditjen KSDAE. Rata-rata capaian kegiatan Ditjen KSDAE Tahun 2015 adalah sebesar 93,47 % sebagaimana dalam Tabel 16 berikut:

Tabel 16. Rata-rata capaian kegiatan Ditjen KSDAE Tahun 2015

No	Kegiatan	%
1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	98,53
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi	100,20
3	Konservasi Spesies dan Genetik	110,30
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	91,35
5	Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial	51,71
6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE	108,78
Rata-rata Capaian		93,47

Adapun rincian capaian kinerja pada masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Kegiatan 1 Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Tabel 17. Capaian Indikator Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

No	Kegiatan / IKK	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2015	%
	Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam				98,53
1	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	Dokumen	30	35	116,67
2	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	100	116	116,00
3	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Paket Data	521	521	100,00
4	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	Unit	20	12	60,00
5	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	PKS	20	20	100,00

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam adalah 98,53% dengan rincian sebagai berikut.

IKK 1 → Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, mengamanatkan bahwa penataan kawasan konservasi yang meliputi penyusunan zonasi/blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat sekitar serta pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota.

Pada tahun 2015, jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan ditargetkan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau blok. Pencapaian kinerja kegiatan dapat terealisasi sebesar 116,67% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 35 dokumen zonasi dan/atau blok dalam bentuk Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE tentang Pengesahan Zonasi dan/atau Blok, yang terdiri dari:

- a. Penataan zonasi taman nasional sebanyak 9 dokumen.
- b. Penataan blok taman wisata alam sebanyak 14 dokumen.
- c. Penataan blok taman hutan raya sebanyak 4 dokumen
- d. Penataan blok taman buru sebanyak 1 dokumen
- e. Penataan blok cagar alam sebanyak 3 dokumen, dan
- f. Penataan Blok suaka margasatwa sebanyak 4 dokumen.

Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat PIKA tahun 2015 dalam rangka mendukung pencapaian kinerja kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu:

- a. Penyusunan NSPK
- b. Bimbingan Teknis dan Supervisi
- c. Pembinaan dan Koordinasi
- d. Penilaian dan Pengesahan Dokumen Zonasi dan/atau Blok

Kemudian jenis kegiatan (sub komponen) yang telah dilaksanakan untuk tercapainya komponen kegiatan ini, antara lain:

- 1) Kegiatan penyusunan NSPK ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perangkat lunak kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam terkait penataan zona/blok yang akan dijadikan acuan dan pedoman pada masing-masing UPT di daerah dalam melaksanakan kegiatan penataan zona/blok kawasan konservasi di wilayah kerjanya.

Penyusunan NSPK terkait penataan zona/blok merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Pelaksanaan kegiatan dimulai dari pengumpulan dan pendalaman materi melalui diskusi mengenai kondisi lapangan pada 7 UPT Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar KSDA Jabar, Jatim, Balai KSDA Bali dan Balai Besar TN. Gn. Gede Pangrango, Balai TN. Ujung Kulon, Wakatobi, dan Danau Sentarum untuk dijadikan bahan penyusunan draft NSPK. Keluaran (output) kegiatan berupa 1 dokumen NSPK.



Gambar 6. Diskusi Penggalian Materi dan Pembahasan NSPK Terkait Penataan Zona/Blok

- 2) Koordinasi terkait penataan zona/blok, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mematangkan proses penyusunan penataan zona/blok yang telah disusun melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan masing-masing UPT di daerah dalam melaksanakan kegiatan penataan zona/blok.

Koordinasi penataan zona/blok tahun 2015 difokuskan pada UPT yang menjadi target pencapaian IKK Direktorat PIKA pada UPY yang sedang dalam melaksanakan proses menyusun penataan zona dan blok, yaitu Balai Besar KSDA Jawa Barat , Balai KSDA Sulawesi Utara dan Balai TN. Gunung Merapi.



Gambar 7. Koordinasi Penataan Zona/Blok pada UPT Balai Besar KSDA Jawa Barat

- 3) Bimbingan teknis dan pengawasan zonasi dan blok, dilakukan dalam bentuk asistensi penyusunan penataaan zonasi dan blok pengelolaan kawasan, pengecekan dan kajian lapangan, serta rapat-rapat pembahasan dalam rangka penyusunan zonasi/blok di masing-masing UPT di daerah. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 UPT Ditjen KSDAE yaitu Balai KSDA NTB, Bali, Sulteng, dan Balai TN. Bantimurung Bulusaraung. Keluaran (output) kegiatan berupa 1 laporan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawsan zona dan blok.
- 4) Pelatihan penataan zona/blok, kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tekmis dan pengetahuan/ kapasitas sumber daya manusia pengelola kawasan dalam penyusunan zonasi/blok agar memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam merancang ruang di dalam kawasan, dan menganalisis data dan

informasi yang dibutuhkan untuk menyusun zona/blok. Pelatihan penataan zona/blok dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 November 2015 di Malang, dengan jumlah peserta dari Balai Besar KSDA NTT, Balai KSDA Lampung, Bali, NTB, Sultra, Ambon, Balai TN. Lorentz, Laiwangi wanggameti dan Manupeu Tanah Daru.



Gambar 8. Nara Sumber dan Peserta Pelatihan Penataan Zona/Blok di Malang

- 5) Fasilitasi penyusunan zonasi/blok, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pendampingan penyusunan zonasi/blok dan pengelolaan KSA/KPA pada beberapa kawasan yang menjadi prioritas karena kondisi tertentu, seperti kawasan-kawasan yang berkarakteristik unik, fungsi kawasan, dan tipologi kawasan untuk dijadikan contoh dalam penyusunan zonasi/blok pada kawasan lainnya yang memiliki tipologi serupa. Kegiatan fasilitasi penyusunan zonasi/blok dilaksanakan di 6 UPT Ditjen KSDAE yaitu Balai KSDA Jambi, Bali, Sulut, Sultra, Balai TN. Ujung Kulon dan Balai TN. Kayang Mentarang.



Gambar 9. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Zonasi/Blok

IKK 2 → Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia

Evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi dilakukan untuk mendukung pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang terindikasi mengalami degradasi berat, yang tidak sesuai dengan model/fungsi, yang masih berstatus

HSA/KSA/ KPA/HK, dan kawasan konservasi baru hasil proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pada tahun 2015, jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi ditargetkan sebanyak 100 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. Pencapaian kinerja kegiatan dapat terealisasi sebesar 116% dari target 100 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia atau sebanyak 116 unit rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia telah disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE. Untuk tahun 2015, fokus kegiatan dilakukan pada kawasan Taman Wisata Alam.

Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat PIKA tahun 2015 dalam rangka mendukung pencapaian kinerja kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a. Penyusunan NSPK
- b. Bimbingan Teknis dan Supervisi
- c. Verifikasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi

Kemudian jenis kegiatan (sub komponen) yang telah dilaksanakan untuk tercapainya komponen kegiatan ini, antara lain:

1) Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2014.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kelengkapan perangkat lunak kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam terkait tahapan evaluasi kesesuaian fungsi yang akan dijadikan pedoman dan acuan masing-masing UPT di daerah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi.

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari proses pengumpulan data sebagai bahan penyusunan materi yang diperoleh dari 6 UPT Ditjen KSDAE yaitu Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, Balai KSDA Jawa Timur, Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Balai KSDA Kalimantan Selatan, Balai KSDA Yogyakarta dan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Kemudian dilakukan pembahasan penyusunan dengan rapat pembahasan yang melibatkan pihak terkait.



Gambar 10. Diskusi Pemantapan Materi Dalam Rangka Revisi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2014 di BBTN. Bromo Tengger Semeru

2) Bimbingan Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi/Review Kawasan Konservasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UPT di daerah dalam melakukan tahapan-tahapan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi. Kegiatan ini dilaksanakan di 6 UPT Ditjen KSDAE yaitu; Balai KSDA Jawa Barat, Balai KSDA Nusa Tenggara Barat, Balai KSDA Sumatera Barat, Balai KSDA Bengkulu, Balai KSDA Bali dan Balai KSDA Jambi.



Gambar 11. Bimbingan Teknis Evaluasi Kesesuaian Fungsi/Review Kawasan Konservasi di Balai KSDA Jambi

3) Evaluasi Fungsi/Perubahan Fungsi Pokok/Dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan/ Kawasan Konservasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk melihat potret kawasan di tingkat tapak dengan model desk study. Dari kajian ini akan dihasilkan arahan/rekomendasi indikatif pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.

Kegiatan ini tidak terealisasi disebabkan, karena beberapa hal, di antaranya adalah:

- a. Kegiatan perubahan fungsi kawasan konservasi sejak awal direncanakan untuk dialokasikan pada kegiatan perubahan fungsi kawasan konservasi CA Kamojang dan CA Papandayan. Namun, pelaksanaan terkendala pada adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang mengharuskan bahwa usulan kegiatan perubahan fungsi kawasan hutan perlu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat. Pendekatan pengusulan telah diupayakan, namun demikian hingga akhir tahun 2015, Gubernur Jawa Barat belum mengeluarkan usulan perubahan fungsi dimaksud.
- b. Keterbatasan waktu untuk pelaksanaan dan administrasi, bahwa kegiatan pelaksanaan kegiatan evaluasi fungsi/ perubahan fungsi/ dalam fungsi pokok kawasan hutan/ kawasan konservasi berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Sesuai dengan Peraturan dimaksud, bahwa kegiatan diawali dengan persiapan/ pengusulan, pengkajian usulan, pembentukan tim oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelaksanaan kajian dan laporan. Selama tahun 2015, hanya terdapat 2 usulan

evaluasi kesesuaian fungsi, yaitu usulan evaluasi kesesuaian fungsi CA Dolok Tinggi Raja dan SM Kateri. Untuk proses evaluasi kesesuaian fungsi, CA Dolok Tinggi Raja telah ditindaklanjuti hingga pembentukan Tim Kajian. Namun demikian, karena proses administrasi yang cukup panjang, sehingga hingga akhir tahun 2015, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tim Kajian evaluasi kesesuaian fungsi belum diterbitkan sehingga pada akhirnya kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

IKK 3 → Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA, dan TB di seluruh Indonesia

Pembangunan rancangan sistem informasi konservasi alam dalam rangka memenuhi kebutuhan paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Data potensi sumberdaya alam, baik hayati dan non hayati pada kawasan konservasi yang belum tergali dan belum terdokumentasikan dengan baik, mulai di inventarisir melalui analisis data kondisi kawasan konservasi sampai tingkat resort sehingga dapat menyediakan kebutuhan data dan informasi yang reliable dan up to date pada unit pengelola maupun para pengambil kebijakan di tingkat pusat.

Pada tahun 2015, jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable ditargetkan pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. Pencapaian kinerja kegiatan dapat terealisasi sebesar 100% dari target 521 paket data KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia dalam bentuk pembangunan sistem informasi database kawasan konservasi.

Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat PIKA tahun 2015 dalam rangka mendukung pencapaian kinerja kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) komponen, yaitu:

- a. Penyusunan NSPK
- b. Bimbingan Teknis dan Supervisi
- c. Pembinaan dan Koordinasi
- d. Pembangunan Sistem Informasi Konservasi Alam.
- e. Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Konservasi Alam
- f. Desiminasi Data dan Informasi
- g. Monitoring dan Evaluasi

Kemudian jenis kegiatan (sub komponen) yang telah dilaksanakan untuk tercapainya komponen kegiatan ini, antara lain:

1) Kajian Standar Kegiatan dan Biaya bidang PIKA.

Penyusunan Kajian Standar Kegiatan dan Biaya bidang PIKA dilakukan dalam rangka penyusunan penganggaran yang efektif dan efisien baik dalam proses perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan pada Balai Besar/Balai/KSDA/TN.

Kegiatan ini dilaksanakan di 6 UPT Ditjen KSDAE (Balai KSDA Sulteng, Sulut, NTB, Kalteng, Balai TN. Ciremai dan Balai TN. Ujung Kulon) melalui diskusi dan pembahasan tentang jenis-jenis kegiatan bidang pemolaan dan informasi konservasi alam, untuk dijadikan standar kegiatan dan biaya sebagai acuan dalam proses perencanaan, pengusulan dan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan dalam dokumen RKA-KL masing-masing UPT lingkup Ditjen KSDAE. Sampai saat ini terdapat 18 (delapan) jenis kegiatan

PIKA yang diusulkan menjadi acuan dan pedoman yang akan digunakan UPT dalam mengusulkan anggaran kegiatan pada RKA-KL.

2) Penyusunan model analisa spasial potensi.

Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi kebutuhan data dan informasi dalam sistem informasi konservasi alam yang meliputi penyediaan antar muka pembuatan tabel baru termasuk penyajian (view), pelaporan (report) dan analisis statistik (chart atau diagram). Penyusunan model analisa spasial potensi dilaksanakan pada kawasan TWA Muka Kuning dan SM. Balai Raja yang merupakan wilayah kerja Balai Besar KSDA Riau.

3) Sosialisasi peraturan terkait inventarisasi.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka perencanaan pembangunan sistem informasi database kawasan konservasi kepada para pemangku kepentingan/stakeholder agar rencana tersebut dapat berjalan secara optimal, dan terkordinasi secara sinergis. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan dan Balai KSDA Jogjakarta.



Gambar 12. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Terkait Inventarisasi Kawasan Konservasi di Jogjakarta

4) Koordinasi terkait inventarisasi kawasan konservasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk mensinergikan dan merekomendasikan kegiatan inventarisasi kawasan konservasi sebagai Base line data yang dipergunakan untuk kepentingan penataan, perencanaan, pengelolaan, evaluasi kesesuaian fungsi dan berbagai aspek pengelolaan KSA/KPA. Kegiatan ini dilaksanakan di 7 UPT Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar KSDA Jawa barat, Jawa Timur, Balai KSDA Bali, DKI Jakarta, Balai Besar TN. Gn. Gede Pangrango, Balai TN. Gunung Halimun Salak dan Balai TN. Karimunjawa.

5) Penyusunan Renstra 2015-2019.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran dan kegiatan Direktorat PIKA yang dilaksanakan bulan November 2015. Keluaran kegiatan ini berupa 1 dokumen RKA-KL Direktorat PIKA tahun 2016 dan 1 dokumen Renstra Direktorat PIKA tahun 2015-2019. Sedangkan Renja Tahun 2015 tidak terlaksana karena Direktorat PIKA mulai operasional bulan September 2015.

6) Tindak lanjut hasil audit.

Kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti terhadap temuan-temuan auditor atas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemolaan dan informasi konservasi alam pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di 8 UPT Ditjen KSDAE yaitu Balai KSDA Sulut, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Jogjakarta, Sumatera Selatan, Lampung, dan Balai TN. Ujung Kulon. Keluaran kegiatan berupa 1 laporan pelaksanaan kegiatan. Keluaran (output) kegiatan berupa 1 laporan tindak lanjut hasil audit.

7) Koordinasi pembinaan pimpinan.

Kegiatan ini dilakukan untuk mensinergikan, membangun jejaring kerja, mengevaluasi, mengkaji permasalahan, dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh dengan para pihak terkait pengelolaan KSA dan KPA pada tingkat pusat dan daerah provinsi, kabupaten/kota.

8) Penyusunan laporan triwulan dan semester.

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban, dan bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi Direktorat pada periode triwulan dan semester. Keluaran kegiatan ini berupa 2 laporan triwulan dan 1 laporan semester.

9) Peningkatan kapasitas SDM/Pembinaan pegawai Direktorat PIKA.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan loyalitas pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 – 4 Desember 2015 di Daerah Kuningan Jawa Barat. Keluaran kegiatan ini berupa 1 laporan.



Gambar 13. Pegawai Direktorat PIKA pada Acara Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM/Pembinaan Pegawai di Kuningan Jawa Barat

10) Rapat koordinasi bidang pemolaan dan informasi konservasi alam.

Kegiatan dilakukan dalam rangka membangun sinergisitas, sinkronisasi, koordinasi dan mengkaji permasalahan yang telah, sedang dan yang akan dihadapi serta menetapkan dan merumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh terkait kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam antara pusat dan daerah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Desember 2015 di Hotel Sahira 2 Bogor dengan peserta dari perwakilan UPT lingkup Ditjen KSDAE.

11) Monitoring dan evaluasi pencapaian IKK Direktorat PIKA.

Kegiatan ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam dalam rangka mendukung UPT agar mampu mencapai target

IKK Direktorat PIKA yang telah ditentukan. Kegiatan ini dilaksanakan di 9 UPT Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar KSDA Sumut, Balai KSDA Jawa Tengah, Sulut, Sulteng, Kalbar, NTB, Bali dan Balai Besar TN. Gunung Gede Pangrango, Balai TN. Ciremai. Keluaran kegiatan ini berupa 1 laporan hasil pelaksanaan pencapaian IKK Direktorat PIKA pada UPT lingkup Ditjen KSDAE.

12) Workshop sinkronisasi pengelolaan informasi kawasan konservasi.

Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam memformulasikan pengelolaan informasi kawasan konservasi dan mendorong pihak terkait untuk menyempurnakan pembangunan system dan jaringan informasi konservasi alam. Kegiatan ini dilaksanakan 2 kali yaitu pada tanggal 8 – 10 Oktober dan tanggal 12 – 14 Oktober 2015 di Hotel Sahira 2 Bogor dengan peserta dari lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta perwakilan dari seluruh UPT Ditjen KSDAE.



Gambar 14. Peserta Workshop Sinkronisasi Pengelolaan Informasi Kawasan Konservasi

13) Penyusunan NSPK pengumpulan dan pengolahan data inventarisasi/pemetaan dan informasi kawasan konservasi.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melengkapi perangkat lunak kegiatan pemetaan dan informasi konservasi alam terkait pengumpulan dan pengolahan data inventarisasi/pemetaan dan informasi kawasan konservasi yang akan dijadikan pedoman dan acuan masing-masing UPT di daerah dalam melaksanakan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari proses pengumpulan data sebagai bahan penyusunan materi yang diperoleh dari 11 UPT Ditjen KSDAE, yaitu Balai Besar KSDA Jabar, NTT, Balai KSDA Kalbar, Bengkulu, Jambi, DKI Jakarta, Balai Besar Gn. Gede Pangrango, Balai TN. Berbak, Gn. Ciremai, Ujung Kulon, dan Halimun Salak.



Gambar 15. Rapat Penyusunan NSPK Terkait inventarisasi dan informasi kawasan konservasi

14) Pencetakan buku terkait konservasi atau kawasan konservasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk bahan informasi dan publikasi konservasi alam yang up to date, valid dan reliable, sehingga kondisi kawasan konservasi akan lebih diketahui. Keluaran (output) kegiatan berupa 2 judul buku, yaitu buku Sejarah Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Ujung Kulon sebanyak 100 buku dan buku Informasi Kawasan Konservasi Region Sumatera sebanyak 100 buku.



Gambar 16. Informasi dan publikasi konservasi alam

15) Koordinasi terkait informasi kawasan konservasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk mensinergikan dan merekomendasikan kegiatan informasi kawasan konservasi agar dipergunakan untuk kepentingan penataan, perencanaan, pengelolaan, evaluasi kesesuaian fungsi dan berbagai aspek pengelolaan KSA/KPA. Koordinasi terkait informasi kawasan konservasi dilaksanakan di 8 UPT Ditjen KSDAE, yaitu Balai Besar KSDA Jabar, NTT, Balai KSDA NTB, Bali, DIY, Jogjakarta, Balai Besar Gn. Gede Pangrango, Gn. Ciremai, dan Gn. Merapi.

16) Pembangunan dan pemantapan sistem basis data.

Kegiatan ini dilakukan untuk pengelolaan informasi kawasan konservasi melalui struktur basis data yang berintegritas agar validitas dan reliabilitas terjaga. Keluaran kegiatan berupa 1 laporan pemantapan sistem basis data.

Indikator Kinerja Kegiatan ini juga dilakukan oleh Satker daerah seperti kegiatan monitoring plot permanen REDD di Taman Nasional Maeru Betiri (TNMB) dimaksudkan untuk mengetahui kondisi terkini plot permanen REDD dalam rangka fasilitasi kegiatan REDD di TNMB. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendata ulang jumlah dan kondisi pohon di setiap plot permanen serta menghitung ulang cadangan karbon khususnya pohon hidup. Kegiatan monitoring plot permanen REDD ini dilaksanakan di zona rehabilitasi SPTN II Ambulu sebanyak 30 Plot. Dari hasil monitoring diketahui adanya perubahan kondisi plot baik jumlah pohonnya maupun diameter yang berpengaruh pada jumlah cadangan karbon.



Gambar 17. Kegiatan Pengukuran dan pencatatan keliling pohon di Plot Permanen REDD zona rehabilitasi TNMB, tanggal 8 -15 Juli 2015

IKK 4 → Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) merupakan langkah strategis untuk membentuk wadah penyelenggara kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari ditingkat tapak. KPHK adalah kawasan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan konservasi untuk melindungi satwa dan tumbuhan beserta seluruh ekosistemnya secara efisien dan lestari.

Pada tahun 2015, jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk ditargetkan sebanyak 40 unit KPHK (Target awal capaian indikator kinerja kegiatan ini sebanyak 20 unit, kemudian pada saat rapat koordinasi rancang bangun KPHK pada bulan Juli 2015 Direktur Jenderal KSDAE merubah target tersebut menjadi 40 unit KPHK pada tahun 2015 dan 60 unit KPHK pada tahun 2016). Pencapaian kinerja kegiatan dapat terealisasi sebesar 105% dari target 40 unit KPHK atau sebesar 42 unit KPHK telah diusulkan Dirjen KSDAE ke Menteri LHK tentang pembentukan KPHK sesuai sesuai Nota Dinas Direktur Jenderal KSDAE Nomor: 409/KSDAE-PIKA/ 2015 tanggal 30 November 2015 dan dan Nomor: 423/KSDAE-PIKA/ 2015 tanggal 18 Desember 2015 Perihal Penyampaian Rancang Bangun KPHK Non TN.

Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat PIKA tahun 2015 dalam rangka mendukung pencapaian kinerja kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu:

- a) Pembinaan dan Koordinasi
- b) Penyusunan Indikatif Rancang Bangun KPHK

Kemudian jenis kegiatan (sub komponen) yang telah dilaksanakan untuk tercapainya komponen kegiatan ini, antara lain:

- 1) Workshop Rancang Bangun KPHK Non Taman Nasional

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyusun kriteria, indikator rancang bangun, dan pedoman sementara yang akan digunakan UPT dalam menyusun Rancang Bangun di masing-masing wilayah kerjanya. Workshop Rancang Bangun KPHK Non Taman Nasional dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2015 di Hotel Padjajaran Suite Bogor, dengan peserta dari masing-masing Eselon II lingkup Ditjen KSDAE, Sekretaris Nasional Pembangunan KPH, dan perwakilan dari UPT Balai Besar/Balai KSDA. Keluaran kegiatan ini berupa 1 laporan/proseding hasil workshop.

- 2) Koordinasi Terkait Pembentukan KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menyamakan persepsi antara para pihak yang mempunyai peran dalam penyusunan wilayah KPHK, seperti Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan instansi lainnya, serta penyelesaian berbagai permasalahan/kendala dalam pengajuan usul dan proses penetapan wilayah KPHK. Koordinasi terkait Pembentukan KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional telah dilaksanakan di 13 UPT Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar KSDA Riau, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Balai KSDA Sumbar, Jateng, Jogjakarta, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Sulut dan Sultra.



Gambar 18. Peserta Koordinasi Terkait Pembentukan KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional

IKK 5 → Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS

Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA, meliputi :

- a. Penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, dan
- b. Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan.

Pada tahun 2015, jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi ditargetkan sebanyak 20 PKS. Pencapaian kinerja kegiatan dapat terealisasi sebesar 100% dari target 20 PKS atau sebanyak 20 dokumen PKS yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (Direktur Jenderal KSDA /Direktur PIKA dengan Mitra). Adapun rincian kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi, adalah sebagai berikut:

- 1) Kerjasama Pembangunan Strategis (8 naskah perjanjian kerjasama):
 - a) Walikota Sabang tentang Ijin Peningkatan Daerah Milik Jalan dan Renovasi Tugu Km Nol.
 - b) General Manager Procurement Sumatera PT Telkomsel Area Sumatera tentang Penempatan menara telekomunikasi seluler (BTS) PT Telkomsel di TWA Pulau Weh.
 - c) Bupati Malaka, NTT tentang Pengelolaan Jalan Nasional di Kawasan SM Kateri.
 - d) PT. Sumber Hijau Permai tentang Kerjasama pemanfaatan alur Sungai Sembilang sepanjang $\pm 24,8$ Km lebar ± 40 meter kedalam 5-9 meter di TN Sembilang.
 - e) PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam ttg Pengelolaan Jaringan Listrik Transmisi SUTT 150 kV yang melewati kawasan TWA Muka Kuning.
 - f) EGM Divisi Network of Broadband PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tentang Pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Serat Optik yang melalui kawasan TN Manusela pada Project Sulawesi Maluku Papua Cable System (SPMC) Paket-1
 - g) General Manager PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau tentang Penempatan Tapak Tower dan Jaringan Transmisi 275 kV Payakumbuh - Padang Sidempuan di KSA/KPA Malampah, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat.

- h) General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II tentang pembangunan jalur SUTET 275 kV Kiliranjo-Payakumbuh yang melalui KSA/KPA Batang Pangean I.



Gambar 19. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Dirjen KSDAE dengan General Manager Procurement and General Affair Sumatera, PT. Telekomunikasi Selular.

- 2) Kerjasama Penguatan Fungsi (12 naskah perjanjian kerjasama):
- a) Balai Tahura Ir. H Djuanda dengan Direktur PDAM Tirtawening Kota Bandung.
 - b) Balai Besar KSDA NTT dengan Yayasan Komodo Survival Program dan Pusat Penelitian Biologi LIPI.
 - c) Balai Besar TNGL dengan POLDA ACEH.
 - d) Balai Besar KSDA Sumut dengan Yayasan Biodhicitha Mandala Medan.
 - e) Balai TN Gn Merapi dengan Universitas Sanata Dharma.
 - f) Balai TN Gn Merapi dengan Yayasan Kanopi Indonesia dan Kelompok Tani Ngudi Makmur.
 - g) Balai TN Gn Merapi dengan PT TS TECH Indonesia dan Sumitomo Forestry co.ltd.
 - h) Balai Besar TNBBS dengan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia.
 - i) Balai Besar TNBBS dengan Lembaga Molekuler Eijkman (LBME).
 - j) Balai Besar TNBBS dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat
 - k) Balai Besar TNBBS dengan PT Adhiniaga Kreasinusa
 - l) Balai Besar TNBBS dengan Yayasan Operasi Wallacea Terpadu (OWT)

Kegiatan yang dilaksanakan Direktorat PIKA tahun 2015 dalam rangka mendukung pencapaian kinerja kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) komponen, yaitu:

- a) Penyusunan NSPK
- b) Bimbingan Teknis dan Supervisi
- c) Pembinaan dan Koordinasi
- d) Monitoring dan Evaluasi

Kemudian jenis kegiatan (sub komponen) yang telah dilaksanakan untuk tercapainya komponen kegiatan ini, antara lain:

- 1) Penyusunan draft petunjuk teknis kerjasama pemanfaatan kawasan strategis dan penguatan fungsi.

Kegiatan ini dilakukan untuk melengkapi perangkat lunak kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam terkait petunjuk teknis kerjasama pemanfaatan kawasan strategis dan penguatan fungsi yang akan dijadikan acuan dan pedoman masing-masing UPT di daerah dalam melaksanakan kegiatan penataan zona/blok.

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari proses pengumpulan data sebagai bahan penyusunan materi yang diperoleh dari 8 UPT Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar KSDA Jawa Barat, Jawa Timur, Balai KSDA Sumsel, Jateng, Jogjakarta, NTB, Kalbar, dan Balai TN. Ujung Kulon. Keluaran (output) kegiatan berupa 1 dokumen NSPK.

2) Fasilitasi kerjasama pengelolaan kawasan konservasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk memfasilitasi kerjasama penyelenggaraan KSA/KPA, khususnya untuk kerjasama penguatan fungsi KSA/KPA seperti kegiatan pemaparan kerjasama, pengecekan dan kajian lapangan, serta rapat-rapat pembahasan. Fasilitasi kerjasama pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan di 10 wilayah kerja UPT di daerah, yaitu Balai Besar KSDA Riau-Batam, Jawa Barat, Balai KSDA Bali, Kaltim, Kalsel, Balai TN. Bali Barat, Baluran, Gn. Merbabu, dan Dinas Kehutanan Bali. Keluaran (output) kegiatan berupa 1 laporan fasilitasi kerjasama pengelolaan kawasan konservasi.



Gambar 20. Rencana Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Penyeberangan Ferry di CA Selat Laut pada Balai KSDA Kalimantan Selatan

3) Koordinasi terkait kerjasama pengelolaan kawasan konservasi.

Koordinasi terkait kerjasama pengelolaan kawasan konservasi dilakukan untuk memberikan arahan dan informasi serta asistensi proses dan pelaksanaan kerjasama, sehingga dicapai tujuan kerjasama yang diharapkan.



Gambar 21. Koordinasi terkait Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi pada Jalan di TN Manusela yang akan ditanam Kabel Optik PT. Telkom

4) Monitoring dan evaluasi kerjasama pengelolaan kawasan konservasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan kerjasama tahunan atau isidentil dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama sebelum kerjasama berakhir atau akan diperpanjang. Monitoring dan evaluasi kerjasama pengelolaan kawasan konservasi telah dilaksanakan pada kerjasama pengelolaan yang sudah berjalan sebelumnya di 13 wilayah kerja UPT Ditjen KSDAE yaitu Balai Besar KSDA Sumut,

Jabar, Jatim, Sulsel, Balai KSDA Jogjakarta, dan Balai Besar TN. Gn. Gede Pangrango, Bromo Tengger Semeru, serta Balai TN. Ujung Kulon, Halimun Salak, Ciremai, GN. Merapi, Bali Barat, dan Tanjung Puting. Keluaran kegiatan berupa 1 laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama pengelolaan kawasan konservasi.



Gambar 22. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kerjasama di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto

Tabel 18. Kategori Permohonan Kerjasama Tahun 2015

No	KATEGORI	JUMLAH PERMOHONAN	KETERANGAN
1	Pertahanan Keamanan	-	-
2	Sarana Komunikasi	7	2 PKS, 5 proses
3	Transportasi terbatas	17	3 PKS, 14 proses
4	Jaringan Listrik	6	3 PKS, 3 proses

Kegiatan 2
Pengelolaan Kawasan Konservasi

Tabel 19. Capaian Indikator Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Kode	Kegiatan / IKK	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2015	%
5421	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi				100,20
1	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Unit	a. 10 KK meningkat b. 40 KK prakondisi	a. 11 b. 119	a. 110 b. 297,5 (150)
2	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	Dokumen	30	32	106,67
3	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	Ha	10.000	5474	54,74
4	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	Desa	77	77	100,00
5	Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	Ha	10.000	51.405,846	514,06 (150)

Kode	Kegiatan / IKK	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2015	%
6	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	Unit	20	12	60,00
7	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	Provinsi	34	34	100,00

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah 100,20% dengan rincian sebagai berikut.

IKK 1 → Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70 % pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2015 – 2019, ditentukan salah satunya adalah Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. Dalam mencapai IKK tersebut, Direktur Jenderal KSDAE membentuk kelompok kerja penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang terdiri dari unsur Direktorat Kawasan Konservasi, Direktorat PIKA dan Sekretariat Ditjen KSDAE melalui Keputusan Dirjen KSDAE Nomor: SK.215/KSDAE-KK/2015 tanggal 16 September 2015. Dalam pencapaiannya, Direktorat Kawasan Konservasi melakukan beberapa tahapan kegiatan selama tahun 2015, yaitu :

1) Penyempurnaan form penilaian

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan menggunakan perangkat (tool) yang dikembangkan oleh the World Bank dan WWF pada tahun 2007 yaitu Management Effectiveness Tracking Tool (METT). Pada perangkat tersebut, diperlukan penyesuaian melalui penambahan penjelasan/keterangan pada masing-masing pertanyaan sehingga dapat diterapkan untuk menilai kawasan konservasi di Indonesia.

Dalam penyempurnaan form penilaian ini melibatkan serangkaian kegiatan dengan mengundang para pihak mulai dari Direktorat lingkup Ditjen KSDAE, perwakilan UPT BKSDA dan BTN yaitu BBKSDA Sumatera Utara, BBKSDA Papua, BBKSDA Jawa Timur, BBKSDA NTT, BKSDA Sumatera Selatan, BKSDA Kalimantan Tengah, BBTN Gunung Leuser, BBTN Gunung Gede Pangrango, BTN Siberut, BTN Takabonerate, BTN Laiwangi Wanggameti, BTN Aketajawe Lolobata dan BTN Kepulauan Seribu. Selain dari lingkup Ditjen KSDAE, pihak lain yang berkontribusi adalah Universitas Andalas, WCS-IP, WWF, FFI, CI, Forum Harimau Kita, Burung Indonesia, UNDP, Lestari dan pemerhati konservasi yang memiliki minat dan pengetahuan tentang penilaian efektivitas kawasan konservasi. Rangkaian kegiatan dalam penyempurnaan form penilaian ini yaitu :

- a. Rapat persiapan penyusunan pedoman penilaian efektivitas pengelolaan KK pada tanggal 10 Agustus 2015 di Ruang Rapat Direktorat KK.
- b. Workshop Penyusunan Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan KK (METT) di Hotel Menara Peninsula, Jakarta pada tanggal 24 – 26 Agustus 2015.
- c. Workshop Penyusunan Pedoman Tata Cara Penilaian METT di Hotel Novotel Bogor pada tanggal 13 – 14 Oktober 2015. Workshop ini merupakan lanjutan dari workshop sebelumnya dengan pembiayaan dari program E-PASS, UNDP.
- d. Rapat pembahasan pada tanggal 2 November 2015 di Jakarta.

- e. Rapat finalisasi pedoman penilaian efektivitas pengelolaan KK (METT) pada tanggal 8 Desember 2015 di Hotel Pakuan Bogor.

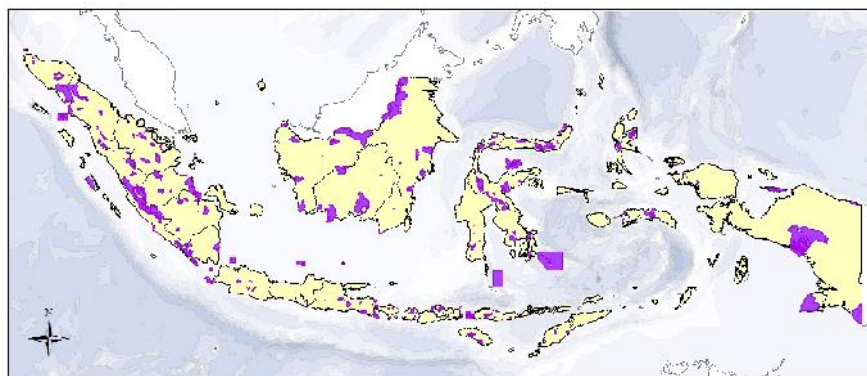
Form penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi setelah difinalkan kemudian diterbitkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : P.15/KSDAE-SET/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. Selanjutnya pedoman ini dicetak dalam bentuk buku dan dibagikan kepada seluruh UPT pengelola kawasan konservasi di Indonesia sebagai pedoman dalam penilaian kedepan.



Gambar 23. Rapat pembahasan penyempurnaan form METT

2) Penetapan target lokasi

Terdapat 521 unit kawasan konservasi di seluruh Indonesia yang terdiri dari Cagar Alam sebanyak 225 unit, Suaka Margasatwa sebanyak 75 unit, Taman Wisata Alam sebanyak 115 unit, Taman Hutan Raya sebanyak 23 unit, Taman Buru sebanyak 13 unit, Taman Nasional sebanyak 50 unit dan kawasan yang masih berstatus KSA/KPA sebanyak 18 unit kawasan. Berdasarkan data dari Direktorat Kawasan Konservasi, saat ini kawasan konservasi di Indonesia telah mengalami perubahan jumlah yaitu sebanyak 551 unit kawasan konservasi yang terdiri dari Cagar Alam sebanyak 219 unit, Suaka Margasatwa sebanyak 74 unit, Taman Wisata Alam sebanyak 123 unit, Taman Hutan Raya sebanyak 26 unit, Taman Buru sebanyak 11 unit, Taman Nasional sebanyak 51 unit dan kawasan yang masih berstatus KSA/KPA sebanyak 47 unit kawasan. Dari keseluruhan kawasan tersebut, dalam IKK Ditjen KSDAE ditetapkan 260 unit kawasan yang ditingkatkan nilai efektivitas pengelolaannya sebesar 70%. Penetapan unit kawasan tersebut dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : SK.234/KSDAE-KK/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Prioritas Untuk Peningkatan Nilai Indeks Efektivitas Pengelolaan Sebesar 70%. Sebarannya sebagai berikut :



Gambar 24. Sebaran 521 Kawasan Konservasi tahun 2015

3) Penilaian efektivitas pengelolaan KK sebagai baseline

Proses penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dilakukan berdasarkan penetapan kawasan konservasi prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan melakukan 5 (lima) kali kegiatan workshop yang dilakukan secara terpisah yaitu 1 kali untuk Taman Nasional, 1 kali untuk kawasan konservasi wilayah timur, 1 kali untuk kawasan konservasi wilayah barat, dan 2 kali untuk kawasan yang pengelolaannya dibantu project/donor luar negeri yaitu di Sulawesi Tengah dan Sumatera Utara. Masih terdapat 2 (dua) provinsi yang belum dilakukan penilaian pada tahun 2015 yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo yang akan dilakukan penilaian pada awal tahun 2016. Adapun rangkaian kegiatan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut.

- a. Workshop penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (METT) di Hotel Horison Bandung pada tanggal 18 – 21 Oktober 2015. Kegiatan ini dikhususkan untuk melakukan penilaian kawasan Taman Nasional seluruh Indonesia. Peserta workshop adalah perwakilan Balai Besar dan Balai Taman Nasional kecuali TN Lore Lindu dan TN Batang Gadis yang dilakukan penilaian terpisah dengan bekerjasama dengan E-PASS UNDP dan CI – Indonesia, kemudian TN Gunung Merbabu yang digabung dengan workshop penilaian selanjutnya.
- b. Workshop penilaian METT di Swiss Bell Grand Hotel, Medan tanggal 9 – 10 November 2015. Penilaian dilakukan pada kawasan TN Batang Gadis dan kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Pembiayaan kegiatan ini oleh CI – Indonesia.
- c. Workshop penilaian METT di Santika Hotel Palu tanggal 11 – 13 November 2015. Penilaian ini dilaksanakan untuk menilai kawasan TN Lore Lindu dan kawasan konservasi di Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Workshop Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (METT) pada tanggal 18 – 21 November 2015 di Hotel Primebizz Kuta, Bali. Kawasan Konservasi yang dilakukan penilaian METT adalah KK pada regional Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua serta 1 peserta dari TN Gunung Merbabu.
- e. Workshop Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (METT) untuk kawasan konservasi yang berada di regional Jawa, Kalimantan dan Sumatera serta sebagian pengelola Taman Hutan Raya. Workshop ini dilaksanakan di Hotel Cico Bogor pada tanggal 8 – 11 Desember 2015.

4) Penetapan Nilai Awal

Setelah dilakukan serangkaian kegiatan penilaian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hasil penilaian ditetapkan oleh Direktur Jenderal melalui Keputusan Dirjen KSDAE Nomor : SK.357/KSDAE-SET/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru. Penetapan nilai awal selain memuat nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, juga memuat opsi-opsi tindak lanjut dan langkah-langkah upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan pada sekretariat/direktorat teknis lingkup Ditjen KSDAE. Dalam penyusunan opsi-opsi tersebut dibahas melalui 2 (dua) kali rapat pembahasan yang melibatkan para pihak baik itu kelompok kerja penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi juga mitra kerja terkait seperti WCS, PILI dan Forum Harimau Kita.

Rapat pembahasan dalam penetapan nilai awal dan membahas opsi tindak lanjut adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (METT) di Taman Nasional pada tanggal 2 November 2015 di Hotel Menara Peninsula.
- b. Rapat Pembahasan Penetapan Nilai Awal Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (METT) di Hotel Cico Bogor pada tanggal 15 – 17 Desember 2015.

Dari hasil penetapan nilai awal, Capaian kinerja indikator Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Meningkat dilaksanakan melalui dua indikator kegiatan, yaitu :

- 1) Penilaian awal, terdapat 11 unit KK yang mencapai nilai minimal 70% seperti disajikan pada tabel di bawah. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015, yaitu 10 unit KK, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 110%.
- 2) Kegiatan prakondisi yang telah dilaksanakan pada 119 unit KK, jika dibandingkan dengan target tahun 2015 yaitu 40 unit KK, maka capaian kinerjanya adalah sebesar 297,5%, dan karena ada pembatasan besaran capaian kinerja maka capaian kinerjanya adalah sebesar 150%.

Tabel 20. Kawasan Konservasi yang mencapai Nilai Persentase METT 70%

No	Jenis KK	Nama Kawasan	Nilai % METT
1	TN	Gunung Gede Pangrango	80
2	TN	Ujung Kulon	77
3	TN	Alas Purwo	75
4	TN	Bali Barat	73
5	TN	Bantimurung Bulusaraung	72
6	TN	Gunung Halimun Salak	71
7	TN	Danau Sentarum	70
8	TN	Wasur	70
9	TNL	Wakatobi	74
10	TNL	Kepulauan Seribu	71
11	TNL	Karimun Jawa	77

5) Upaya peningkatan efektivitas

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, dalam penetapan nilai awal sudah memuat opsi-opsi tindak lanjut dan langkah-langkah upaya peningkatan nilai indeks pengelolaan kawasan konservasi. Peningkatan nilai indeks pengelolaan kawasan konservasi dilakukan tidak hanya oleh pengelola kawasan konservasi dalam hal ini Balai Besar atau Balai KSDA dan TN namun juga pihak lain terkait seperti Sekretariat Ditjen KSDAE, Direktorat teknis lingkup Ditjen KSDAE, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan hingga pihak luar seperti Pemerintah Daerah setempat, masyarakat adat dan masyarakat lokal di sekitar kawasan dan sebagainya.

Terdapat setidaknya 38 (tiga puluh delapan) pilihan rencana aksi untuk peningkatan efektivitas pengelolaan yang dapat dijalankan oleh pengelola kawasan (UPT/UPTD) mulai dari kegiatan sosialisasi, inventarisasi, hingga pengembangan program pelestarian/pemulihan spesies terancam punah secara khusus sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan. Sedangkan untuk Sekretariat dan Direktorat Teknis lingkup Ditjen

KSDAE terdapat 26 (dua puluh enam) langkah-langkah upaya tindak lanjut yang dapat meningkatkan nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi mulai dari koordinasi dengan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan hingga penetapan rencana aksi dan langkah implementasi untuk spesies terancam punah.

IKK 2 → Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada pasal 12 – 23 menguraikan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, agar kawasan dapat berfungsi sesuai fungsi dengan statusnya dan sesuai dengan tuntutan arah pembangunan, diharuskan disusun rencana pengelolaan sebagai pedoman arah pengembangan kawasan tersebut agar tidak menyimpang dari kebijakan pembangunan di bidang konservasi sumber daya alam hayati & ekosistem dan selaras dengan kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan Direktorat Kawasan Konservasi tahun 2015 – 2019, ditentukan salah satunya adalah jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan (RP) kawasan. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target sejumlah 30 dokumen RP jangka Panjang (RPJP) selama 2015 diantaranya adalah:

1. Penyusunan Permenhut tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan.
2. Melakukan pengaturan, bimbingan, arahan dan supervisi kepada SDM perencana pada masing-masing UPT dalam bentuk bimbingan teknis ke UPT dan pelatihan penyusunan RPJP.
3. Melaksanakan penilaian terhadap RPJP yang diajukan melalui telaahan teknis dan pembahasan.
4. Sampai akhir tahun 2015 telah disahkan sebanyak 27 dokumen RPJP yang terdiri dari 32 kawasan konservasi.

Berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Direktorat Jenderal KSDAE bahwa pada tahun 2015 harus tercapai 30 kawasan konservasi yang Rencana Pengelolaannya sudah disusun dan disahkan oleh Direktur Jenderal KSDAE. Sampai dengan Desember 2015 telah disahkan 27 dokumen Rencana Pengelolaan yang terdiri dari 32 kawasan konservasi, karena ada beberapa dokumen RP yang terdiri dari 2 (dua) kawasan atau lebih. Sehingga capaian kinerja tahun 2015 mencapai 106,57% ($32/30 \times 100$). Dibandingkan dengan target selama lima tahun yaitu sebanyak 150 kawasan konservasi maka capaian kinerja mencapai 21,33%. Sampai Tahun 2015 dari total 551 kawasan konservasi yang ada di Indonesia maka baru 196 Kawasan konservasi yang mempunyai Rencana Pengelolaan atau hanya 35,57% kawasan konservasi.

IKK 3 → Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha

Dalam pencapaian IKK ini, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu :

- 1) Penyusunan Roadmap Pencapaian Pemulihan Kawasan Konservasi

Penyusunan roadmap pencapaian pemulihan ekosistem kawasan konservasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menyediakan gambaran strategi maupun tahapan

kegiatan pemulihan ekosistem dan dapat digunakan sebagai acuan oleh Pusat maupun UPT sebagai pelaksana di tingkat tapak dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Sedangkan tujuan penyusunan roadmap pencapaian pemulihan ekosistem kawasan konservasi ini adalah untuk memberikan arahan terkait penyelenggaraan pemulihan ekosistem agar sesuai dengan rencana dan berjalan dengan optimal guna mendukung pencapaian IKK pemulihan ekosistem.

Kegiatan lapangan dalam rangka penyusunan roadmap pencapaian pemulihan ekosistem kawasan konservasi pada tahun 2015 telah dilakukan di 7 UPT Ditjen KSDAE (Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango, Balai TN Kepulauan Seribu, Balai TN Gunung Ciremai, Balai TN Rawa Aopa Watumohai, Balai KSDA Sulawesi Tengah, Balai TN Tesso Nilo, dan Balai Besar KSDA Jawa Barat). Untuk tahap awal, sebagai dasar pelaksanaan pemulihan ekosistem kegiatan yang harus dilakukan UPT adalah penyusunan Kajian dan Rencana Pemulihan Ekosistem (RPE).

2) Fasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Draft Revisi Permenhut P.48 Tahun 2014

Kegiatan fasilitasi dalam rangka penyusunan Draft Revisi Permenhut P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pemulihan Ekosistem di KSA dan KPA antara lain dilaksanakan rapat pembahasan draft revisi permenhut dengan narasumber/pakar dari beberapa instansi seperti Badan Litbang & Inovasi Kementerian LH dan Kehutanan, Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, dan Pusat Penelitian Limnologi LIPI. Selain itu dilakukan juga kegiatan kunjungan ke beberapa UPT Lingkup Ditjen KSDAE sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan penyusunan Revisi Permenhut dimaksud, serta untuk mengumpulkan saran atau masukan terkait penyempurnaan Draftnya.

3) Bimbingan Teknis Penyusun Rencana Pemulihan Ekosistem di KPA dan KSA

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaksanaan pemulihan ekosistem di UPT, maka dipandang perlu melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan Pemulihan Ekosistem. Meningkatnya kapasitas pelaksana kegiatan pemulihan ekosistem di UPT yang meliputi:

- a. Penyusunan Kajian dan Rencana Pemulihan Ekosistem;
- b. Tata Cara Penanaman dan Pengkayaan;
- c. Pemantauan dan Penilaian Keberhasilan Pemulihan Ekosistem;
- d. Sinkronisasi data rencana pemulihan ekosistem kawasan konservasi baik lokasi maupun luasan.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 24 – 26 November 2015 di Hotel Permata Bogor, Jawa Barat dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi Adopsi Pohon di Resort Nagrak Bidang Pengelolaan TN Wilayah Sukabumi, Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango.

4) Koordinasi Pemulihan Kawasan Konservasi

Kegiatan Koordinasi Pemulihan Kawasan Konservasi pada tahun 2015 telah dilaksanakan sebanyak 46 OT pada dua puluh tiga UPT Ditjen KSDAE.

Dari hasil kegiatan koordinasi diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Terdapat konflik permasalahan tenurial pada beberapa kawasan konservasi yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan tenurial;

2. Pada beberapa kawasan tidak layak untuk dilakukan pemulihan ekosistem karena kawasan belum clear and clean;
3. Terdapat UPT yang telah melakukan kegiatan rehabilitasi dengan menggunakan anggaran bersumber dari Ditjen PDASHL namun terjadi kebakaran hutan diusulkan kembali untuk dilakukan kegiatan Pemulihan ekosistem, akan tetapi disarankan untuk tidak diusulkan kembali untuk menghindari terjadinya pengangggaran yang ganda (double budget), kecuali dapat dilakukan PE setelah ada berita acara pemutihan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan DAS setempat bersama-sama dengan UPT Ditjen KSDAE;
4. Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Pemulihan Ekosistem sebagai pedoman UPT Ditjen KSDAE untuk melakukan PE belum jelas, mengakibatkan UPT ragu-ragu mengusulkan kegiatan PE, di samping adanya penurunan anggaran DIPA UPT tersebut, sehingga Pusat perlu segera membuat SKB dimaksud sebagai pedoman UPT dalam rencana kegiatan PE;
5. Berdasarkan Permenhut Nomor P.48/Menhut-II/2014, upaya pemulihan dilakukan pada Blok/Zona Rehabilitasi sehingga UPT tidak mengusulkan di zona/blok selain zona rehabilitasi tersebut;
6. Belum adanya regulasi terkait mekanisme yang mengatur pengelolaan penanaman di lokasi yang merupakan habitat/hutan pinus ataupun jenis eksotik lainnya;
7. Terdapat pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah mendapatkan SK Penetapan untuk melakukan rehabilitasi DAS di TN Bukit Tigapuluh belum ada aksi penanaman di lapangan sehingga mempengaruhi rencana pemulihan ekosistem UPT tersebut;
8. Terdapat pembelajaran yang diambil dari kegiatan restorasi yang dilakukan oleh beberapa LSM atau NGO seperti yang terjadi di TN Gunung Leuser, di mana hasil dari kegiatan restorasi dapat memperbaiki lahan yang terdegradasi dengan ditandai adanya beberapa satwa yang kembali ke habitat di mana areal tersebut sebelumnya merupakan lahan yang kritis (semak belukar);

IKK 4 → Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa

Dalam rangka pencapaian IKK ini, kegiatan yang dilaksanakan dalam Tahun 2015.

1) Bimbingan Teknis Pendamping Desa Binaan UPT Lingkup Ditjen KSDAE.

Kegiatan bimbingan teknis pendampingan desa binaan UPT lingkup Ditjen KSDAE bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan ketrampilan teknis para pendamping desa binaan, kurangnya tenaga fungsional penyuluh kehutanan bidang KSDAE, meningkatkan pemahaman para pendamping desa binaan terkait peraturan perundang - undangan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan menyatukan kesepahaman antara pendamping desa dengan kebijakan pusat dalam rangka meningkatkan pencapaian output IKK pembinaan desa penyangga. Kegiatan ini diselenggarakan dalam dua tahap, tahap pertama pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 22 - 23 oktober 2015, sedangkan pelaksanaan bimbingan teknis tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 30 november - 1 desember 2015. Lokakarya di hadiri oleh peserta pendamping dari 70 UPT yang terdiri dari Penyuluh, Polhut dan PEH, dengan jumlah total keseluruhan peserta ada 93 (sembilan puluh tiga) orang peserta.

2) Penyusunan Baseline Data Desa Penyangga.

Pelaksanaan Penyusunan baseline data desa penyangga tahun 2015 di laksanakan di 13 UPT yaitu : 1) BTN Gunung Gede Pangrango; 2) BTN Kerinci Seblat; 3) BTN Laiwangi Wanggameti; 4) BTN Lore Lindu; 5) BTN Bukit Baka Bukit Raya; 6) BTN Bali Barat; 7) BTN Gunung Ciremai; 8) BTN Gunung Rinjani; 9) BKSDA NTB; 10) BTN Halimun Salak; 11) BKSDA Sumatera Utara; 12) BKSDA Papua; 13) BKSDA Kalimantan Tengah. Hasil penyusunan baseline data desa penyangga:

- **Monitoring Dan Evaluasi**

Pelaksanaan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi tahun 2015 dilaksanakan di 9 UPT yaitu : 1) BTN Betung Kerihun; 2) BTN Wasur; 3) BTN Boganinani Wartabone; 4) BTN Kelimutu; 5) BKSDA NTB; 6) BKSDA Sulawesi Selatan; 7) BTN Gunung Halimun; 8) BTN Siberut; 9) BTN Gunung Gede Pangrango.

- **Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat**

Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk Koordinasi pemberdayaan masyarakat dilakukan di 7 UPT yaitu :

- 1) Jawa Barat;
- 2) BTN Way Kambas;
- 3) BTN Gunung Halimun;
- 4) BKSDA Aceh;
- 5) BKSDA Yogyakarta;
- 6) BTN Gunung Gede Pangrango;
- 7) BTN Tanjung Puting;

Koordinasi pemberdayaan masyarakat lainnya adalah terkait dengan Program Ekosistem Leuser, antara lain : penentuan lokasi desa, proses pencairan pendanaan, program umum proyek, dan penyusunan SOP.

Penyusunan Roadmap Pencapaian IKK Pembinaan Desa Penyangga Kawasan Konservasi untuk memberikan arah dan petunjuk untuk mencapai tujuan dalam pencapaian keberhasilan IKK pembinaan desa penyangga kawasan konservasi dalam jangka waktu 5 tahun. Output yang diharapkan dari penyusunan roadmap ini adalah tersusunnya pedoman bagi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pencapaian keberhasilan IKK pembinaan desa penyangga kawasan konservasi.

3) Fasilitasi Dalam Rangka Finalisasi Draft Permenhut Tentang Pemberdayaan Dan Tata Cara Penetapan Daerah Penyangga.

Maksud dari kegiatan fasilitasi dalam rangka finalisasi draft permenhut tentang pemberdayaan dan tata cara penetapan daerah penyangga adalah untuk memfasilitasi penyelesaian peraturan-peraturan Menteri Kehutanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan daerah penyangga kawasan konservasi. Tujuan dari kegiatan Fasilitasi Dalam Rangka Finalisasi Draft Permenhut Tentang Pemberdayaan dan Tata Cara Penetapan Daerah Penyangga ini adalah untuk mendorong dalam terbitnya peraturan – peraturan terkait pemberdayaan masyarakat dan daerah penyangga kawasan konservasi.

4) Penyusunan NSPK.

Menyusun juknis penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat di desa penyangga kawasan konservasi adalah membangun kesepahaman, meningkatkan koordinasi, bagi unit pelaksana teknis atau pengelola kawasan konservasi, masyarakat

dan stakeholder lain dalam melakukan penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat di desa penyangga kawasan konservasi. Output yang diharapkan dari penyusunan NSPK ini adalah tersusunnya pedoman sebagai bahan arahan bagi unit pelaksana teknis (UPT) atau pengelola kawasan konservasi, masyarakat dan stakeholder lain dalam melakukan penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat di desa penyangga kawasan konservasi.

5) Dukungan Pendampingan Program Ekosistem Leuser.

Kegiatan pendampingan dilakukan dengan tujuan untuk mengawal kegiatan Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem di 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi konservasi dan penyelesaian konflik dengan Ekosistem Gunung Leuser. Kegiatan proyek akan difokuskan pada keanekaragaman hayati dan pengembangan masyarakat melalui program pengembangan hutan dan masyarakat dan dukungan tambahan keanekaragaman hayati dan langkah-langkah konservasi. Hasil kegiatan Dukungan Pendampingan Program Ekosistem Leuser :

- Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem

Sebagai salah satu pemilik cadangan karbon terbesar di Asia, Ekosistem Gunung Leuser di Utara pulau Sumatera, Indonesia merupakan area hutan hujan tropis dengan luas $\pm$ 2,6 juta hektar. Area tersebut dikenal dengan keanekaragaman hayatinya dan merupakan perlindungan terakhir bagi Orangutan, Gajah dan Harimau Sumatra – bahkan satu-satunya tempat di dunia dimana ketiga jenis ini dapat ditemukan di satu tempat. Karbon dari biomassa tegakan hutan Gunung Leuser diperkirakan mencapai 2,5 milyar ton. Selain itu, Ekosistem Gunung Leuser memiliki tiga rawa air tawar (Singkil, Kluet, dan Tripa) dengan luas total $\pm$ 160.000 hektar yang berfungsi efektif sebagai penyerap karbon. Area ini juga berfungsi sebagai daerah resapan, yang menyediakan air bersih bagi jutaan penduduk yang hidup di wilayah Utara Sumatera.

Tujuan proyek : memastikan pengelolaan ekosistem Leuser dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menurunkan deforestasi dan merestorasi hutan yang terdegradasi, sehingga berkontribusi pada konservasi di kawasan yang memiliki salah satu cadangan karbon terbesar di Asia

Sasaran utama proyek : Mendukung pemberdayaan masyarakat di 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam dalam kegiatan pembangunan yang berorientasi konservasi dan penyelesaian konflik dengan Ekosistem Gunung Leuser yang meliputi : 1) Perencanaan penggunaan lahan dan tata batas area konservasi, 2) Penerapan pendekatan pembangunan yang berorientasi konservasi termasuk hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), hutan rakyat (HR), dan agro – forestry, dan pembangunan pusat GIS kabupaten untuk mendukung MRV national dan perencanaan penggunaan lahan diusulkan.

Lokasi kegiatan proyek berada di desa desa yang berbatasan dengan kawasan Gunung Leuser dan SM Rawa Singkil yang mencakup 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. Project Biodiversity Conservation and Climate Protection in The Gunung Leuser Ecosystem.

IKK 5 → Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha

Capaian kinerja ini merupakan koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat PJLKK dalam pencapaian IKK Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat. Hasil pencapaian kinerja tahun 2015 atas kegiatan ini adalah sebagaimana Tabel 21.

Tabel 21. Capaian luas kawasan hutan konservasi pada zona pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Volume	Target	Realisasi	Capaian (%)
Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	Ha	10.000	51.405,846	150

Indikator ini diukur dengan membandingkan Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat di tahun 2015 dengan jumlah target tahun 2015 sebanyak 20.000 Ha. Sampai akhir tahun 2015 jumlah jumlah zona pemanfaatan tradisional telah dicapai sebanyak 51.405,846 Ha. Jika dibandingkan dengan target tahun 2015, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 150,00%.

Pencapaian kinerja terkait data Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat diperoleh dari TN. Meru Betiri, TN. Gunung Merapi, TN. Bali Barat, TN. Bromo Tengger Semeru, TN. Komodo, TN. Merbabu, TN. Gede Pangrango, TN. Bukit Baka, TN. Sembilang, TN. Gunung Rinjani, TN. Bukit Barisan Selatan, TN. Halimun Salak, TN. Bantimurung, TN. Bukit 12, TN. Baluran, TN. Ujung Kulon, TN. Bromo Tengger Semeru, TN. Merapi, TN. Gede Pangrango, TN. Bali Barat, TN. Komodo, TN. Bukit 12, TN. Bukit Baka, TN. Baluran, TN. Ujung Kulon, TN. Sembilang, TN. Bukit Barisan Selatan, TN. Gunung Rinjani, TN. Halimun Salak, TN. Bantimurung, TN. Merbabu.

- Perbandingan data capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir serta target 5 tahun, sebagaimana Tabel 22.

Tabel 22. Pencapaian kinerja jangka menengah/ selama 5 tahun (tahun 2015-2019)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Vol.	Target 2015-2019	Capaian Tahun (%)					Jumlah
			2015	2016	2017	2018	2019	
Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat	Ha	100.000	51,41	N/A	N/A	N/A	N/A	20,19

Dana yang disediakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja ini sebesar Rp. 980.815.000 dengan realisasi sebesar Rp. 545.096.150 atau 55,48%. Dengan dukungan dana tersebut, Direktorat PJLHK telah mencapai kinerja sebesar 150%. Dana yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK melalui kegiatan yaitu :

1. Penyusunan NSPK Pengembangan Zona Pemanfaatan Tradisional.

2. Sinkronisasi/Koordinasi Dalam Rangka Pengembangan Zona Pemanfaatan Tradisional.
3. Identifikasi Kelembagaan Masyarakat Zona Pemanfaatan Tradisional di Kawasan Konservasi.
4. Focus Grup Discussion (FGD) Pengembangan Zona Tradisional di Kawasan Konservasi.
5. Workshop Pengembangan Zona Pemanfaatan Tradisional di Kawasan Hutan.
6. Penyusunan Data dan Informasi Potensi Ekonomi Zona Pemanfaatan Tradisional

Ketergantungan masyarakat sekitar terhadap keberadaan kawasan konservasi sangat tinggi dan tidak bisa dipisahkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagai mata pencaharian. Selain itu juga kawasan konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, hal ini mendorong pembentukan zona tradisional di Taman Nasional. Pemanfaatan oleh masyarakat berupa pemanfaatan hutan non kayu.

Outcome yang diperoleh dari pencapaian kinerja adalah Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di kawasan konservasi memiliki dampak secara ekonomi terhadap masyarakat disekitar kawasan sebagai mata pencaharian untuk menghidupi keluarga dan ada beberapa yang digunakan untuk dijual dan dikonsumsi sendiri.

Pada beberapa taman nasional pemanfaatan hasil hutan bukan kayu masih belum dilakukan secara kelompok tetapi masih dilakukan sendiri-sendiri tetapi sudah termonevitor oleh pihak Balai TN. Untuk itu, telah dilakukan upaya untuk mendorong masyarakat untuk membentuk lembaga/ organisasi kemasyarakatan dalam pemanfaatan kawasan konservasi.



Gambar 25. Pemanfaatan getah damar mata kucing (*Shorea javanica*) oleh masyarakat di Zona Tradisional Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

IKK 6 → Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK

Operasional KPHK Non TN terbatas pada unit KPHK Non TN yang sudah ditetapkan, yaitu sebanyak 12 unit yang ditetapkan pada tahun 2013. 12 lokasi tersebut yaitu KPHK Rawa Singkil di Aceh, KPHK Arau Hilir di Sumatera Barat, KPHK Kerumutan di Riau, KPHK Dangku Bentayan di Sumatera Selatan, KPHK Guntur Papandayan di Jawa Barat, KPHK Tambora di Nusa Tenggara Barat, KPHK Ruteng di Nusa Tenggara Timur, KPHK Gunung Melintang di Kalimantan Barat, KPHK Towuti di Sulawesi Selatan, KPHK Morowali di Sulawesi Tengah, KPHK Nantu di Gorontalo, serta KPHK Jayawijaya di Papua.

Tahun 2015 difokuskan untuk penyusunan NSPK Draft Petunjuk Teknis Operasional KPHK, pembangunan basis data, serta penyiapan SDM dan sarpras pada 12 unit KPHK non TN. Operasionalisasi KPHK non TN lainnya menunggu penetapan oleh Menteri LHK.

IKK 7 → Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi

Kegiatan perlindungan dan pengamanan menjadi salah satu kegiatan penting dalam mengelola kawasan konservasi. Setiap tahunnya terpantau bahwa seluruh UPT TN dan KSDA yang tersebar di 34 provinsi, menganggarkan dan melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan, yang jumlah maupun bentuk kegiatannya sesuai dengan tipologi permasalahan dan ancaman yang dihadapi.

Terkait IKK ini, tahun 2015 Direktorat Kawasan Konservasi memfokuskan untuk menyusun baseline kegiatan perlindungan dan pengamanan di 34 provinsi, berdasarkan laporan – laporan dari UPT.

Kegiatan 3 Konservasi Spesies dan Genetik

Tabel 23. Capaian Indikator Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

No	Kegiatan / IKK	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2015	%
	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik				110,30
1	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	%	a. 15 satwa meningkat (2%) b. 10 satwa prakondisi (100%)	a. 26,89% b. 100%	a. 1344 (150) b. 100
2	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	Spesies	2	4	200,00
3	Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	Unit	10	11	110,00
4	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Trilyun	Rp. Trilyun	5	5.31	106,15
5	Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp. Milyar	10	14,76	147,60
6	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	Paket Data	7	1	14,29
7	Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	PIC	1	1	100,00
8	Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	PRG	4	4	100,00
9	Jumlah sistem basis data balai kliring akses	Unit	1	1	100,00

No	Kegiatan / IKK	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2015	%
	dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi				
10	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	Unit	10	10	100,00

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik adalah 110,30% dengan rincian sebagai berikut.

IKK 1 → Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013

Direktorat Jenderal KSDAE memiliki target untuk meningkatkan populasi 25 species prioritas terancam punah berdasar SK Dirjen KSDAE No. SK 180/IV-KKH/2015. Ke empat belas species tersebut adalah harimau sumatera, gajah sumatera, badak jawa, owa jawa, elang jawa, jalak bali, komodo, banteng, orang utan kalimantan, kakatua jambul kuning, bekantan, babirusa, anoa, maleo, macan tutul jawa, rusa bawean, cendrawasih, surili, tarsius, monyet hitam sulawesi, julang sumba, nuri kepala hitam, penyu, dan kanguru pohon.

Peningkatan populasi 25 species yang terancam punah sampai 31 Desember 2015 dalam proses review basis data populasi serta situs monitoring sebagaimana pada Tabel 24 sebagai berikut.

Terlaksananya aktivitas peningkatan populasi berupa :

1. Penetapan 25 satwa terancam punah prioritas yang tertuang dalam SK 180/IV-KKH/2015
2. Pembentukan species specialis group
3. Penyusunan Pedoman Road Map Peningkatan Populasi 25 Species satwa terancam punah

Tabel 24. Data peningkatan populasi satwa proritas terancam punah tahun 2015

No	Satwa	Data yang diupdate			Peningkatan (%)
		Baseline (ekor)	Populasi terbaru (ekor)	Peningkatan / Penurunan (ekor)	
1	Harimau sumatera	30	35	5	28,57
2	Gajah sumatera	84	52		-25,24
3	Badak	70	75	5	4,31
4	Banteng	47	47	0	0,00
5	Owa	21	25	4	19,05
6	Orangutan	143	102	-41	-23,39
7	Bekantan	455	458	3	0,66
8	Komodo	6	22	16	266,67
9	Jalak Bali	7	8	1	14,29
10	Maleo	446	994	548	133,74
11	Babi Rusa	39	33	-6	-12,82
12	Anoa	59	33	-26	-42,61
13	Elang	11	11	0	0,00
14	Tarsius	82	86	4	4,88
15	Monyet Hitam Sulawesi	31	34	3	9,68
Rata-rata peningkatan populasi Tahun 2015					26,89
Capaian kinerja (target 2%)					1.344 (150)

Sumber: Dit KKH 2015

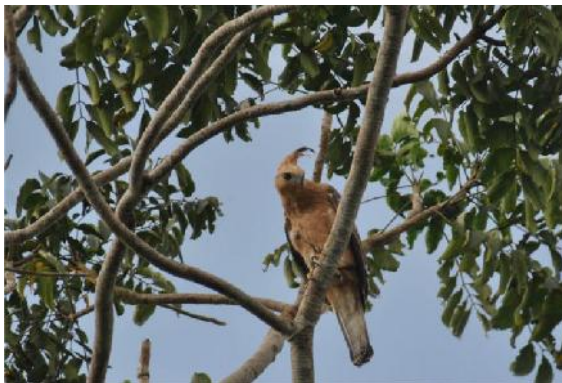
Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa hanya lima belas spesies yang terinput datanya populasinya. Pada tahun 2015 empat populasi menunjukkan adanya penurunan populasi. Hal dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain gangguan terhadap habitat sehingga menurunkan kemampuan reproduksi, adanya konflik, dan perburuan ilegal.

Indikator Kinerja Kegiatan ini dilakukan juga oleh satker daerah seperti di BKSDA ACEH untuk kegiatan monitoring populasi gajah, kegiatan ini pada tahun 2015 dilaksanakan sebanyak 2 kali. Monitoring populasi gajah dilakukan di lansekap Bireun-Bener Meriah-Aceh Tengah dan di Desa Jambo Rehat Kabupaten Aceh Timur. Lansekap Bireun-Bener Meriah-Aceh Tengah merupakan site monitoring untuk satwa gajah sumatera di Propinsi Aceh. Dari hasil kegiatan di lapangan, Tim BKSDA Aceh menemukan jejak, kotoran, pondok kerja dan kebun yang dirusak oleh kelompok gajah. Gajah yang ada di lansekap tersebut diperkirakan sebanyak 42 ekor. Hasil kegiatan monitoring di Desa Jambo Rehat Kabupaten Aceh Timur juga ditemukan jejak dan kotoran gajah liar, diperkirakan jumlah gajah yang ada sebanyak 46 ekor.



Gambar 26. Kegiatan monitoring polpulasi gajah di BKSDA Aceh

BTN alas Purwo juga melakukan kegiatan monitoring satwaliar. Lokasi pelaksanaan kegiatan monitoring elang jawa tahun 2015 ini adalah wilayah Rowobendo dan sekitarnya. Meskipun site monitoring elang jawa telah ditetapkan berada di Jalur Pengamatan Burung, namun dengan banyaknya informasi yang didapat serta hasil patroli, maka diputuskanlah monitoring elang jawa akan dilakukan di Rowobendo dan wilayah sekitarnya, dimana dibagi menjadi 9 stasiun pengamatan. Adapun pengamatan ini dilakukan selama 6 bulan terhitung mulai bulan Mei minggu ketiga sampai bulan Oktober. Sedangkan metode yang digunakan dalam kegiatan pengamatan adalah model point count (static station) dengan lokasi centroid stasiun. Selama pelaksanaan kegiatan ditemukan 3 Individu Elang Jawa yang terdiri dua induk (jantan-betina) dan satu anakan.



Gambar 27. Aktivitas Elang Jawa di sekitar sarang di BTN Alas Purwo

IKK 2 → Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013

Terlaksananya aktifitas upaya penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013 yang diprioritaskan pada lembaga konservasi yang telah terakreditasi dengan nilai mutu A s.d C berupa:

1. Penetapan baseline data jenis satwa dilindungi terancam punah yang telah berhasil dikembangkan pada lembaga konservasi sampai dengan tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE No: SK.301/KSDAE-KKH/2015;
2. Penetapan target jenis satwa liar yang dikembangkan di lembaga konservasi pada tahun 2015 s/d 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE No: SK.302/KSDAE-KKH/2015;
3. Penyusunan Pedoman Road Map Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi.

Pada tahun 2015 jenis satwa dilindungi yang menjadi target pengembangbiakkan di lembaga konservasi yang telah berhasil sebagai berikut:

1. Banteng (*Bos javanicus*) di Taman Safari Indonesia II Prigen, Provinsi Jawa Timur.
2. Burung kakatua (*Cacatua spp*) di Taman Safari Indonesia I Cisarua Bogor, Provinsi Jawa Barat.
3. Julang mas (*Aceros undulatus*) di Taman Safari Indonesia I Cisarua Bogor, Provinsi Jawa Barat.
4. Burung cenderawasih (*Paradisaea spp*) di Taman Safari Indonesia I Cisarua Bogor, Provinsi Jawa Barat.

IKK 3 → Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015 telah tersertifikasi 11 Unit penangkaran yang melakukan peredaran keluar negeri yaitu CV. Bali Sea Farm, PT. Pura Baruna Lestari, CV. Sarana Teknik, PT. Hiu Samudra Pratama, PT. Coral International, PT. Aksara Bahana Abadi, PT. Trisentosa Intrabuana Niaga, UD. Lestari Aquatika, UD. Sinar Bahari, CV. Bali Coral dan CV. Bali Coral – Kendari.

IKK 4 → Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Trilyun

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2015 atau 31 Desember 2015 realisasi nilai devisa yang dihasilkan dari ekport pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar serta bioprospecting sebesar Rp. 5.307.448.015.075,- atau sebesar 106,15% dari target yang telah ditetapkan. Terlampauinya target tersebut disebabkan adanya .pemanfaatan darah monyet yang digunakan untuk vaksin oleh PT. Bio Farma.

IKK 5 → Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50M

PNPB yang berasal dari pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar pada triwulan IV tahun 2015 adalah sebesar RP. 14.759.813.680,- atau sebesar 147,60 % dari target yang ditetapkan sebesar 10 Milyar. Terlampauinya target tersebut disebabkan oleh adanya penerapan harga patokan TSL yang ketat serta tertibnya pelaporan PNPB dari setiap UPT baik Balai KSDA maupun Balai Taman Nasional.

IKK 6 → Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi

Data dan informasi sebaran untuk tahun 2015 adalah data identifikasi tanaman obat di wilayah Sulawesi. Dari hasil identifikasi diperoleh hasil identifikasi potensi tumbuhan obat di 6 lokasi tersebut ditemukan ± 48 jenis tumbuhan di lokasi Bolonsio dan Toraut TN Bogani Nani Wartabone, 92 jenis tumbuhan di SM Nantu, 34 jenis tanaman obat di Bantimurung. Data potensi tumbuhan obat di wilayah Sulawesi tersebut akan masuk ke dalam sistem database sumberdaya spesies dan genetik.

IKK 7 → Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC

Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal yang selanjutnya disebut PADIA adalah persetujuan dari penyedia Sumber Daya Genetik atau pengetahuan tradisional sumber daya genetik atas permohonan akses terhadap sumberdaya genetik setelah mempertimbangkan semua informasi mengenai kegiatan akses terhadap sumber daya genetik yang diberitahukan sebelumnya oleh pemohon akses.

Hal tersebut sesuai dengan protokol Nagoya yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable sharing of benefit Arising from their utilization to the Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada sumber daya genetik yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi keanekaragaman hayati.

Sesuai pengaturan dalam Protokol Nagoya, PIC harus merupakan dokumen tertulis sehingga dapat menjadi bukti jika terjadi kasus-kasus pelanggaran atau pencurian sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik. Satu Dokumen PADIA atau PIC yang telah dicapai merupakan penelitian dari Dr. Yeni A. Mulyani di bawah payung konsorsium CRC IPB/EFForTS dengan judul penelitian Aboveground patterns of biodiversity and associated ecosystem processes across ecosystem rainforest transformation di Balai Taman Nasional Bukit dua Belas. Adapun tujuan melakukan akses terhadap sumber daya genetik adalah untuk melakukan diversity pola makan, fungsi dari setiap jenis burung

yang berada di 4 sistem transformasi sistem landscape yaitu hutan, perkebunan karet, hutan karet dan hutan karet non sawit.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun draft PERMENLHK tentang akses terhadap sumber daya genetik spesies liar dan pembagian keuntungan atas pemanfaatannya. PERMENLHK ini mengatur tentang akses terhadap SDG, kontrak mengenai pemanfaatan SDG dan pembagian keuntungan, pengalihan materi, kelembagaan dan ketentuan peralihan.

IKK 8 → Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik

Pada tahun 2015 sudah terbit empat produk hasil assesment aman lingkungan : Jagung Pre Event NK 603 Toleran Herbisida Glifosat, PRG Vectormune HVT ND Trispens, PRG Ingelvac Circoflex dan PRG Himmvac Dalguban N Plus Oil.

IKK 9 → Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi

Sesuai dengan target capaian IKK Tahun 2015, telah dibangun Balai Kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumber daya genetik (Balai Kliring ABS). Balai Kliring ABS merupakan portal database sumberdaya genetik yang akan diintegrasikan dengan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati (BKHH). Untuk tahun 2015, Balai Kliring ABS mencakup database tentang (1) data identifikasi tanaman obat untuk wilayah Jawa dan Kalimantan (2014) dan Sulawesi (2015); (2) penetapan kuota berbasis web yang merupakan forum antara pemerintah, provider, dan pengguna; (3) Profil Kehati di Daerah; dan (4) Prosedur/mekanisme ijin penelitian berbasis web.

IKK 10 → Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit

Pencapaian IKK penetapan pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam pada tahun 2015 sebanyak 10 sanctuary. Penetapan sanctuary berdasar keputusan Direktur Jenderal KSDAE dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Pengusulan melalui pengajuan proposal
- Verifikasi oleh tim spesies grup (terdiri dari otoritas manajemen –Dit KKH, otoritas keilmuan-Puslit Biologi LIPI, Perguruan tinggi, forum spesies dan CSO-Civil Society Organization yang ditetapkan dengan SK Direktur Jenderal KSDAE)
- Penerbitan rekomendasi
- Penerbitan SK Direktur Jenderal.

Kegiatan 4 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Tabel 25. Capaian Indikator Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

No	Kegiatan / IKK	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2015	%
	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi				91,35
1	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	Orang	250.000	210.136	84,05
2	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	Orang	3.500.000	4.038.070	115,37
3	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	Unit	20	28	140,00
4	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	Unit	5	10	200,00
5	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	Unit	5	5	100,00
6	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	-	-	-
7	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	-

Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah 91,35% dengan rincian sebagai berikut.

IKK 1 → Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara

Capaian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan konservasi selama tahun 2015 tercatat sebanyak 210.136 orang atau setara dengan 84,05% dari target 250.000 orang. Data diperoleh dari sumber aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Pendataan Konservasi) PHKA Tahun 2015 dan Laporan Bulanan dari UPT.

Bulan November 2015 baru 10 UPT yang menginput data SIDAK, sedangkan pada bulan Desember 2015 baru 3 UPT yang menginput data SIDAK. kegiatan yang menunjang pencapaian IKK melalui 3 komponen kegiatan yaitu 1) Pemberian Informasi dan Promosi Pengembangan Pengusahaan Pariwisata Alam; 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan 3) Pembinaan dan Koordinasi. Tiga komponen tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pembuatan Materi Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam (Bahasa Inggris); berupa pengadaan peta wisata Taman Wisata Alam sebanyak 2.800 Eks, pengadaan peta wisata Taman Nasional sebanyak 3.000 Eks dan pembuatan Bokklet sebanyak 3.960 Eks.
- b. Pembuatan Buku Destinasi Wisata Eksotik di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam (Bahasa Inggris) sebanyak 500 buku.

- c. Pameran Jambore Konservasi Alam Nasional 2015 yang dilaksanakan di Taman Nasional Ujung Kulon dengan mengundang para duta besar yang telah melakukan kerjasama terkait jasa lingkungan pada tanggal 8-10 Agustus 2015.
- d. Pameran Promosi Konservasi Alam di Luar Jakarta yaitu berpartisipasi dalam Pameran “Green & Conservation Expo (GREENTEX 2015) di Bandung pada tanggal 20 s.d. 23 Agustus 2015.
- e. Audit Surveliance ISO 9001 : 2008
- f. Mengikuti Pelatihan dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia PjLHK.
- g. Sinkronisasi/Rapat/Pembinaan dan Lain-lain Bidang PPKA.
- h. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Wisata Alam.
- i. Dukungan Event Jambore Konservasi Alam Nasional 2015.
- j. Dukungan Tomini Sail Event 2015.



Gambar 28. Dukungan pada event Tomini Sail 2015



Gambar 29. Aktivitas pengunjung asal Eropa memandikan Gajah di Tangkahan, Taman Nasional Gunung Leuseur

Indikator kinerja kegiatan ini juga dilakukan oleh satker daerah diantaranya oleh BTN Kelimutu. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Taman Nasional Kelimutu, Balai Taman Nasional Kelimutu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa menarik wisatawan asing diantaranya Even Tahunan Budaya Lokal yang diberi nama Even Pati KaDu'a Bapu Ata Mata yang diselenggarakan setiap tanggal 14 Agustus setiap tahunnya. Pati Ka Du'a Bapu Ata Mata yaitu prosesi pemberian makan arwah oleh komunitas adat di sekitar daerah penyangga. Danau Kelimutu sendiri yang dipercaya oleh masyarakat lokal merupakan tempat bersemayamnya para arwah leluhur. Selain prosesi

pemberian makan arwah, acara ini juga menampilkan atraksi seni diantaranya tarian-tarian adat Lio, pagelaran musik adat Lio dll. Disamping even tahunan, Balai Taman Nasional Kelimutu juga membuka wisata minat khusus yaitu pembukaan jalur trekking wisata baru dari camping ground Wologai Tengah menuju puncak Danau Kelimutu. Jalur trekking wisata ini menempuh jarak sepanjang 8,6 km. Di sepanjang jalur akan banyak ditemui spot-spot yang menarik seperti tempat pemantauan burung, tempat melihat sunrise dan spot-spot menarik lainnya. Selain menggelar even tahunan dan pembukaan jalur trekking baru, Taman Nasional Kelimutu juga membuat media informasi berupa neon box dan baliho yang terpasang di Bandara Ende dan simpang lima serta untuk menjaga minat wisatawan untuk datang ke kawasan dengan melakukan pembersihan di sekitar jalan masuk ke kawasan dari cabang jalan Desa Waturaka sampai ke tempat parkir dengan kegiatan pemeliharaan DMJ. Dengan seluruh kegiatan tersebut yang telah dilaksanakan tentu diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke kawasan Taman Nasional Kelimutu. Segala upaya yang dilakukan ternyata tidak sia-sia, terbukti dari hasil rekapitulasi kunjungan wisatawan mancanegara dari Januari s/d Desember 2015 mencapai 12.633 orang dari target 8.000 orang kunjungan wisatawan mancanegara.



Gambar 30. Pengunjung mancanegara sedang mendokumentasikan indahnya danau kelimutu

IKK 2 → Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara

Capaian jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke kawasan konservasi selama tahun 2015 tercatat sebanyak 4.038.070 orang atau setara dengan 115,37% dari target 3.500.000 orang. Data diperoleh dari sumber aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Pendataan Konservasi) PHKA Tahun 2015 dan Laporan Bulanan dari UPT.

Bulan November 2015 baru 10 UPT yang menginput data SIDAK, sedangkan pada bulan Desember 2015 baru 3 UPT yang menginput data SIDAK. kegiatan yang menunjang pencapaian IKK melalui 4 komponen kegiatan yaitu 1) Informasi dan Promosi Pengembangan Pengusahaan Pariwisata Alam; 2) Pembinaan dan Koordinasi; 3) Bimbingan Teknis; dan 4). Monitoring dan Evaluasi. Empat komponen tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan:

- a. Materi Promosi dan pemasaran Konservasi Alam.
- b. Promosi Konservasi Alam Melalui Media Massa.
- c. Pameran Promosi Konservasi Alam di Jakarta.

- d. Pameran Konservasi Alam Mobile.
- e. Rapat-rapat Pemanfaatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam.
- f. Fasilitasi Pembentukan Forum Jasa Wisata Alam.
- g. Penyelesaian Program dengan Satuan Tugas di Kementerian LHK dalam rangka Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan TWA Grojogan Sewu menjadi Tahura.
- h. Identifikasi Sarana dan Prasarana Wisata Alam di Hutan Konservasi.
- i. Pengelolaan Website Direktorat Jenderal KSDAE Bidang PJLHK.
- j. Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam.
- k. Monev pemanfaatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam.
- l. Monitoring Peningkatan Kapasitas SDM Bidang PJLHK.



Gambar 31. Pameran Promosi Konservasi Alam di Jakarta pada Event Deep & Extreme Indonesia 2015



Gambar 32. Pameran Konservasi Alam Mobile di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Kegiatan Pameran tingkat regional maupun nasional juga dilakukan oleh beberapa satker daerah diantaranya BKSDA Kalimantan timur (Kaltim), BTN Maru betiri dan, BBTN Bromo Tengger Semeru. Pameran Kaltim Expo 2015 berlangsung selama 5 (lima) hari dari tanggal 21 – 25 Agustus 2015 di Stadion Madya Sempaja Samarinda. Materi yang di sampaikan oleh BKSDA Kaltim adalah tentang Pesona wisata di Taman Wisata Alam Pulau Sangalaki, Struktur Organisasi BKSDA Kaltim, Peta Kawasan Konservasi, Jenis kegiatan BKSDA Kaltim. Jumlah pengunjung $\pm$ 650 orang pengunjung yang datang ke stand BKSDA Kaltim.



Gambar 33. Pameran Kaltim Expo 2015 yang di ikuti BKSDA Kalimantan Timur

Dalam rangka promosi konservasi tingkat nasional, pada tahun 2015 Balai TNMB mengikuti Green & Conservation Expo (Greentex) 2015 pada tanggal 19 – 24 Agustus 2015 di Graha Manggala Siliwangi, Bandung, Jawa Barat. Greentex 2015 adalah pameran kehutanan, gaya hidup hijau konservasi yang menampilkan potensi pada sector kehutanan pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian hutan. Pameran ini juga mensosialisasikan program dan tindakan nyata pemerintah dan pihak swasta dalam melaksanakan pembangunan hutan berkelanjutan. Tujuan mengikuti pameran ini adalah untuk mempromosikan dan menjual paket-paket wisata yang ada di TNMB dan menjalin networking (jejaring usaha) wisata dengan tour agen/ operator wisata.



Gambar 34. Petugas BTN Meru Betiri memberikan informasi pada pameran Greentex, Grahadi Bandung.



Gambar 35. Pameran tingkat nasional yang di ikuti BBTN Bromo Tengger Semeru di Bali, dengan tema Tourism Trade Investment.

IKK 3 → Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013

Capaian penambahan jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi selama tahun 2015 tercatat sebanyak 28 (dua puluh delapan) unit usaha atau setara dengan 140% dari target 20 unit. Secara rinci penambahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. IUPSWA 6 (enam) unit yaitu:
 - a) TN. Kerinci Seblat (1 unit); PT. Linggau Bisa/Pemda Lubuk Linggau).
 - b) TN. Ujung Kulon (1 unit); PT Wana Wisata.
 - c) TWA. Tanjung Tampa (2 unit) yaitu; PT. Naga Mountain Beach dan PT. Mitra Alam.
 - d) TWA. Pulau Sangalaki (1 unit); PT. Sangalaki Manta Paradise.
 - e) TWA. Muka Kuning (1 unit); PT. Lise Batam Rimba Lestari.
2. IUPJWA 22 (dua puluh dua) unit yaitu:
 - a) TN. Gunung Ciremai; 10 unit.
 - b) TN. Alas Purwo; 5 unit.
 - c) TN. Wakatobi; 1 unit.
 - d) TN. Kelimutu; 1 unit.
 - e) TN. Baluran; 1 unit.
 - f) TWA. Gunung Papandayan; 4 unit.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2015 jumlah IPPA (Ijin Pemanfaatan Pariwisata Alam) sebanyak 201 (dua ratus satu) unit terdiri dari 35 (tiga puluh lima) unit IUPSWA (Ijin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam), dan 166 (seratus enam puluh enam) unit IUPJWA (Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam). Kegiatan yang menunjang pencapaian IKK melalui 8 komponen kegiatan yaitu 1) Penyusunan NSPK; 2). Informasi dan Promosi Pengembangan Pengusahaan Pariwisata Alam; 3). Pembinaan dan Koordinasi; 4). Bimbingan Teknis; 5). Monitoring dan Evaluasi; 6). Dokumen Perencanaan dan Evaluasi; 7). Pengembangan Kerjasama; 8). Sosialisasi Peraturan dan Perundangan. Delapan komponen tersebut dijabarkan dalam bentuk kegiatan :

- Penyusunan/Revisi Peraturan Perundangan/Padoman PJLHK.
- Pembuatan Buku Destinasi Wisata Eksotik di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam (Bahasa Indonesia).
- Pembuatan Buletin Konservasi Alam.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kerjasama Pengembangan Bidang PJLH.
- Fasilitasi/Pendampingan Program Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan.
- Pelaksanaan/Operasional DIPA BA-029 Tahun 2015.
- Rapat Koordinasi/ Dinas/ Pimpinan/ kelompok Kerja/ Konsultasi dalam rangka meningkatkan Kinerja Direktorat PJLHK.
- Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Promosi dan pemasaran Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi.
- Pengelolaan Database Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.
- Evaluasi Pencapaian IKU/IKK Direktorat PJLHK.
- Evaluasi Optimalisasi Pungutan PNBPN.
- Penyusunan Rencana dan Pelaporan Direktorat PJLKKHL
- Peningkatan Kapasitas Kerjasama Pengembangan Bidang PJLHK.
- Fasilitasi/Pendampingan Kerjasama Bidang PJLHK.

- Pojok Belajar Bidang PJLHK.
- Forum Group Discussion (FGD) Program Peningkatan Pengembangan Bidang PJLHK.
- Sosialisasi Peraturan dan Perundangan Bidang Jasa Lingkungan.



Gambar 36. Kegiatan fasilitasi pembentukan forum jasa wisata alam di Balai Taman Nasional Merbabu dan Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan



Gambar 37. Sarana Prasarana yang dibangun oleh pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam dalam rangka mendukung pariwisata alam

IKK 4 → Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit

Capaian penambahan jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi selama tahun 2015 tercatat sebanyak 10 (sepuluh) unit atau setara dengan 200% dari target 5 (lima) unit. Penambahan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) yang terbit pada tahun 2015 adalah 1 (satu) unit yaitu PDAM Tirta Sakti Kabupaten Kerinci (TN. Kerinci Seblat).
2. Sedangkan Izin Pemanfaatan Air (IPA) berjumlah 9 (sembilan) unit, yaitu:
 - a. TN. Gunung Gede Pangrango; 2 unit.
 - b. TN. Gunung Halimun Salak; 1 unit.
 - c. TN. Karimunjawa; 1 unit.
 - d. TN. Laiwangi Wanggameti; 1 unit.
 - e. TWA. Sidrap (BBKSDA Sulsel); 1 unit.
 - f. TWA. Lejja (BBKSDA Sulsel); 1 unit.
 - g. TWA. Danau Matano (BBKSDA Sulsel); 1 unit.
 - h. BB Wil Sungai Sumatera VII (KSA Gunung Permisan, Bangka Belitung Sumsel); 1 unit.



Gambar 38. Kegiatan Penguatan Kelembagaan pemanfaatan air di Taman Nasional Gunung Merapi



Gambar 39. Kegiatan Bimtek Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Taman Nasional Betung Kerihun

Indikator kinerja kegiatan ini juga dilakukan oleh satker daerah diantaranya BTN Meru Betiri. Inventarisasi potensi sumber daya air di BTN Meru Betiri dilaksanakan pada tanggal 3 – 7 Agustus 2015 di 3 SPTN TNMB. Di wilayah SPTN I Sarongan inventarisasi dilakukan di sungai yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu sungai Kalikawat, Kali mati dan sungai Pakem. Debit air sungai Kalikawat 0.0325 m³/s sedangkan Kali mati 0,0015 m³/s. Sungai Kalikawat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan rumah tangga sebanyak 222 KK dan 8 tempat fasilitas umum. Sungai Kalimati dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga sebanyak 12 KK dan 1 MCK kantor SPTN I Sarongan.



Gambar 40. Pengukuran penampang sungai menggunakan alat bantu waterpass di SPTN III Kalibaru, tanggal 3 – 7 Agustus 2015.

IKK 5 → Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit

Capaian penambahan jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/mikro hidro power plant selama tahun 2015 tercatat sebanyak 5 (lima) unit. Penambahan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) yang terbit pada tahun 2015 1 (satu) unit, yaitu PT. Bone Bolango Energi (TN. Bogani Nani Wartabone).
2. Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) yang terbit 4 (empat) unit, secara rinci sebagai berikut:
 - 1) TWA. Danau Matano, 1 unit (BKSDA Sulsel).
 - 2) TWA. Lejja, 1 unit (BKSDA Sulsel).
 - 3) TN. Gunung Halimun Salak, 2 unit.



Gambar 41. Kegiatan pemanfaatan energi air (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di TN Gunung Halimun Salak)



Gambar 42. Rapat Pembahasan Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Energi Air PT. Brantas Cakrawala Energi di Ruang Rapat Komodo, Ditjen. KSDAE

IKK 6 → Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi telah diundangkan, namun ketentuan/peraturan turunannya untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi (KPA) sampai saat ini belum ada, dan target izin usaha pemanfaatan

jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi selama tahun 2015 masih nihil. Saat ini telah disiapkan/disusun:

1. Draft final Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
2. Naskah Akademis dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE tentang Restorasi Ekosistem Dalam Rangka Pemulihan Ekosistem Pada Areal Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
3. Usulan Tarif Iuran dan Pungutan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui surat No.S.452/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA.



Gambar 43. Potensi panas bumi di yang berada di kawasan konservasi adalah Suoh, Kab. Lampung Barat Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

IKK 7 → Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK

Capaian jumlah registrasi atau Sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+, capaian sampai dengan Desember 2015 adalah 1 (satu) lokasi atau setara >100%, yaitu TN. Sebangau.

Project Design Document (PDD) CCBA untuk penyelenggaraan karbon telah divalidasi dengan kategori gold level, sebagaimana nota dinas Dirjen PHKA ke Menteri Kehutanan Nomor ND.134/IV-PJLKKHL/2015. tanggal 31 Maret 2015 Perihal Laporan Kunjungan ke TN Sebangau.



Gambar 44. Peningkatan kapasitas SDM dalam penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan karbon

Kegiatan 5 Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

Tabel 26. Capaian Indikator Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

No	Kegiatan / IKK	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2015	%
	Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial				51,71
1	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	KEE	13	10	76,92
2	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	Paket Data	3	3	100,00
3	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	Dokumen	3	1	33,33
4	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-	-	-	-
5	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	-	-	-
6	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	Spesies	60	60	100,00

Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah 51,71% dengan rincian sebagai berikut.

IKK 1 → Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)

Ekosistem esensial terdiri atas ekosistem esensial lahan basah dan teresterial. Ekosistem Esensial Lahan Basah adalah ekosistem lahan basah yang utamanya memiliki keunikan dan/atau fungsi penting dari habitat dan/atau jenis biota air atau berfungsi sebagai wilayah/jalur migrasi, atau memiliki populasi spesies burung air atau biota air penting lainnya yang tinggi. Ekosistem Esensial Terrestrial adalah suatu ekosistem daratan baik berupa hutan maupun non-hutan yang memiliki keunikan dan/atau jenis serta berperan sebagai koridor satwa liar dan habitat penting tumbuhan dan satwa liar atau memiliki populasi spesies darat penting lainnya yang tinggi.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pengelolaan ekosistem esensial serta melanjutkan inisiasi yang telah dilaksanakan tahun 2010-2014, maka pada tahun 2015 - 2019 akan ditetapkan kembali lokasi-lokasi kolaborasi pengelolaan ekosistem esensial. Adapun langkah-langkah dan tahapan kegiatan penetapan lokasi kolaborasi pengelolaan ekosistem esensial antara lain adalah Identifikasi, Inventarisasi dan Klasifikasi, Delineasi, Pengusulan, Konsultasi Publik, dan Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial. Selain itu, kawasan ekosistem esensial dapat dibentuk khusus untuk melindungi spesies tumbuhan tertentu atau yang disebut sebagai Taman Keanekaragaman Hayati serta melindungi jalur lalu lintas satwa atau disebut sebagai Koridor Kawasan Konservasi.

Adapun Taman Keanekaragaman Hayati merupakan suatu kawasan pencadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi konservasi in-situ dan/atau ex-situ, khususnya bagi tumbuhan yang penyerbukan dan/atau

pemencaran bijinya harus dibantu oleh satwa dengan struktur dan komposisi vegetasinya dapat mendukung kelestarian satwa penyerbuk dan pemencar biji.

Koridor Kawasan Konservasi (wildlife corridor) merupakan jejaring/jalur antar kawasan konservasi atau habitat keanekaragaman hayati, yang menghubungkan dua atau lebih kawasan konservasi. Koridor ini sangat penting bagi keberlanjutan proses – proses ekologi termasuk diantaranya mendukung pergerakan atau lalu lintas satwa liar serta dapat menentukan keberlanjutan populasi tersebut.

Ekosistem esensial penting dikelola karena keunikannya, kekayaan hayati didalamnya serta keterikatannya dengan ekosistem sekitar. Pengelolaan ekosistem esensial tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja, tetapi harus melibatkan stakeholder terkait, antara lain pemerintah daerah, lintas Kementerian, LSM, perguruan tinggi dan sektor swasta. Pengelolaan yang dilakukan secara terpadu terutama bertujuan untuk menyamakan pandangan dan persepsi terhadap pengelolaan ekosistem esensial, mensinkronisasikan program agar mendapatkan manfaat yang optimal dan lestari. Untuk itu, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial perlu memfasilitasi pembentukan kelembagaan kawasan ekosistem esensial sebagai upaya untuk mengelola dan menjaga keberlanjutan kawasan ekosistem esensial.

Pada kurun waktu 2015 – 2019 akan dilaksanakan fasilitasi pembentukan kawasan ekosistem esensial sejumlah 48 KEE, dengan rincian 6 KEE dengan karakteristik ekosistem karst, 6 KEE mangrove, 6 KEE koridor kawasan konservasi, 30 KEE taman kehati.

Sampai dengan akhir tahun 2015, kawasan ekosistem esensial yang terbentuk kelembagaannya sebanyak 10 kawasan ekosistem esensial (KEE), yaitu sebagai berikut:

- a) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Jawa Barat
- b) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Barat
- c) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Daerah Istimewa Yogyakarta
- d) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sumedang
- e) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Jombang
- f) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Kuningan
- g) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Lampung Barat
- h) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau
- i) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bangka Belitung
- j) KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kota Banjar Baru

Sedangkan, 3 KEE yang sedang diproses penetapan kelembagaannya dan terkendala penyelesaiannya karena kendala pelaksanaan Pilkada serentak (menghambat penyelesaian surat-surat di tingkat Pemda) maupun kendala-kendala lainnya adalah:

- a) KEE Karst Sangkulirang Mangkalihat, Kaltim
- b) KEE Teluk Pangpang, Jatim
- c) KEE Jaring Halus, Sumut

Kegiatan – kegiatan pendukung dalam rangka pencapaian IKK antara lain :

- 1) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan koordinasi taman keanekaragaman hayati di 10 lokasi guna kordinasi dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 2) Pelaksanaan Lokakarya Taman Keanekaragaman Hayati dengan hasil adanya deklarasi dari Badan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan Taman Keanekaragaman Hayati.
- 3) Tersedianya dana alokasi khusus pelaksanaan taman keanekaragaman hayati di Kabupaten/Kota di daerah.

- 4) Dukungan pihak swasta untuk mendukung taman keanekaragaman hayati terkait pelaksanaan PROPER.
- 5) Identifikasi dan inventarisasi lokasi potensial sebagai target kegiatan KEE koridor/HCV (High Conservation Value) melalui rapat koordinasi dan sinkronisasi dilaksanakan di Jakarta dengan melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait, Eselon I dan II lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perwakilan perusahaan pemegang konsesi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Pertambangan, Perkebunan Sawit, Perguruan Tinggi, Konsultan pelaksana penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi dan LSM/NGO yang bergerak di bidang konservasi. Adapun keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah data tentang koridor dan areal bernilai konservasi tinggi/ HCV yang tersebar di areal konsesi IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Pertambangan, Perkebunan Sawit maupun APL lainnya.
- 6) Identifikasi dan inventarisasi lokasi potensial sebagai target kegiatan KEE koridor/HCV juga dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) hal ini dilaksanakan bagi calon lokasi KEE koridor/HCV yang telah diinisiasi oleh LSM/NGO dalam hal identifikasi dan inventarisasinya. Kegiatan ini dilaksanakan di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (Koridor/ HCV habitat Komodo dan Kakatua Jambul Kuning) dan Samarinda, Kalimantan Timur (Koridor/ HCV Orangutan dan Badak sumatera). FGD ini dihadiri oleh Pemerintah Daerah setempat, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, Perguruan Tinggi, Perwakilan perusahaan pemegang izin IUPHHK-HA/HT, perkebunan sawit, Masyarakat adat, LSM/NGO yang bergerak di bidang konservasi. Adapun keluaran yang diperoleh dari kegiatan ini adalah data tentang Koridor/ HCV Orangutan dan Badak Sumatera serta adanya dukungan Pemda, dunia usaha, LSM/NGO, masyarakat guna pelestarian habitat satwa tersebut di atas melalui pembentukan KEE habitat satwa tersebut dalam bentuk KEE koridor/ HCV.
- 7) Fasilitasi Penetapan Koridor Kehidupan Liar dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi
Untuk mencapai IKK Direktorat BPEE tahun 2015-2019, Dit BPEE telah memfasilitasi pemerintah daerah berupa pertemuan teknis dan koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait di Medan dan Kabupaten Kapuas Hulu (Kalimantan Barat). Rencana penetapan Koridor Kehidupan Liar di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu koridor yang menghubungkan Taman Nasional Betung Kerihun (TN BK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TN DS). Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menyusun Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Koridor TN.BK-TN.DS. Direktorat BPEE mengusulkan penambahan klausul tentang "Ekosistem Esensial" pada draft tersebut.
- 8) Penyusunan Norma Standar dan Prosedur (NSPK) Koridor Hidupan Liar
Berdasarkan PP 28 tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), penetapan koridor hidupan liar dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan hidupan liar (satwa) serta memudahkan satwa bergerak dari satwa areal ke areal lainnya. Untuk membangun dan mengelola koridor kehidupan liar (satwa) diperlukan Norma Standar dan Prosedur (NSPK) yang dituangkan dalam Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Koridor Kehidupan Liar. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi stakeholders terkait untuk membangun dan mengelola koridor kehidupan liar. Untuk menyusun Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Koridor Kehidupan Liar telah dilaksanakan pertemuan teknis dan pertemuan koordinasi dengan pakar dan berbagai satakeholders terkait.

Ruang lingkup NSPK meliputi : pendahuluan (latar belakang, definisi koridor, fungsi koridor, jenis/tipe koridor, daerah penyanggah, kriteria penetapan koridor dan dasar hukum), penetapan dan pengelolaan, desain pembangunan koridor hidupan liar, unit pengelola, rencana aksi, pangkalan data, monitor dan evaluasi.

9) Penyusunan Norma Standar dan Prosedur (NSPK) Perlindungan KEE

Berdasarkan PP 28 tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), perlindungan KEE telah diamanatkan untuk dilaksanakan. Untuk memberikan landasan hukum upaya perlindungan KEE, maka disusun suatu konsep NSPK berupa draft Permen LHK tentang Perlindungan KEE. Draft NSPK ini dimaksudkan memberikan batasan-batasan hukum, kriteria KEE, langkah-langkah pembentukan kelembagaan pengelola dan penetapan KEE, pengembangan pemanfaatan KEE dan pelaksanaan movev pengelolaan KEE. Draft final telah diselesaikan pada tahun 2015 dan dalam proses pengajuan ke Menteri LHK melalui Setditjen KSDAE.

10) Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Perlindungan KEE

Kegiatan ini dilaksanakan di Bali dan dimaksudkan untuk menghimpun para pengelola KEE untuk menyatukan pandangan mengenai penyusunan Rencana Aksi Perlindungan KEE dan tata cara penyelesaiannya. Hal ini penting sebagai arahan untuk penyelesaian Rencana Aksi yang akan menjadi acuan bagi pengelola KEE untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan KEE serta penganggarannya serta kerangka waktu dan mitra kerja samanya. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat diperoleh kesatuan konsep penyusunan Rencana Aksi serta arahan penyelesaiannya. Diharapkan kendala-kendala internal yang mungkin terjadi di tingkat Pemda dapat direduksi setelah terlaksananya kegiatan ini.



Gambar 45. Kegiatan Praktek Lapangan di Taman Keanekaragaman Hayati Kiara Payung Prov. Jawa Barat dan Peninjauan lokasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi pada Wilayah Kerja Mitra Swasta

IKK 2 → Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data

Ketersediaan data dan informasi mengenai KEE sangat penting sebagai salah satu penunjang kegiatan pengelolaannya, salah satunya sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menjawab permasalahan pengelolaan yang ada. Untuk itu diperlukan adanya tool yang digunakan membangun dan mengumpulkan data KEE sehingga dapat disajikan

menjadi informasi yang dapat dimengerti oleh penerima dan digunakan dalam pengelolaan KEE.

Sampai dengan akhir tahun 2015 telah terbangun paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial di KEE Mangrove Teluk Pangpang, Prov. Jawa Timur; KEE Mangrove Jaring Halus, Sumatera Utara; dan KEE Taman Keanekaragaman Hayati Kab. Sumedang. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja tersebut antara lain :

1) Lokakarya Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi Ekosistem Esensial

Kegiatan Lokakarya Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi Ekosistem Esensial di dilaksanakan pada Bulan Oktober 2015 di Hotel Sahid Jaya Solo – Jawa Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pengelola kawasan ekosistem esensial yang berasal dari UPT Lingkup Ditjen KSDAE, Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah, BLHD, Dinas terkait), kalangan akademisi/pakar, dan LSM.

IKK 3 → Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen

Sampai dengan akhir tahun 2015 telah tersusun dokumen rencana aksi dari kawasan ekosistem esensial Teluk Pangpang, Provinsi Jawa Timur. Adapun kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja tersebut antara lain adalah :

1) Lokakarya Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial

Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2015, bertempat di Sanur Paradise Plaza Hotel, Sanur – Bali. Peserta kegiatan ini berjumlah 70 orang yang berasal antara lain dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat (Biro KLN, Direktorat PIKA), UPT Balai dan Balai Besar KSDA (Lampung, Kaltim, NTT, Bali, Jatim, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Barat), UPT Balai Taman Nasional (Alas Purwo, Bantimurung-Bulusaraung, Danau Sentarum, Bali Barat), Balai Pengelolaan Hutan Mangrove, Dinas Kehutanan (Manggarai Barat, Prov. Bali, Banyuwangi, Langkat, Prov. Aceh, Jawa Timur), Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Pusat Pengelolaan dan Pembangunan Ekoregion (P3E) LHK Bali Nusa Tenggara, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Koordinator Kemaritiman, Yayasan Burung Indonesia, dan para pihak yang mengelola ekosistem esensial lainnya.



Gambar 46. Direktur Jenderal KSDAE Membuka Secara Resmi Lokakarya Strategi dan Rencana Aksi Pengelolaan KEE

Maksud diadakannya kegiatan Lokakarya Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi Ekosistem Esensial adalah menjangkau masukan dari multi stakeholders dan menemukan tool yang tepat terkait pengelolaan data KEE, menyusun konsep basis data dan sistem informasi KEE, dan membangun basis data sehingga dapat tersajikan informasi yang dapat dimengerti. Tujuan dilakukannya kegiatan “ Lokakarya Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi Ekosistem Esensial ” adalah membentuk konsep basis data dan sistem informasi Eosistem Esensial yang tepat sebagai salah satu alat pengelolaan KEE, memberikan keseragaman dalam penyajian data dan informasi KEE, membangun jaringan data dan informasi KEE serta terintegrasinya data dan informasi KEE ke dalam data dan informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

IKK 4 → Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan

Kawasan karst adalah salah satu tipe kawasan yang sangat khas. Letak kekhasan itu bukan terletak pada kesan masyarakat umum bahwa kawasan kars merupakan daerah dengan lahan kritis, tandus, kering dan masyarakat pada umumnya yang miskin. Tapi pada kekhasan yang merujuk pada keunikan ekosistem di mana kawasan karst mengandung sumberdaya alam hayati dan non hayati yang potensial untuk mendukung kehidupan manusia. Apalagi potensi itu didukung oleh luas kawasan karst di seluruh wilayah kepulauan Indonesia yang mencapai hampir 20 % dari total luas wilayah.

Ekosistem karst sangat penting dikelola karena keunikannya, kekayaan hayati di dalamnya serta keterikatannya dengan ekosistem sekitar. Pengelolaan ekosistem karst tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor saja, tetapi harus melibatkan stakeholder terkait, antara lain pemerintah daerah, lintas Kementerian, LSM, perguruan tinggi dan sektor swasta. Pengelolaan yang dilakukan secara terpadu terutama bertujuan untuk menyamakan pandangan dan persepsi terhadap pengelolaan ekosistem esensial, mensinkronisasikan program agar mendapatkan manfaat yang optimal dan lestari.

Untuk program pengelolaan ekosistem karst (IKK 4) belum ditargetkan capaiannya di tahun 2015. Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyiapan dukungan untuk pengelolaan ekosistem karst, kegiatan tersebut antara lain adalah :

1) Lokakarya dan Talk Show Nasional Pengelolaan Ekosistem Karst

Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Desember 2015 di Hotel Bidakara – Jakarta, dan dibuka oleh Dr. Arif Yuwono – Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan keynote speech oleh Prof. Emil Salim.

Tujuan dilaksanakan kegiatan Lokakarya Nasional Pengelolaan Ekosistem Karst ini adalah menyatukan visi dan misi penyelamatan ekosistem karst di dalam kawasan konservasi dan di luar kawasan konservasi (ekosistem esensial), menyebarkan informasi terkait pengelolaan karst berkelanjutan, komitmen dalam pengelolaan ekosistem karst berkelanjutan, serta menghimpun masukan untuk penyempurnaan pengelolaan ekosistem karst.

Peserta kegiatan ini merupakan stakeholder pengelolaan karst yang terdiri atas Kementerian (Kemen LHK, Kemen ESDM, Kemenko Perekonomian, dst), Pemerintah Daerah, kalangan akademisi/pakar karst, aktivis lingkungan, aktivis budaya, LSM lokal dan internasional, serta kalangan swasta. Kegiatan ini dibagi ke dalam beberapa sub tema antara lain: tata kelola karst, jasa lingkungan karst, sosial budaya karst, pengelolaan karst, potensi pariwisata karst, dan pengelolaan resiko di kawasan karst.



Gambar 47. Prof. Emil Salim memberikan keynote speech dalam Lokakarya Nasional Pengelolaan Ekosistem Karst

IKK 5 → Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion

Ekosistem mangrove sebagai salah satu ekosistem pesisir memiliki peran ekonomis dan ekologis penting sebagai penyangga kehidupan. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain sebagai pelindung garis pantai (sebagai barrier pertama terhadap gelombang laut), mencegah intrusi air laut, dan habitat tempat mencari makan (feeding ground), tempat asuhan dan pembesaran (nursery ground), tempat pemijahan (spawning ground) bagi aneka biota perairan. Fungsi ekonomi mangrove antara lain sebagai penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Selain fungsi ekonomis dan ekologis tersebut diatas, ekosistem mangrove juga memiliki potensi fungsi pariwisata, religi, dan tradisi.

Menyadari pentingnya peran dan fungsi ekosistem mangrove sebagai penyangga kehidupan, maka pengelolaan ekosistem tersebut perlu dilakukan secara taat azas terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam suatu konsep pengelolaan dan dukungan kerjasama pengelolaan ekosistem mangrove yang terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove secara lestari memerlukan tersedianya suatu panduan atau pengelolaan bagi para pengelola dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan setiap tahapan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove sehingga dapat mencapai tujuan pengelolaan yang diharapkan.

Untuk IKK ini belum ditargetkan capaiannya di tahun 2015. Kegiatan yang dilaksanakan berupa penyediaan dukungan NSPK untuk pengelolaan ekosistem mangrove.

IKK 6 → Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies

Taman Keanekaragaman Hayati menjadi penting karena pembangunannya mengacu kepada siklus kehidupan yang ada di dalam sebuah ekosistem. Dalam sebuah ekosistem hubungan timbal balik antar spesies baik flora, fauna/satwa dan jasad renik serta habitatnya memegang kunci bagi kelangsungan bagi seluruh hidupan di dalamnya. Jika salah satu spesies yang menyusun hubungan ini terputus (hilang, punah) oleh suatu sebab seperti bencana alam, perubahan fungsi lahan, perubahan iklim dan lain-lain, maka kelangsungan hidup spesies tersebut akan terganggu. Gangguan terhadap satu spesies saja dapat berantai akibatnya terhadap spesies lain yang pada akhirnya seluruh jenis yang ada akan terganggu kelangsungan hidupnya. Kondisi ini jika tidak dapat dikendalikan akan menghancurkan seluruh ekosistem. Taman Keanekaragaman Hayati akan merajut rantai

hubungan timbal balik dimaksud untuk melakukan pelestarian jenis-jenis dan sumber daya genetik lokal yang langka melalui pencadangan sumber daya alam.

Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Taman Keanekaragaman Hayati yaitu Jumlah koleksi spesies endemik lokal langka dan terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit Taman Kehati dilakukan metode partisipatif dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, pakar, LSM dan kalangan akademisi.

Sampai dengan akhir tahun 2015 telah terkoleksi sebanyak 60 spesies lokal/ endemik/ langka/terancam punah pada 10 Taman Keanekaragaman hayati.



Gambar 48. Taman Keanekaragaman Hayati Kiara Puyung, Provinsi Jawa Barat

Kegiatan 6
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal KSDAE

Tabel 27. Capaian Indikator Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

No	Kegiatan / IKK	Satuan	Target	Realisasi Tahun 2015	%
	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE				108,78
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	Poin	77	83,76	108,78

Rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah 108,78% dengan rincian sebagai berikut.

IKK 1 → Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen instansi pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya

Pengertian evaluasi implementasi SAKIP seperti yang tertuang di dalam Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk: 1) memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP; 2) menilai tingkat implementasi SAKIP; 3) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; 4) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup: 1) penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; 2) penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; 3) evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan 4) evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2014 lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) mempunyai tujuan; a) memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP; b) menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; c) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instasni; d) memonitor tindak lanjut hasil evaluasi pada periode sebelumnya.

Evaluasi tersebut dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah tahun 2014 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Evaluasi implementasi SAKIP Setditjen PHKA (KSDAE) yang dilakukan oleh Tim Itjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan sesuai dengan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam peraturan tersebut,

terdapat alokasi nilai setiap komponen dan sub komponen sebagaimana dalam Tabel 28 berikut.

Tabel 28. Alokasi Nilai Setiap Komponen dan SubKomponen SAKIP

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	20%	a Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%) dan Kualitas Renstra (8%) dan implementasi Renstra (3%) b Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a Pemenuhan pengukuran (5%) b Kualitas pengukuran (12,5%) c Implementasi pengukuran (4,5%)
3	Pelaporan Kinerja	50%	a Pemenuhan pelaporan (3%) b Kualitas pelaporan (7,5%) c Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a Pemenuhan Evaluasi (2%) b Kualitas evaluasi (5%) c Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b Kinerja yang dilaporkan (output) (10%) c Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)
	Total	100%	

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015

Penyimpulan atas hasil revidi terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen, sedangkan nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagaimana Tabel 29 berikut.

Tabel 29. Kategori Nilai Hasil Akhir Penilaian SAKIP

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 - 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber: Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015

Hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Ditjen PHKA dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari nol sampai dengan 100. Eselon I Direktorat Jenderal PHKA memperoleh nilai sebesar 83,76 dengan kategori A (>80-90). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkup Ditjen PHKA, dengan beberapa rincian sebagai berikut:

Hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Ditjen PHKA dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari nol sampai dengan 100. Eselon I Direktorat Jenderal PHKA memperoleh nilai sebesar 83,76 dengan kategori A (>80-90). Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkup Ditjen PHKA, dengan beberapa rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja (30%), dengan nilai capaian 86,87% dan skor 26,06 yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan Strategis (10%) dengan nilai capaian 85,49% dan skor 8,56 yaitu:
 - 1) Pemenuhan Renstra (2%) capaian 95% dan skor 1,90. Pada poin ini terdapat kelemahan-kelemahan yaitu:
 - (a) Indikator kinerja sasaran dalam dokumen Renstra belum disajikan, yang tertuang dalam Renstra hanya indikator kinerja kegiatan;
 - (b) Renstra belum memuat target jangka menengah;
 - (c) Penulisan besaran target pada laporan Rencana Strategis belum konsisten.
 - 2) Kualitas Renstra (5%) capaian 88,00% dengan skor 4,38. Poin ini memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:
 - (a) Tujuan dan sasaran belum seluruhnya berorientasi pada hasil atau masih berorientasi proses, misalnya sasaran yang berupa tersusunnya target PNPB bidang PHKA.
 - (b) Indikator tujuan (outcome) dan sasaran (output) belum seluruhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, misalnya pada sasaran terlaksananya pengelolaan anggaran indikatornya dispilin, sehingga indikator tersebut belum dapat dikatakan measurable.
 - (c) Target kinerja belum seluruhnya ditetapkan dengan baik yaitu tidak berdasarkan basis data yang up to date.
 - 3) Implementasi Renstra (3%) dengan nilai capaian 76,00% dan skor 2,27. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
 - (a) Terdapat satu indikator kinerja kegiatan yang belum ada di dalam Renstra yaitu indikator kinerja kegiatan meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan konservasi tertentu menjadi minimal Rp. 800.000,- per bulan per kepala keluarga.
 - (b) Terdapat perbedaan jumlah indikator kinerja kegiatan restorasi ekosistem kawasan konservasi pada empat lokasi di dalam Renstra dengan dokumen IKK sebanyak lima lokasi.
 - b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%) dengan nilai capaian 88,00% dan skor 17,51 yaitu:
 - 1) Pemenuhan perencanaan kinerja tahunan (4%) dengan nilai capaian 95,00% dan skor 3,81. Kelemahan pada poin ini adalah dokumen PK belum menyajikan IKU, karena mayoritas indikator di PK bukan IKU;
 - 2) Kualitas perencanaan kinerja tahunan (10%) dengan nilai capaian 85,00% dan skor 8,51;

- 3) Implementasi perencanaan kinerja tahunan (6%) dengan nilai capaian 87,00% dan skor 5,20. Poin ini mempunyai kelemahan yaitu:
 - (a) Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala;
 - (b) Rencana aksi atas kinerja belum memuat target secara periodik.
2. Pengukuran Kinerja (25%) dengan nilai capaian 81,00% dan skor 20,32 yang terdiri dari:
 - a. Pemenuhan Pengukuran Kinerja (5%) dengan nilai capaian 94,00% dan skor 4,69. Kelemahan pada poin ini adalah mekanisme pengumpulan data kinerja pada sebagian unit kerja belum disusun dalam SOP, melainkan dilakukan oleh tim ad hoc.
 - b. Kualitas Pengukuran Kinerja (12,5%) dengan nilai capaian 80,00% dan skor 10,03. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
 - 1) Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan;
 - 2) Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Program (IKP) belum menggambarkan hasil atau masih menggambarkan proses;
 - 3) Data yang dikumpulkan belum berdasarkan suatu mekanisme yang terstruktur.
 - c. Implementasi Pengukuran Kinerja (7,5%) dengan nilai capaian 75,00% dengan skor 5,61. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
 - 1) IKU/IKP belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
 - 2) IKU/IKP telah direviu secara berkala, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan;
 - 3) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
3. Pelaporan Kinerja (15%) dengan nilai capaian 90,02% dan skor 13,50. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%) dengan nilai capaian 99,00% dan skor 2,96;
 - b. Penyajian informasi kinerja (8%) dengan nilai capaian 94,00% dan skor 7,52. Kelemahan-kelemahannya adalah:
 - 1) Terdapat Indikator Kinerja yang belum menguraikan hasil evaluasi dan analisis;
 - 2) Penyajian informasi keuangan belum terkait dengan pencapaian kinerja.
 - c. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4%) dengan nilai capaian 76,00% dan skor 3,02. Poin ini mempunyai kelemahan-kelemahan yaitu:
 - 1) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan sebagai perbaikan perencanaan;
 - 2) Informasi kinerja belum seluruhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - 3) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan antara lain dalam penyusunan rencana kerja tahunan maupun dalam penetapan kinerja yang disusun.
4. Evaluasi Kinerja (10%) dengan nilai capaian 79,17% dan skor 7,92, terdiri atas:
 - a. Pemenuhan Evaluasi (2%) dengan nilai capaian 99,00% dan skor 1,98;
 - b. Kualitas Evaluasi (5%) dengan nilai capaian 75,00% dan skor 3,75. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
 - 1) Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan;
 - 2) Evaluasi kinerja belum dilaksanakan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan ketentuan sehingga belum ada rekomendasi untuk perbaikan capaian kinerja.

- c. Pemanfaatan Evaluasi (3%) dengan nilai capaian 73,00% dan skor 2,19. Kelemahan-kelemahannya adalah:
 - 1) Hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum ditindaklanjuti untuk perbaikan capaian kinerja;
 - 2) Terdapat hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Jenderal yang belum ditindaklanjuti oleh unit kerja;
 - 3) Terdapat hasil pemantauan dan evaluasi capaian kinerja yang belum diperbaiki oleh unit kerja.
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) dengan nilai capaian 79,79% dan skor 15,96 yaitu:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) dengan nilai capaian 82,00% dan skor 4,10. Kelemahan-kelemahan pada poin ini adalah:
 - 1) Target IKU/IKP tidak seluruhnya tercapai;
 - 2) Capaian kinerja menurun dari tahun sebelumnya.
 - b. Kinerja yang Dilaporkan (outcome) (10%) dengan nilai capaian 99,00% dan skor 7,90;
 - c. Kinerja Lainnya (5%) dengan nilai capaian 79,00% dan skor 3,96.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, Inspektorat Jenderal memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Terhadap komponen perencanaan kinerja agar Renstra tahun 2015-2019 direviu secara berkala untuk melihat progres pencapaian target atas rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Terhadap komponen pengukuran kinerja agar pengukuran kinerja dilakukan berjenjang mulai dari staf, manajerial hingga pimpinan tertinggi dengan menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara tepat dan cepat.
- c. Terhadap komponen pelaporan kinerja agar informasi yang disajikan dalam LKj dipergunakan dalam perbaikan perencanaan dan informasi kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- d. Terhadap komponen evaluasi kinerja agar hasil dari pemantauan dan evaluasi capaian kinerja dibuat dan disampaikan kepada pimpinan sehingga hambatan dalam capaian kinerja dapat diperbaiki.
- e. Terhadap komponen pencapaian sasaran/kinerja organisasi agar melakukan evaluasi mengenai capaian kinerja yang menurun untuk diketahui hambatan dan penyelesaiannya secara lebih cermat dalam menetapkan IKU.

Terhadap hasil penilaian evaluasi dan rekomendasi yang telah diberikan oleh Tim Audit Inspektorat Jenderal, Ditjen KSDAE telah melakukan perbaikan yaitu :

- a. Telah disusun Renstra Ditjen KSDAE tahun 2015-2019 dengan menggunakan indikator kinerja yang berjenjang, terukur dengan baseline yang jelas, dan lebih berorientasi hasil;
- b. Telah dilakukan reviu terhadap dokumen LKj seluruh UPT lingkup Ditjen KSDAE serta melakukan pemeringkatan atas dokumen LKj tersebut;
- c. Telah dilakukan review IKK melalui rapat-rapat triwulanan guna mendorong peningkatan pencapaian kinerja.

Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE tahun 2015 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam Tabel 30 berikut ini.

Tabel 30. Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE Tahun 2012-2015

Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi			
	2012	2013	2014	2015
Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE	72,33	72,65	76,79	83,76

Nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE terus mengalami peningkatan dari tahun 2012-2015. Tercatat berturut-turut dari 2012 adalah 72,33 poin dan meningkat menjadi 72,65 poin di tahun 2013 atau terjadi peningkatan 0,44% dari tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 76,79 poin sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 83,76 poin atau meningkat sebesar 9,08% dari tahun 2014. Secara keseluruhan, tren nilai SAKIP Ditjen PHKA dan KSDAE meningkat dari tahun 2012-2015 dengan peningkatan paling signifikan pada tahun 2015. Peningkatan dimaksud dapat dilihat dari segi perencanaan kinerja baik perencanaan jangka menengah yang dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja). Perencanaan yang baik menurut kriteria dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) adalah perencanaan yang memiliki Indikator Kinerja Program/IKP (untuk level eselon I) dan Indikator Kinerja Kegiatan/IKK (untuk level eselon II) yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain, indikator-indikator tersebut memiliki sasaran/target yang jelas dan dapat diukur secara obyektif.

B. CAPAIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2015

1. Pagu Anggaran Tahun 2015

Untuk mendukung kegiatan Ditjen KSDAE tahun 2015, dialokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 029 sebesar Rp 1.590.879.426.000,-. Gambaran selengkapnya perkembangan anggaran tahun 2010-2015 sebagaimana dalam gambar berikut.



Gambar 49. Perkembangan Anggaran Ditjen KSDAE Tahun 2010 – 2015.

a) Berdasarkan Satker

Kegiatan Ditjen KSDAE tersebut dilaksanakan oleh seluruh Satker lingkup Ditjen KSDAE baik di pusat maupun di daerah. Alokasi anggaran Ditjen KSDAE berdasarkan Satker Pusat dan UPT di daerah selengkapnya disajikan dalam tabel 31 berikut.

Tabel 31. Anggaran Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Satker Tahun 2015

NO.	SATKER	ANGGARAN (Rp.)	%
A. Satker Pusat			
DIPA LAMA			
1	Setditjen PHKA	5.854.179.000	1,21
2	Direktorat PPH	2.516.224.000	
3	Direktorat PKH	2.156.510.000	
4	Direktorat KKBHL	3.145.232.000	
5	Direktorat KKH	2.644.280.000	
6	Direktorat PJLKKHL	2.910.128.000	
	Jumlah DIPA Lama	19.226.553.000	
DIPA BARU			
7	Setditjen KSDAE	34.847.732.000	8,84
8	Direktorat KK	27.200.000.000	
9	Direktorat PIKA	15.741.377.000	
10	Direktorat KKH	26.987.118.000	
11	Direktorat PJLHK	17.439.729.000	
12	Direktorat BPEE	18.341.243.000	
	Jumlah DIPA Baru	140.557.199.000	
Jumlah A		159.783.752.000	10,04
B. Satker Daerah			
1	Balai/Balai Besar KSDA	647.819.727.000	40,72
2	Balai/Balai Besar TN	783.275.947.000	49,24
Jumlah B		1.431.095.674.000	89,96
JUMLAH A + B		1.590.879.426.000	100

b) Berdasarkan Jenis Belanja

Dilihat dari jenis belanja, anggaran Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015 terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Komposisi pagu anggaran per jenis belanja disajikan dalam tabel 32 berikut.

Tabel 32. Pagu Anggaran Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai	764.520.745.000
2	Belanja Barang	633.943.725.000
3	Belanja Modal	192.414. 956.000
	Total	1.590.879.426.000

2. Realisasi Anggaran Tahun 2015

a) Berdasarkan Satker

Sampai dengan 31 Desember 2015, realisasi penyerapan anggaran lingkup Direktorat Jenderal KSDAE mencapai Rp. 1.438.933.254.093,- atau 90,82%. Rincian pagu dan Realisasi anggaran Direktorat KSDAE Tahun 2015 berdasarkan satker selengkapny disajikan dalam Tabel 33 berikut ini:

Tabel 33. Realisasi Direktorat Jenderal KSDAE Berdasarkan Satker Tahun 2015

No	Satker	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A. Satker Pusat				
DIPA LAMA				
1	Setditjen PHKA	5.854.179.000	5.715.833.559	97,64
2	Direktorat PPH	2.516.224.000	2.383.943.290	94,74
3	Direktorat PKH	2.156.510.000	2.066.018.874	95,80
4	Direktorat KKBHL	3.145.232.000	3.049.392.553	96,95
5	Direktorat KKH	2.644.280.000	2.540.146.219	96,06
6	Direktorat PJLKKHL	2.910.128.000	2.882.975.699	99,07
	Jumlah DIPA Lama	19.226.553.000	18.638.310.194	96,94
DIPA BARU				
7	Setditjen KSDAE	34.847.732.000	31.145.535.089	89,38
8	Direktorat KK	27.200.000.000	6.939.471.483	25,51
9	Direktorat PIKA	15.741.377.000	13.087.390.289	83,14
10	Direktorat KKH	26.987.118.000	21.986.837.391	81,47
11	Direktorat PJLHK	17.439.729.000	15.454.850.018	88,62
12	Direktorat BPEE	18.341.243.000	12.919.108.763	70,44
	Jumlah DIPA Baru	140.557.199.000	101.533.193.033	72,24
	Jumlah A	159.783.752.000	120.171.503.227	75,21
B. Satker Daerah				
1	Balai/Balai Besar KSDA	647.819.727.000	589.429.895.536	90,99
2	Balai/Balai Besar TN	783.275.947.000	729.331.855.330	93,11
	Jumlah B	1.431.095.674.000	1.318.761.750.866	92,15
	JUMLAH A + B	1.590.879.426.000	1.438.933.254.093	90,45

Sumber: Setditjen KSDAE, 2015

b) Berdasarkan Jenis Belanja

Berdasarkan realisasi perjenis belanja dapat diketahui bahwa realisasi terbesar pada belanja pegawai sebesar Rp. 723.720.778.339,- (94,66%), sedangkan yang terendah yaitu belanja barang yaitu sebesar Rp. 534.156.969.689,- (84,26%). Rendahnya belanja barang salah satunya disebabkan karena pencairan sumber dana PNPB yang waktunya tidak pasti sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan. Realisasi perjenis belanja selengkapnya disajikan dalam tabel 34 dibawah ini.

Tabel 34. Realisasi Anggaran Ditjen KSDAE Per Jenis Belanja

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	764.520.745.000	723.731.783.339	94,66
2	Belanja Barang	633.943.725.000	534.156.969.689	84,26
3	Belanja Modal	192.414.956.000	181.044.501.065	94,09
	JUMLAH	1.590.879.426.000	1.438.933.254.093	90,45

Sumber: Setditjen KSDAE, 2015

C. CAPAIAN RENSTRA 2015-2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015

Rata-rata capaian Renstra 2015-2019 Ditjen KSDAE sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagaimana dalam tabel 35 berikut.

Tabel 35. Capaian Renstra 2015-2019 sampai dengan Tahun 2015 Ditjen KSDAE

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% s/d 2015
1.	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	35,51
2.	Pengelolaan Kawasan Konservasi	42,06
3.	Konservasi Spesies dan Genetik	34,24
4.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	16,02
5.	Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial	8,19
6.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE	107,38
Total Rata-rata capaian Tahun 2015		40,56

Adapun rincian capaian per kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam

Capaian sampai dengan tahun pertama Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 pada kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam yang sebagaimana dalam tabel 36 berikut ini. Dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 35,51%.

Tabel 36. Perbandingan Target 5 Tahun dan capaian Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi tahun 2015.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2015-2019	Realisasi s/d 2015	% s/d 2015
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	150	35	23,33
2.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521	116	22,26
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521	521	100,00
4.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	100	12	12,00
5.	Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	100	20	20,00
Total Rata-rata capaian Tahun 2015				35,51

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Capaian sampai dengan tahun pertama Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 pada kegiatan Kawasan Konservasi yang sebagaimana dalam tabel 37 berikut ini. Dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 42,06%.

Tabel 37. Perbandingan Target 5 Tahun dan capaian Kegiatan Kawasan Konservasi tahun 2015.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2015-2019	Realisasi s/d 2015	% s/d 2015
1.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	260	11	4,23
2.	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	150	32	21,33
3.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	100.000	5474	5,47
4.	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77	77	100,00
5.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	100	12	12,00
6.	Luas kawasan hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	100.000	51405,85	51,41
7.	Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34	34	100,00
Total Rata-rata capaian Tahun 2015				42,06

3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Capaian sampai dengan tahun pertama Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 pada kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik yang sebagaimana dalam tabel 38 berikut ini. Dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 34,24%.

Tabel 38. Perbandingan Target 5 Tahun dan capaian Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik tahun 2015.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2015-2019	Realisasi s/d 2015	% s/d 2015
1.	Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data 2013	10	6,54	65,40
2.	Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	10	4	40,00
3.	Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	50	11	22,00
4.	Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Trilyun	25	5.31	21,24
5.	Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	50	14,76	29,52
6.	Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7	1	14,29
7.	Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan	10	1	10,00

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2015-2019	Realisasi s/d 2015	% s/d 2015
	sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC			
8.	Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	20	4	20,00
9.	Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1	1	100,00
10.	Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	50	10	20,00
Total Rata-rata capaian Tahun 2015				34,24

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi

Capaian sampai dengan tahun pertama Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 pada kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi yang sebagaimana dalam tabel 39 berikut ini. Dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 16,02%.

Tabel 39. Perbandingan Target 5 Tahun dan capaian Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2015.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2015-2019	Realisasi s/d 2015	% s/d 2015
1.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	1.500.000	210.136	14,01
2.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	20.000.000	4.038.070	20,19
3.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	100	28	28,00
4.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	25	10	40,00
5.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	50	5	10,00
6.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	5	-	-
7.	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	2	-	-
Total Rata-rata capaian Tahun 2015				16,02

5. Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial

Capaian sampai dengan tahun pertama Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 pada kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial yang sebagaimana dalam tabel 40 berikut ini. Dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 8,19%.

Tabel 40. Perbandingan Target 5 Tahun dan capaian Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial tahun 2015.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2015-2019	Realisasi s/d 2015	% s/d 2015
1.	Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	48	10	20,83
2.	Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	48	3	6,25
3.	Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	48	1	2,08
4.	Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	6	-	-
5.	Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	6	-	-
6.	Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	300	60	20,00
Total Rata-rata capaian Tahun 2015				8,19

6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE

Capaian sampai dengan tahun pertama Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019 pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE yang sebagaimana dalam tabel 41 berikut ini. Dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 107,38 %.

Tabel 41. Perbandingan Target 5 Tahun dan capaian Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2015.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2015-2019	Realisasi s/d 2015	% s/d 2015
1.	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	78	83,76	107,38

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Direktorat Jenderal KSDAE mempunyai tugas, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal KSDAE berlandaskan pada sasaran, program, dan tujuan yang terdapat dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Ditjen KSDAE 2015-2019, Renja Ditjen KSDAE tahun 2015, serta dokumen PK 2015.
2. Penyerapan anggaran Direktorat Jenderal KSDAE sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.437.065.433.470,- atau 90,33%.
3. Penyerapan anggaran per jenis belanja yaitu belanja pegawai adalah 94,66% belanja barang 83,96%, belanja modal 94,09%.
4. Rata-rata capaian kinerja tahun 2015 adalah 97,90 ,%.

B. SARAN

1. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) baik pusat dan daerah melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan dan Meningkatkan pemberdayaan profesionalisme pegawai, melalui pendidikan formal juga dengan pelatihan internal (in house dan on the job training).
2. Peningkatan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera secara ekonomis, dan ekologis.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan stakeholders dalam pembangunan KSDAE secara keseluruhan.
4. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati termasuk dengan pemerintah daerah untuk melindungi habitat penting di dalam kawasan konservasi dan di luar kawasan konservasi.
5. Membuat rencana implementasi kegiatan berdasarkan skala prioritasnya sehingga sasaran-sasaran yang bersifat strategis dapat tercapai.
6. Pemutakhiran dan menyempurnakan data base dan perangkat lunak pelaksanaan kegiatan, serta pengadaan sarana penunjang yang memadai.

LAMPIRAN 1.

MATRIKS TARGET KINERJA
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2015-2019

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/IKP/IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
029.05.08	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem					
	Sasaran Program 1: Peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati					
	1. Nilai indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi minimal 70% (kategori baik) pada minimal 260 unit dari 521 unit KK di seluruh Indonesia (27,21 juta hektar)	50 KK	100 KK	150 KK	200 KK	260 KK
	2. Jumlah KPHK non taman nasional yang terbentuk dan beroperasi sebanyak 100 Unit	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	3. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas (sesuai The IUCN Red List of Threatened Species) sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	4. Jumlah kawasan ekosistem esensial yang terbentuk dan dioptimalkan pengelolaannya sebanyak 48 unit	13 Unit	26 Unit	39 Unit	43 Unit	48 Unit
	5. Jumlah ketersediaan paket data dan informasi keanekaragaman hayati yang berkualitas di 7 wilayah biogeografi (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	Sasaran Program 2: Peningkatan penerimaan devisa dan PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati					
	1. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Triliun	Rp 5 T	Rp 10 T	Rp 15 T	Rp 20 T	Rp 25 T
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	3. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	4. Jumlah kemitraan pengelolaan kawasan konservasi sebanyak 130 unit (usaha pariwisata alam sebanyak 100 Unit, pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 25 Unit, dan pemanfaatan jasa lingkungan Geothermal sebanyak 5 Unit)	25 Unit	51 Unit	77 Unit	103 Unit	130 Unit
5420	Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam					
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam					
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
5421	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi					
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru					
	1. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	100 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/ IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	3. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	4. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa
	5. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	6. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	7. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
5422	Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik					
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik					
	1. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	2. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies
	3. Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Trilyun	Rp 5 T	Rp 10 T	Rp 15 T	Rp 20 T	Rp 25 T
	5. Besaran PNBK dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	Rp 20 M	Rp 30 M	Rp 40 M	Rp 50 M
	6. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	7. Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	1 PIC	3 PIC	5 PIC	7 PIC	10 PIC
	8. Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4 PRG	8 PRG	12 PRG	16 PRG	20 PRG
	9. Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	10. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
5423	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi					
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi					
	1. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	3. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit
	4. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
	5. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/ IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	6. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit
	7. Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1 Unit	2 Unit
5424	Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial					
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial					
	1. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13 KEE	26 KEE	39 KEE	43 KEE	48 KEE
	2. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3 Paket Data	16 Paket Data	30 Paket Data	44 Paket Data	48 Paket Data
	3. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direvisi sebanyak 48 Dokumen	3 Dokumen	16 Dokumen	30 Dokumen	44 Dokumen	48 Dokumen
	4. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-	2 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan
	5. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	1 Ekoregion	2 Ekoregion	4 Ekoregion	6 Ekoregion
	6. Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies	120 Spesies	180 Spesies	240 Spesies	300 Spesies
5425	Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati					
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan					
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
	6. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	100 Unit	150 Unit	200 Unit	260 Unit
	7. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	60 Dokumen	90 Dokumen	120 Dokumen	150 Dokumen
	8. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	9. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa	77 Desa
	10. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
	11. Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/ IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	12.Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	13.Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	4 Spesies	6 Spesies	8 Spesies	10 Spesies
	14.Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	Rp 20 M	Rp 30 M	Rp 40 M	Rp 50 M
	15.Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	16.Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	17.Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	18.Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	19.Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit
	20.Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
	21.Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit
	22.Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit
	23.Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang
	24.Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin
5426	Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional					
	Sasaran Kegiatan: Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional					
	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	10 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data	50 Paket Data
	4. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
	5. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	6. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10 Dokumen	20 Dokumen	30 Dokumen	40 Dokumen	50 Dokumen
	7. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	8. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa	50 Desa

Kode	Program/Kegiatan/Sasaran/ IKP/ IKK	Target Kinerja (Volume dan Satuan)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	9. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	40.000 Ha	60.000 Ha	80.000 Ha	100.000 Ha
	10.Jumlah pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi di 34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi
	11.Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% dari baseline data tahun 2013	2%	4%	6%	8%	10%
	12.Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data	7 Paket Data
	13.Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	20 Unit	30 Unit	40 Unit	50 Unit
	14.Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	250.000 Orang	500.000 Orang	800.000 Orang	1.250.000 Orang	1.500.000 Orang
	15.Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	3.500.000 Orang	7.500.000 Orang	11.500.000 Orang	15.500.000 Orang	20.000.000 Orang
	16.Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	40 Unit	60 Unit	80 Unit	100 Unit
	17.Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	10 Unit	15 Unit	20 Unit	25 Unit
	18.Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	15 Unit	25 Unit	35 Unit	50 Unit
	19.Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 Unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit
	20.Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	-	1 Unit	2 Unit
	21.Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	2.400 Orang	3.600 Orang	4.800 Orang	6.000 Orang
	22.Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin
5419	Kegiatan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE					
	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE					
	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	77,00 Poin	77,25 Poin	77,50 Poin	77,75 Poin	78,00 Poin

LAMPIRAN 2.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DALAM RENCANA KERJA (RENJA) DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TAHUN 2015

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015	BIAYA (x Rp. 1.000)	UNIT KERJA PELAKSANA
Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	1.070.246	Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	731.200	
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	3.167.060	
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	210.000	
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	-	
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi	1. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	23.712.860	Direktorat Kawasan Konservasi
	2. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	599.200	
	3. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	888.380	
	4. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	1.062.525	
	5. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	364.280	
	6. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi.	34 Provinsi	4.299.566	
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik	1. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	2%	7.427.193	Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati
	2. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	1.013.150	
	3. Jumlah sertifikasi penangkar yang melakukan peredaran satwa liar dan tumbuhan alam ke luar negeri sebanyak 50 Unit	10 Unit	1.551.563	
	4. Nilai ekspor pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam serta bioprospecting sebesar Rp 25 Trilyun	Rp 5 T	3.302.730	
	5. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	599.920	
	6. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	1.803.600	
	7. Jumlah Prior Informed Consent (PIC) pemanfaatan sumberdaya genetik yang diterbitkan sebanyak 10 PIC	1 PIC	1.380.284	
	8. Jumlah hasil assesment Aman Lingkungan terhadap 20 Produk Rekayasa Genetik	4 PRG	2.003.085	
	9. Jumlah sistem basis data balai kliring akses dan pembagian keuntungan pemanfaatan sumberdaya genetik di tingkat nasional yang terbentuk dan beroperasi	1 Unit	257.600	
	10. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	281.200	
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	1. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang	1.412.035	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
	2. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	3.500.000 Orang	1.791.305	

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015	BIAYA (x Rp. 1.000)	UNIT KERJA PELAKSANA
	3. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	1.386.361	
	4. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	879.585	
	5. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	263.849	
	6. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	-	
	7. Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK.	-	-	
Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial	1. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati)	13 KEE	14.438.055	Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
	2. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3 Paket Data	1.576.400	
	3. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen	3 Dokumen	613.700	
	4. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan	-	-	
	5. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion	-	-	
	6. Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies	60 Spesies	1.713.088	
Kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	9.570.190	Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	5.253.627	
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	1.948.674	
	4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	6.420.085	
	5. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	-	
	6. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70 poin pada minimal 260 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	50 Unit	1.144.624	
	7. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Rencana Pengelolaan	30 Dokumen	2.891.834	
	8. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	383.108	
	9. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun	77 Desa	5.243.902	
	10. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang beroperasi sebanyak 100 Unit KPHK	20 Unit	2.388.275	
	11. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi	34 Provinsi	29.876.318	
	12. Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	2%	27.540.340	
	13. Jumlah penambahan jenis satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangkan pada lembaga konservasi sebanyak 10 spesies dari baseline tahun 2013	2 Spesies	741.384	
	14. Besaran PNPB dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam sebesar Rp 50 M	Rp 10 M	3.554.643	

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015	BIAYA (x Rp. 1.000)	UNIT KERJA PELAKSANA
	15. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	381.960	
	16. Jumlah unit pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	-	
	17. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	250.000 Orang	968.584	
	18. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	3.500.000 Orang	12.134.432	
	19. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	1.100.659	
	20. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	51.000	
	21. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	1.746.890	
	22. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	-	
	23. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	6.852.590	
	24. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	70,00 Poin	42.402.461	
	25. Jumlah kelembagaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang difasilitasi pembentukannya	13 KEE	982.693	
	26. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data	3 Paket Data	466.339	
Kegiatan Pengelolaan Taman Nasional	1. Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Zonasi	10 Dokumen	3.710.699	Balai Besar/Balai Taman Nasional
	2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi untuk 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 unit	79.040	
	3. Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	50 Paket Data	1.696.085	
	4. Jumlah kerjasama pembangunan strategis dan kerjasama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	-	
	5. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70% pada 50 unit taman nasional di seluruh Indonesia	10 Unit	796.347	
	6. Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 50 Dokumen Rencana Pengelolaan	10 Dokumen	6.062.004	
	7. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya (termasuk penyelesaian konflik pemanfaatan lahan di dalam kawasan konservasi) seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	10.557.522	
	8. Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 50 Desa selama 5 tahun	50 Desa	17.644.869	
	9. Luas Kawasan Hutan Konservasi pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat seluas 100.000 Ha	10.000 Ha	-	
	10. Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penindakan terhadap gangguan dan ancaman bidang kehutanan di 34 Provinsi	34 Provinsi	50.317.488	
	11. Persentase peningkatan populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species sebesar 10% sesuai baseline data tahun 2013	2%	31.449.097	
	12. Jumlah ketersediaan data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik yang valid dan reliable pada 7 wilayah biogeografi	7 Paket Data	2.882.786	
	13. Jumlah pusat pengembangbiakan dan suaka satwa (sanctuary) spesies terancam punah yang terbangun sebanyak 50 unit.	10 Unit	350.144	
	14. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi	250.000	8.253.202	

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 2015	BIAYA (x Rp. 1.000)	UNIT KERJA PELAKSANA
	minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	Orang		
	15. Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	3.500.000 Orang	31.447.215	
	16. Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	-	
	17. Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	-	
	18. Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 Unit	2.935.256	
	19. Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	-	
	20. Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	-	-	
	21. Jumlah Kader Konservasi (KK), Kelompok Pecinta Alam (KPA), Kelompok Swadaya Masyarakat/ Kelompok Profesi (KSM/KP) yang berstatus aktif sebanyak 6.000 Orang	1.200 Orang	10.351.550	
	22. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00	70,00 Poin	49.927.128	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE	1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 Poin	70,00 Poin	17.757.268	Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE
TOTAL BIAYA KEGIATAN			496.127.826	
LAYANAN PERKANTORAN			1.094.751.600	
TOTAL PAGU TAHUN 2015			1.590.879.426	



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 357/KSDAE-SET/2015

TENTANG

PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM,
KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P. 15/KSDAE-SET/2015, telah ditetapkan Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya Efektivitas Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Penetapan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan pada 130 kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru untuk tahun 2015.
- KEDUA : Nilai Awal Efektivitas Pengelolaan pada 130 Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam Dan Taman Buru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk menindaklanjuti hasil penilaian dengan menyiapkan laporan yang memuat rencana aksi tindak lanjut dengan format sebagaimana lampiran II dan lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, agar melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan.
- KELIMA : Sekretaris dan Direktur lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, agar mengambil upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL,


Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi se-Indonesia;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE se-Indonesia;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Hutan Raya se-Indonesia.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
TANGGAL : 31 Desember 2015
TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA
ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

A. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100243024	TN	Bali Barat	Bali	73	100	82	67	68	67	88
100242012	TN	Ujung Kulon	Banten	77	100	89	78	69	67	89
100242019	TN	Gunung Merapi	Yogyakarta	65	100	72	72	55	33	89
100241007	TN	Berbak	Jambi	60	100	69	67	58	17	56
100241008	TN	Bukit Duabelas	Jambi	65	100	82	67	68	67	88
100241006	TN	Kerinci Seblat	Jambi	62	100	79	67	56	33	50
100242016	TN	Gunung Ciremai	Jawa Barat	65	100	72	61	64	33	75
100242015	TN	Gunung Gede Pangrango	Jawa Barat	80	100	78	72	80	83	100
100242014	TN	Gunung Halimun Salak	Jawa Barat	71	100	78	78	65	33	89
100242017	TN	Gunung Merbabu	Jawa Tengah	54	100	71	61	43	33	57
100242023	TN	Alas Purwo	Jawa Timur	75	100	79	78	73	33	89
100242020	TN	Baluran	Jawa Timur	68	100	72	72	63	67	67
100242021	TN	Bromo Tengger Semeru	Jawa Timur	65	100	71	67	59	67	67
100242022	TN	Meru Betiri	Jawa Timur	68	100	72	78	60	33	89
100244032	TN	Betung Kerihun	Kalimantan Barat	58	100	75	56	55	17	67
100244033	TN	Bukit Baka Bukit Raya	Kalimantan Barat	64	100	78	72	59	33	50
100244030	TN	Danau Sentarum	Kalimantan Barat	70	100	84	72	62	33	89
100244031	TN	Gunung Palung	Kalimantan Barat	67	100	79	61	64	33	78
100244034	TN	Sebangau	Kalimantan Tengah	62	100	77	56	67	67	78
100244035	TN	Tanjung Puting	Kalimantan Tengah	67	100	79	61	63	50	78
100244036	TN	Kayan Mentarang	Kalimantan Timur	62	100	67	50	64	33	75
100244037	TN	Kutai	Kalimantan Timur	64	100	63	72	63	33	63
100241010	TN	Bukit Barisan Selatan	Lampung	68	100	78	67	61	83	67
100241011	TN	Way Kambas	Lampung	65	100	67	67	66	33	67
100246046	TN	Aketajawe Lolobata	Maluku	61	100	70	62	53	44	78
100246047	TN	Manusela	Maluku	68	100	81	67	59	67	71
100243025	TN	Gunung Rinjani	NTB	65	100	71	71	53	50	75
100243028	TN	Kelimutu	NTT	66	100	62	67	62	44	100
100243029	TN	Komodo	NTT	69	100	74	57	68	67	88

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100243027	TN	Laiwangi Wanggameti	NTT	58	100	65	57	57	33	63
100243026	TN	Manupeu Tanah Daru	NTT	61	100	65	67	59	33	57
100247049	TN	Lorentz	Papua	52	100	61	38	53	33	67
100247050	TN	Wasur	Papua	70	100	83	62	72	33	75
100241005	TN	Bukit Tigapuluh	Riau	58	100	83	67	45	33	50
100241004	TN	Tesso Nilo	Riau	53	100	63	56	49	33	50
100245042	TN	Bantimurung - Bulusaraung	Sulawesi Selatan	72	100	78	78	67	33	88.89
100245040	TN	Lore Lindu	Sulawesi Tengah	66	100	62	62	61	44	50
100245044	TN	Rawa Aopa Watumohai	Sulawesi Tenggara	61	100	74	67	57	33	50.00
100241003	TN	Siberut	Sumatera Barat	62	100	84	67	53	33	56
100241009	TN	Sembilang	Sumatera Selatan	62	100	79	67	55	17	67
100241002	TN	Batang Gadis	Sumatera Utara	53	100	50	67	45	50	57
100241001	TN	Gunung Leuser	Sumatera Utara	67	100	74	72	62	33	78

B. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN CAGAR ALAM

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100211001	CA	Pinus Jantho	Aceh	50	100	45	39	42	0	75
100213130	CA	Batukahu I	Bali	52	100	59	50	44	67	75
100211037	CA	Air Seblat Reg.89	Bengkulu	34	100	33	47	29	0	33
100211038	CA	Danau Dusun Besar Reg.61	Bengkulu	47	100	80	56	36	0	33
100211041	CA	Pasar Ngalam Reg.92	Bengkulu	49	100	62	50	42	33	33
100211030	CA	Pagar Gunung III	Bengkulu	28	100	13	39	24	0	33
100212107	CA	Gunung Batu Gamping	DI Yogyakarta	49	100	53	56	41	33	57
100222052	CA	Pulau Bokor	DKI Jakarta	51	100	44	67	44	0	75
100211025	CA	Ht. Bakau Pantai Timur	Jambi	55	100	39	56	52	0	71
100212058	CA	Gunung Burangrang	Jawa Barat	41	100	40	44	38	17	50
100212060	CA	Gunung Papandayan	Jawa Barat	38	100	53	33	36	17	17
100212062	CA	Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	43	100	40	44	43	17	50
100212067	CA	Malabar	Jawa Barat	44	100	44	44	41	0	67
100212069	CA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	54	100	50	50	56	0	71
100212072	CA	Tangkuban Prahau Pelabuhan ratu	Jawa Barat	48	100	27	61	53	0	33
100212075	CA	Telaga Warna	Jawa Barat	46	100	27	50	53	0	33
100212080	CA	Bekutuk	Jawa Tengah	40	100	40	39	39	0	33

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100212085	CA	Gunung Butak	Jawa Tengah	39	100	50	33	35	0	33
100212090	CA	Keling II/III	Jawa Tengah	49	100	67	39	41	33	50
100212092	CA	Moga	Jawa Tengah	47	100	56	39	41	33	75
100212093	CA	Nusakambangan Barat	Jawa Tengah	56	100	61	39	55	33	100
100212104	CA	Telogo Ranjeng	Jawa Tengah	46	100	31	50	47	0	57
100212112	CA	Goa Ngilirip	Jawa Timur	47	100	50	50	39	67	33
100212117	CA	Janggangan Rogojampi II	Jawa Timur	43	100	27	44	52	0	0
100212120	CA	Pancur Ijen I	Jawa Timur	54	100	53	50	52	33	75
100214148	CA	Lo Fat Fun Fie	Kalimantan Barat	50	100	33	50	56	0	67
100214160	CA	Muara Kaman Sedulang	Kalimantan Timur	53	100	44	67	45	17	43
100213135	CA	Pulau Sangiang	NTB	30	100	50	22	21	0	50
100213141	CA	Hutan Bakau Maubesi	NTT	44	100	33	50	40	17	75
100213143	CA	Riung	NTT	35	100	20	39	36	0	33
100213144	CA	Wae Wuul	NTT	47	100	27	56	48	0	75
100217215	CA	Pegunungan Cycloops	Papua	43	100	50	33	40	0	75
100217220	CA	Tanjung Wiay	Papua	28	100	40	17	22	0	50
100211018	CA	Bukit Bungkok	Riau	32	100	38	33	24	0	50
100211019	CA	Pulau Berkeh	Riau	38	100	71	22	24	0	75
100215179	CA	Faruhumpenai	Sulawesi Selatan	55	100	61	50	57	0	50
100215175	CA	Morowali	Sulawesi Tengah	46	100	50	44	41	0	80
100215176	CA	Pamona	Sulawesi Tengah	54	100	71	50	44	0	80
100211013	CA	Batang Pangean II	Sumatera Barat	51	100	44	56	48	0	80
100211015	CA	Lembah Anai	Sumatera Barat	54	100	71	39	53	0	75
100211007	CA	Dolok Sipirok	Sumatera Utara	52	100	56	44	53	0	75
100211005	CA	Dolok Tinggi Raja	Sumatera Utara	47	100	44	44	44	0	71

C. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SUAKA MARGASATWA

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100221001	SM	Rawa Singkil	Aceh	55	100	42	50	50	0	88
100222030	SM	Sermo	DI Yogyakarta	49	100	63	44	46	0	43
100222023	SM	Muara Angke	DKI Jakarta	46	100	44	61	38	33	43

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100224041	SM	Kuala Lupak	Kalimantan Selatan	45	100	53	39	45	33	17
100224040	SM	Pulau Kaget	Kalimantan Selatan	55	100	60	56	50	67	33
100223038	SM	Ale Aisio	NTT	44	100	33	50	42	0	50
100223034	SM	Kateri	NTT	46	100	33	50	48	0	50
100227066	SM	Sidei-Wibain	Papua Barat	13	100	20	11	6	0	0
100221008	SM	Bukit Rimbang-Bukit Baling	Riau	33	100	27	39	27	0	50
100221009	SM	Danau Pulau Besar/Danau Bawah	Riau	36	100	20	39	33	0	67
100221010	SM	Giam Siak Kecil	Riau	42	100	78	28	27	0	50
100225048	SM	Bakiriang	Sulawesi Tengah	51	100	33	56	53	0	67
100225051	SM	Pinjan/Tanjung Matop	Sulawesi Tengah	43	100	40	39	42	0	75
100225052	SM	Pulau Dolangan	Sulawesi Tengah	39	100	27	39	33	33	100
100221002	SM	Barumun	Sumatera Utara	54	100	53	56	48	33	67
100221003	SM	Dolok Surungan	Sumatera Utara	48	100	61	44	42	0	50
100221005	SM	Siranggas	Sumatera Utara	44	100	50	39	44	0	33

D. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100251004	TWA	Kepulauan Banyak	Aceh	47	100	50	39	38	17	57
100253055	TWA	Sangeh	Bali	55	100	53	50	47	67	100
100251021	TWA	Air Rami I/II Reg.87	Bengkulu	46	100	47	61	17	17	33
100252030	TWA	Angke Kapuk	DKI Jakarta	46	100	44	50	41	50	38
100252031	TWA	Cimanggu	Jawa Barat	45	100	33	33	44	50	83
100252037	TWA	Kawah Gunung Tangkuban Perahu	Jawa Barat	51	100	47	44	48	50	83
100252040	TWA	Pananjung Pangandaran	Jawa Barat	55	100	63	61	46	67	33
100252042	TWA	Talaga Bodas	Jawa Barat	39	100	47	39	33	33	33
100252045	TWA	Grojogan Sewu	Jawa Tengah	57	100	72	39	51	50	86
100252052	TWA	Gunung Baung	Jawa Timur	61	100	72	48	60	44	83
100254088	TWA	Dungan	Kalimantan Barat	45	100	33	56	43	17	43
100253064	TWA	Tanjung Tampa	NTB	40	100	59	28	37	17	33
100257123	TWA	Teluk Youtefa	Papua	34	100	56	22	27	17	50
100257118	TWA	Beriat	Papua Barat	33	100	47	39	26	0	33
100257119	TWA	Gunung Meja	Papua Barat	47	100	61	44	38	50	50
100255103	TWA	Danau Mahalona	Sulawesi Selatan	38	100	33	28	44	0	50

100255105	TWA	Danau Towuti	Sulawesi Selatan	49	100	53	44	53	0	50
100255098	TWA	Pulau Pasoso	Sulawesi Tengah	42	100	33	39	39	0	100
100251013	TWA	Rimbo Panti	Sumatera Barat	54	100	50	56	50	33	75
100251005	TWA	Deleng Lancuk	Sumatera Utara	41	100	56	39	31	17	67
100251009	TWA	Sicikeh-cikeh	Sumatera Utara	49	100	63	50	43	17	57

E. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen					
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)	Output (%)	Outcome (%)
100263017	THR	Ngurah Rai	Bali	59	100	64	61	55	50	57
100265026	THR	Murhum/Nipa-Nipa	Sulawesi Tenggara	52	100	44	56	41	33	63
100261003	THR	Dr. Mohammad Hatta	Sumatera Barat	17	100	28	11	10	0	33

F. NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Register	Fungsi	Nama Kawasan	Provinsi	Nilai (%)	Elemen			
					Context (%)	Planning (%)	Input (%)	Process (%)
100242013	TNL	Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	71	86	83	73	58
100242018	TNL	Kepulauan Karimun Jawa	Jawa Tengah	77	100	82	80	63
100247048	TNL	Teluk Cenderawasih	Papua Barat	64	83	82	55	50
100245043	TNL	Taka Bonerate	Sulawesi Selatan	69	83	84	70	54
100245041	TNL	Kepulauan Togean	Sulawesi Tengah	46	55	60	33	42
100245045	TNL	Wakatobi	Sulawesi Tenggara	74	88	82	73	67
100245038	TNL	Bunaken	Sulawesi Utara	66	77	83	67	54
100256115	TWAL	Pulau Pombo	Maluku	52	67	71	33	38
100256116	TWAL	Pulau Marsegu	Maluku	46	62	29	40	38
100256117	TWAL	Pulau Kasa	Maluku	44	62	29	33	40

Nilai Efektivitas merupakan hasil penilaian Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah didampingi oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan diverifikasi oleh Tim Kelompok Kerja Penilaian Efektivitas Pengelolaan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK. 215/KSDAE-KK/2015 tanggal 16 September 2015.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
TANGGAL : 31 Desember 2015
TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA
ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

OUTLINE LAPORAN PENILAIAN EFEKTIVITAS
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

[Nama Kawasan]
[Tanggal dan Tahun Penilaian]

I. Profil Kawasan

- Membuat narasi sesuai dengan alur pertanyaan pada formulir 1.

II. Kondisi Ancaman

- Membuat narasi dari setiap bentuk ancaman yang terjadi di kawasan konservasi sesuai dengan hasil penilaian pada formulir 2.

III. Faktor Dominan dan Kelemahan Pengelolaan

- Menampilkan grafik dan atau tabel sesuai dengan hasil penilaian
- Menjelaskan aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kekuatan (memiliki nilai 3)
- Menjelaskan aspek-aspek pengelolaan yang menjadi kelemahan atau yang perlu ditingkatkan (memiliki nilai 0,1,2)

IV. Isu Prioritas untuk Peningkatan Efektivitas

- Isu prioritas merupakan pilihan dari sekian banyak aspek pengelolaan yang memungkinkan untuk ditingkatkan nilainya sampai dengan tahun 2019.
- Menjelaskan beberapa aspek pengelolaan yang menjadi kelemahan atau yang perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang sampai dengan tahun 2019.

V. Rencana Aksi

- Menjelaskan langkah-langkah teknis yang akan diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampai dengan tahun 2019.
- Rencana aksi memuat informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan, lokasi, jumlah, intensitas, dan target yang ingin dicapai.
- Rencana aksi dapat dibuat dalam bentuk tabel
- Pilihan rencana aksi tindak lanjut dapat mengadopsi seperti dalam lampiran 3s

Laporan ditulis dengan menggunakan font Arial, ukuran font untuk judul 14 sub judul 12 (bold), sementara untuk isi laporan menggunakan ukuran font 12

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015
 TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

PILIHAN RENCANA AKSI PENINGKATAN EFEKTIVITAS
 PENGELOLAAN BAGI PENGELOLA KAWASAN (UPT/UPTD)

No	OPSI TINDAK LANJUT
1	2
A	ELEMEN KONTEKS
1.	Sosialisasi dan distribusi Surat Keputusan Penetapan Kawasan, baik internal maupun ke pemangku kepentingan di sekitar kawasan
B	ELEMEN PERENCANAAN
2.	Menyusun dokumen penataan zonasi/blok sesuai dengan kaidah yang berlaku dan menyampaikan ke Dirjen KSDAE untuk memperoleh pengesahan
3.	Menyusun/merevisi dokumen rencana pengelolaan jangka panjang sesuai amanat PP 28 tahun 2011 dengan tujuan pengelolaan yang lebih jelas dan terukur.
4.	Menjadikan rencana pengelolaan dan tujuan pengelolaan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan (APBN) dan kerjasama dengan mitra-mitra pengelolaan
5.	Mengembangkan kerjasama dengan parapihak pengelola lahan dan sumberdaya di sekitar kawasan (misal IUPHHK, perkebunan, pertambangan, HL, PLTA, PAM dll) agar saling mendukung dalam pengelolaan daerah penyangga
6.	Terlibat aktif dalam proses tata ruang daerah dan memastikan implementasinya tidak mengganggu kelestarian dan pencapaian tujuan pengelolaan kawasan.
7.	Mengusulkan evaluasi kesesuaian fungsi pada kawasan yang telah secara signifikan mengalami perubahan atau hilang nilai penting kawasan sesuai penetapannya
C	ELEMEN INPUT
8.	Meningkatkan jumlah tenaga perlindungan dan pengamanan kawasan yang bekerja pada tingkat resort, misalnya melalui mekanisme Masyarakat Mitra Polhut/PAM swakarsa
9.	Mengalokasikan anggaran kegiatan patrol yang spesifik untuk masing-masing kawasan (BBKSDA/BKSDA)
10.	Menetapkan mekanisme penanganan penegakan hukum di masing-masing UPT
11.	Kepala UPT secara reguler membekali POLHUT dan PPNS dengan peraturan-peraturan yang terbaru
12.	Mendistribusi dan atau penempatan pegawai di masing-masing kawasan atau resort dengan dasar Surat Keputusan Kepala Balai sesuai dengan kompetensi. Dengan demikian pegawai tidak terpusat di kantor balai/bidang/seksi dan menghindari penempatan petugas tidak sesuai fungsinya.
13.	Melakukan inventarisasi dan monitoring nilai penting kawasan/fitur utama, sesuai tujuan pengelolaan, secara intensif dengan metode yang diterima secara ilmiah.
14.	Menjalin kerjasama dengan mitra/lembaga riset/ perguruan/ lembaga lain tinggi guna keperluan inventarisasi potensi kawasan dan monitoring fitur-fitur kawasan
15.	Menjalin kerjasama dengan mitra dan atau pihak lainnya (swasta, donor atau lembaga lain dll) untuk membantu meningkatkan pembiayaan/dukungan operasional pengelolaan di lapangan
16.	Menyusun dokumen anggaran per kawasan/KPHK untuk kepastian anggaran kawasan (bagi BBKSDA/BKSDA)

17.	Mengadakan peralatan pengelolaan yang dibutuhkan yang difokuskan untuk mencapai tujuan pengelolaan
18.	Membuat pedoman penggunaan peralatan pada lingkup masing-masing UPT
D	ELEMEN PROSES
19.	Melakukan perbaikan dan atau rekonstruksi tanda batas atau pal di kawasan dan berkoordinasi dengan BPKH untuk penyelesaian sengketa atau konflik tata batas dengan masyarakat dan atau pihak ketiga
20.	Membangun dan menetapkan system perlindungan dan pengawasan pada masing-masing kawasan (contoh penerapan <i>Resort Based Manajemen</i>)
21.	Menjalin kerjasama sama dengan universitas dan atau lembaga penelitian yang relevan untuk melakukan survey/kajian/penelitian prioritas sesuai dengan kebutuhan tujuan pengelolaan
22.	Menyusun roadmap kebutuhan penelitian dan sosialisasi kepada para pihak yang terkait
23.	Kegiatan pengelolaan yang difokuskan pada pengelolaan secara intensif terhadap tujuan pengelolaan dan kelestarian nilai penting kawasan/fitur kunci
24.	Membangun, mengisi, menganalisis, dan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam keputusan pengelolaan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan (contoh SILOKA, SMART)
25.	Mengagendakan peningkatan kemampuan staf yang mendasar guna pencapaian tujuan pengelolaan, baik secara internal (<i>in-house training</i>) maupun ke eksternal (lembaga pelatihan/pendidikan)
26.	Mengembangkan kerjasama yang erat dengan masyarakat adat/lokal untuk memastikan partisipasi mereka dalam pengelolaan kawasan
27.	Menyusun program peningkatan kepedulian (<i>raising awareness</i>) pengelolaan kawasan/konservasi sumberdaya alam secara komprehensif dan mengimplementasikannya
28.	Mendorong terbentuknya forum diskusi parapihak dan mengagendakan pertemuan secara regular guna meningkatkan koordinasi dan komunikasi parapihak
29.	Bekerjasama dengan operator wisata yang ada dalam memasukkan misi-misi konservasi dalam layanan pengunjung yang disediakan
30.	Khusus pengelolaan TAHURA, agar mengupayakan alokasi dana pengelolaan yang bersumber dari pungutan yang diterima dari kawasan
31.	Melakukan pembinaan terhadap pemegang IPPA untuk meningkatkan kinerja pengelolaan wisata dan mendukung konservasi kawasan melalui program-program yang terencana
E	ELEMEN OUTPUT
32.	Menyusun rencana pengelolaan jangka pendek yang merupakan penjabaran dari RP Jangka Panjang sesuai dengan kebutuhan tujuan pengelolaan dan evaluasi tahunan
33.	Mengembangkan rencana pengelolaan tapak untuk wisata
34.	Melengkapi sarana pengelolaan wisata alam dan sarana penelitian (aksesibilitas, sanitasi, keselamatan, kenyamanan, informasi) sesuai dengan rencana pengelolaan yang ada baik
F	ELEMEN OUTCOME
35.	Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pemanfaatan hasil hutan untuk subsisten, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pengembangan ekonomi kreatif.
36.	Melakukan monitoring terhadap nilai-nilai penting kawasan/fitur pengelolaan secara regular sesuai dengan kebutuhan pencapaian tujuan utama pengelolaan.
37.	Pemulihan kawasan sesuai dengan kebijakan pengelolaan yang berlaku untuk mengembalikan nilai-nilai sumberdaya utama yang mengalami degradasi.
38.	Mengembangkan program-program pelestarian/pemulihan spesies terancam punah/ekosistem secara khusus sesuai tujuan pengelolaan (contoh: Suaka badak, eradikasi spesies invasif, Suaka elang, suaka primata, suaka penyu, termasuk untuk spesies tumbuhan; anggrek, rafflesia sp. dan lain-lain)

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
 NOMOR : 357/KSDAE-SET/2015
 TANGGAL : 31 Desember 2015
 TENTANG : PENETAPAN NILAI AWAL EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM DAN TAMAN BURU.

LANGKAH-LANGKAH UPAYA PENINGKATAN EFEKTIFITAS
 PENGELOLAAN KAWASAN PADA SEKRETARIAT/DIREKTORAT TEKNIS LINGKUP
 DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

NO	OPSI TINDAK LANJUT	PELAKSANA
1	2	3
A	ELEMEN KONTEKS	
1.	Berkoordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan guna mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Kawasan yang telah dikeluarkan namun di IPT belum menerima salinannya	Direktorat PIKA
2.	Berkoordinasi dengan Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan guna perbaikan/revisi SK penunjukkan/penetapan kawasan yang berbeda dengan BATB	Direktorat PIKA
B	ELEMEN PERENCANAAN	
3.	Mengusulkan kepada Inspektorat Jenderal LHK untuk menjadikan implementasi rencana pengelolaan sebagai bahan audit satker KSDAE	Sekretariat
4.	Menjadikan rencana pengelolaan kawasan sebagai pedoman dalam penelaahan usulan kegiatan IPT	Sekretariat dan semua direktorat teknis
5.	Mempercepat proses penilaian dan pengesahan usulan rencana penataan kawasan (blok/zona)	Direktorat PIKA
6.	Mempercepat proses penilaian dan pengesahan usulan rencana pengelolaan kawasan	Direktorat KK
7.	Melakukan kajian terhadap desain kawasan konservasi yang ada, dan mengusulkan perubahan desain kawasan pada beberapa lokasi yang kritis.	Direktorat KK dan Direktorat KKH
8.	Melakukan evaluasi fungsi pada kawasan-kawasan yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya	Direktorat PIKA dan Direktorat KK
9.	Membuat pedoman penyusunan rencana pengelolaan	Direktorat KK
10.	Mendorong penetapan dan pengelolaan daerah-daerah penting di luar kawasan konservasi sebagai pendukung (konektifitas) antar kawasan konservasi dengan mempedomani dokumen Analisis Kesenjangan Keterwakilan Ekologis Kawasan Konservasi Di Indonesia yang disusun pemerintah tahun 2012	Direktorat BPPE
C.	ELEMEN INPUT	
11.	Mengusulkan penambahan pegawai lingkup Ditjen KSDAE secara proporsional untuk masing-masing fungsi (PEH, POLHUT, Administrasi, Non structural) agar komposisi pegawai berimbang	Sekretariat
12.	Berkoordinasi dengan Ditjen GAKKUM mengupayakan penambahan tenaga/peremajaan POLHUT dan PPNS	Sekretariat
13.	Ditjen KSDAE perlu menerbitkan pedoman inventarisasi potensi dan monitoring fitur-fitur utama pengelolaan (keanekaragaman hayati, ekosistem, geomorfologi dll)	Direktorat PIKA, Direktorat KK, Direktorat KKH
14.	Mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk operasional pengelolaan	Sekretariat

15.	Mengatur mekanisme/epedoman alokasi pembiayaan per kawasan/KPHK di dalam dokumen anggaran untuk kepastian pembiayaan pengelolaan pada setiap kawasan/KPHK	Sekretariat
16.	Menyusun pedoman tentang standar peralatan minimal peralatan pengelolaan kawasan konservasi	Direktorat KK
17.	Menyusun pedoman monitoring pelaksanaan rencana pengelolaan dan mengimplementasikannya	Direktorat KK
D.	ELEMEN PROSES	
18.	Mendorong percepatan proses pengukuhan/penataan batas pada kawasan-kawasan yang belum terselesaikan kepada Direktorat Planologi dan Tata Lingkungan	Direktorat PIKA
19.	Mendorong dan memberikan pedoman kepada pengelola kawasan untuk penggunaan system informasi pengelolaan kawasan (contoh SILOKA, SMART)	Direktorat PIKA dan Direktorat KK
20.	Ditjen KSDAE memberikan peluang/ pedoman kepada UPT untuk melakukan outsourcing staf untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar	Sekretariat
21.	Menetapkan pedoman standar kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi	Sekretariat
22.	Mengusulkan kebutuhan-kebutuhan pelatihan lingkup Ditjen KSDAE kepada BP2SDM sesuai standar kompetensi yang disusun	Sekretariat
23.	Memasukkan misi-misi konservasi dan edukasi lingkungan dalam usulan RKPPA yang diajukan oleh pemegang ijin IPPA	Direktorat PJLHK
24.	Mengupayakan pemanfaatan PBNP dari kegiatan lingkup KSDA agar dapat digunakan dalam pengelolaan, melalui persetujuan Menteri Keuangan	Direktorat PJLHK dan Sekretariat
E	ELEMEN OUTPUT	
25.	Meyusun pedoman penyusunan rencana pengelolaan jangka pendek dan memonitor implementasi di setiap UPT	Direktorat KK
F	ELEMEN OUTCOME	
26.	Menetapkan kebijakan dan rencana aksi/pemulihan serta langkah-langkah implementasi terkait penurunan jenis-jenis terancam punah pada skala nasional (contoh badak sumatera, gajah, formasi ekosistem tertentu dll)	Direktorat KKH dan Direktorat KK



DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc
NIP. 19560929 198202 1 001

LAMPIRAN 4.

REKAPITULASI PENINGKATAN POPULASI SATWA TAHUN 2015

No	Satwa	Spesies	UPT	Site Monitoring	Luas (Ha)	Baseline		Populasi Terbaru	Sumber Data	Peningkatan (%)	Rerata Peningkatan/Spesies	Metoda Pengambilan Data
						Sumber Data	Jumlah (Ekor)					
1	Harimau Sumatera	Panthera tigris sumatrae	BTN Bukit Barisan Selatan	Belimbing	45000	PT. Adhiniaga Kreanusa	28	32		14,29	28,57	Camera trap
		Panthera tigris sumatrae	BBKSDA Riau	SM Bukit Rimbang Bukit Baling blok Wilayah Kabupaten Kampar	70000	Monitoring Balai tahun 2014	2	3		50,00		Site occupation/kamera jebak/wawancara
		Panthera tigris sumatrae	BBKSDA Riau	SM Bukit Batu	21500			3	Monitoring 2015			Site occupation/kamera jebak/wawancara
		Panthera tigris sumatrae	BTN Bukit Barisan Selatan	Belimbing	45000	PT. Adhiniaga Kreanusa	28	34	Monitoring 2015	21,43		Camera trap
2	Gajah Sumatera	Elephas maximus sumatrensis	BTN Bukit Barisan Selatan	Way Haru - Way Cangkuk	26000	Survey Balai	21	22		4,76	-25,24	Dung count dan camera trap
		Elephas maximus sumatrensis	BKSDA Aceh	Lanskap Kabupaten Aceh Tengah-Bener Meriah-Bireuen		Monitoring GPS collar tahun 2015 dan pengusuran gajah konflik tahun 2014	41	8	Monitoring bulan Mei 2015	-80,49		Pemasangan GPS Collar dan pengamatan langsung
		Elephas maximus sumatrensis	BBKSDA Riau	SM Balai Raja	18000	Monitoring tahun 2014	22	22		0,00		Tracking/driving count/wawancara
		Elephas maximus sumatrensis	BBKSDA Riau	SM Giam Siak Kecil			*)	38				Tracking/driving count/wawancara
3	Badak	Rhinoceros sondaicus	BTN Ujung Kulon	Semenanjung Ujung Kulon	38000	Laporan monitoring tahun 2013	58	63	Monitoring 2015	8,62	4,31	Video trap dengan metoda album
		Dicerorhinus sumatrensis	BBTN Bukit Barisan Selatan	Tenumbang - Way Krui - Liwa	23000	RPU-YABI (estimasi popupasi 10-13 indiv)	12	12		0,00		Metode tidak langsung (jejak) dan langsung (perjumpaan)
4	Banteng	Bos javanicus	BBKSDA Jawa Timur	Perkebunan Trebasala (Banyuwangi)	3647,11	Inventarisasi BBKSDA Jawa Timur tahun 2014	22	22	Monev 2015	0,00	0,00	

No	Satwa	Spesies	UPT	Site Monitoring	Luas (Ha)	Baseline		Populasi Terbaru	Sumber Data	Peningkatan (%)	Rerata Peningkatan /Spesies	Metoda Pengambilan Data
						Sumber Data	Jumlah (Ekor)					
		Bos javanicus	BBKSDA Jawa Timur	Hutan Lindung Londo lampesan Perum Perhutani BKPH Wuluhan KPH Jember		Inventarisasi BBKSDA Jawa Timur tahun 2014	20	20	Monev 2015	0,00		
		Bos javanicus	BBKSDA Jawa Timur	Hutan Lindung Lebakharjo Perum Perhutani KPH malang BKPH Dampit Blok Kaloloro dan Blok Kaliganteng	35	Invent tahun 2015	5	5	Monev 2015	0,00		
5	Owa	Hylobates agilis albibarbis	BTN Gunung Palung	Stasiun riset cabang panti	2100	Laporan penelitian di stasiun cabang panti tahun 2014	21	25		19,05	19,05	Line transek
6	Orangutan	Pongo pygmaeus	BTN Bukit Baka Bukit Raya	Resort Belaban (SPTN Wilayah I Nanga Pinoh)	9889,47	Invent tahun 2014	25	27	Monitoring Agustus 2015	8,00	-23,39	Sensus sarang dengan metode line transek
		Pongo abelii	BKSDA Aceh	kawasan CA Hutan Pinus Jantho	14027	Invent tahun 2014	55	12	Monitoring hingga Juni 2015	-78,18		Sensus
		Pongo pygmaeus wrumbii	BTN Gunung Palung	Stasiun riset Cabang Panti	2100	Monitoring populasi OU tahun 2014	63	63		0,00		Sampling dengan line transek
7	Bekantan	Nasalis larvatus	BTN Gunung Palung	Sungai Batu Barat-Matan	260	Monitoring tahun 2014	455	458		0,66	0,66	Perjumpaan langsung dengan sensus
8	Komodo	Varanus komodoensis	BBKSDA NTT	Pulau Ontobe TWA 17 Pulau	660	Invent tahun 2014	6	22	Mar-15	266,67	266,67	Konsentrasi dengan camera trap
9	Jalak Bali	Leucopsar rothschildi	BTN Bali Barat	Teluk Brumbun	77,707 - 91,312	Invent Balai tahun 2014	7	8		14,29	14,29	Konsentrasi dan penjelajah
10	Maleo	Macrocephalon maleo	BTN Boganinani Wartabone	Tambun/SPTN Wilayah II Doloduo	5	Invent tahun 2014	168	349		107,74	133,74	Point count dan line transek
			BTN Boganinani Wartabone	Muara Pusian/SPTN Wilayah I Suwawa	4	Invent tahun 2014	156	197		26,28		Point count dan line transek
			BTN Boganinani Wartabone	Hungayono/SPTN Wilayah I Suwawa	7	Invent tahun 2014	122	448		267,21		Point count dan line transek
11	Babi Rusa	Babyrousa babirusa	BTN Boganinani Wartabone	Lereng Poniki/SPTN Wilayah II Doloduo	20	Invent tahun 2014	3	3		0,00	12,82	Strip transek

No	Satwa	Spesies	UPT	Site Monitoring	Luas (Ha)	Baseline		Populasi Terbaru	Sumber Data	Peningkatan (%)	Rerata Peningkatan /Spesies	Metoda Pengambilan Data
						Sumber Data	Jumlah (Ekor)					
		Babyrousa babirussa	BTN Boganinani Wartabone	Lokasi Ongka Desa Iolanan/SPTN Wilayah III Maelang	20	Invent tahun 2014	26	10		-61,54		Strip transek
		Babyrousa babirussa	BTN Boganinani Wartabone	Pinogu/SPTN Wilayah I Suwawa	20	Invent tahun 2014	10	20		100,00		Strip transek
12	Anoa	Bubalus quarlesi	BTN Boganinani Wartabone	Gunung Imandi/SPTN Wilayah III Maelang	20	Invent BTN Tahun 2014	19	17		-10,53	-42,62	Line transek
		Bubalus depressicornis	BTN Boganinani Wartabone	Lereng Poniki/SPTN Wilayah II Doloduo	16	Invent BTN Tahun 2014	25	9		-64,00		Line transek
		Bubalus depressicornis	BTN Boganinani Wartabone	Pinogu/SPTN Wilayah I Suwawa	20	Invent BTN Tahun 2014	15	7		-53,33		Line transek
13	Elang	Nisaetus bartelsi	BBKSDA Jawa Timur	Blok Banyulinu, CA/TWA Kawah Ijen, Banyuwangi		Invent BBKSDA tahun 2014	3	3	Monev tahun 2015	0,00	0,00	
		Nisaetus bartelsi	BBKSDA Jawa Timur	Cagar Alam Gunung Picis, Kabupaten Ponorogo			3	3	Monev tahun 2015	0,00		
		Nisaetus bartelsi	BBKSDA Jawa Timur	Blok Pancur, Perkebunan Kaliasat-Jampit, PTPN XII, Situbondo		Invent BBKSDA tahun 2014	5	5	Monev tahun 2015	0,00		
14	Tarsius	Tarsius fuscus	BTN Bantimurung Bulusaraung	Sungai Pattanuang, luas 86,75 Ha	86,75	Invent tahun 2014	82	86	Monitoring 2015	4,88	4,88	Line transek
15	Monyet Hitam Sulawesi	Macaca nigra	BTN Bantimurung Bulusaraung	Karaenta (kelompok), luas 29,27 Ha	29,27	invent tahun 2014	31	34	Monitoring 2015	9,68	9,68	Concentration count
							Rata-rata Peningkatan Populasi Satwa				26,89	

LAMPIRAN 5

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PER SATKER
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
TAHUN 2015

No	Satker	Pagu Total	Realisasi Total	%
A	Satker Pusat			
1	Setditjen KSDAE	146.411.378.000	107.249.026.592	73,25
2	Direktorat PKH	2.156.510.000	2.066.018.874	95,80
3	Direktorat PPH	2.516.224.000	2.383.943.290	94,74
4	Direktorat KKH	2.644.280.000	2.540.146.219	96,06
5	Direktorat KKBHL	3.145.232.000	3.049.392.553	96,95
6	Direktorat PJLKKHL	2.910.128.000	2.882.975.699	99,07
	Jumlah Satker Pusat	159.783.752.000	120.171.503.227	75,21
B	Balai Besar/Balai KSDA			
7	BBKSDA Jawa Barat	41.346.794.000	39.673.300.035	95,95
8	BBKSDA Jawa Timur	30.742.266.000	28.927.061.565	94,10
9	BBKSDA Sumatera Utara	36.451.490.000	33.942.640.154	93,12
10	BBKSDA Riau	29.328.205.000	25.958.539.313	88,51
11	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	26.080.462.000	24.384.307.847	93,50
12	BBKSDA Sulawesi Selatan	33.995.684.000	32.179.660.561	94,66
13	BBKSDA Papua	30.545.510.000	27.135.776.677	88,84
14	BBKSDA Papua Barat	22.754.217.000	21.056.999.245	92,54
15	BKSDA DKI Jakarta	24.509.557.000	22.396.440.794	91,38
16	BKSDA Jawa Tengah	19.823.342.000	18.012.939.392	90,87
17	BKSDA DI Yogyakarta	17.089.070.000	15.989.257.941	93,56
18	BKSDA Nangroe Aceh Darussalam	18.154.710.000	16.842.272.630	92,77
19	BKSDA Sumatera Barat	15.733.436.000	13.945.068.895	88,63
20	BKSDA Jambi	18.622.185.000	14.160.869.566	76,04
21	BKSDA Sumatera Selatan	33.965.199.000	30.085.866.884	88,58
22	BKSDA Lampung	17.633.187.000	16.404.171.090	93,03
23	BKSDA Kalimantan Barat	29.937.830.000	27.514.739.995	91,91
24	BKSDA Kalimantan Tengah	29.648.628.000	25.086.146.784	84,61
25	BKSDA Kalimantan Selatan	17.997.140.000	16.462.934.733	91,48
26	BKSDA Kalimantan Timur	22.132.246.000	19.814.969.583	89,53
27	BKSDA Sulawesi Utara	14.906.572.000	13.303.626.251	89,25
28	BKSDA Sulawesi Tengah	17.780.177.000	15.476.784.640	87,05
29	BKSDA Sulawesi Tenggara	22.242.677.000	19.503.123.364	87,68
30	BKSDA Maluku	17.307.545.000	15.819.973.867	91,41
31	BKSDA Bali	17.260.719.000	15.644.096.270	90,63
32	BKSDA Nusa Tenggara Barat	22.350.404.000	20.948.227.098	93,73
33	BKSDA Bengkulu	19.480.475.000	18.760.100.362	96,30
	Jumlah Balai Besar/Balai KSDA	647.819.727.000	589.429.895.536	90,99
C	Balai Besar/Balai Taman Nasional			
34	BBTN Gunung Gede Pangrango	27.163.856.000	26.149.378.536	96,27
35	BBTN Bromo Tengger Semeru	25.383.092.000	24.192.053.683	95,31
36	BBTN Gunung Leuser	32.366.034.000	31.097.270.967	96,08
37	BBTN Kerinci Seblat	27.242.532.000	26.578.769.446	97,56
38	BBTN Bukit Barisan Selatan	21.194.780.000	20.242.783.885	95,51
39	BBTN Betung Kerihun	17.514.873.000	16.491.566.076	94,16
40	BBTN Lore Lindu	20.419.727.000	19.080.652.397	93,44
41	BBTN Teluk Cenderawasih	21.807.887.000	20.183.633.350	92,55

No	Satker	Pagu Total	Realisasi Total	%
42	BTN Kepulauan Seribu	15.442.577.000	13.831.864.948	89,57
43	BTN Gunung Ciremai	11.695.306.000	11.170.100.889	95,51
44	BTN Gunung Halimun Salak	19.660.814.000	18.915.198.674	96,21
45	BTN Gunung Merbabu	10.839.401.000	10.309.639.373	95,11
46	BTN Karimun Jawa	12.819.647.000	12.203.493.052	95,19
47	BTN Gunung Merapi	12.349.157.000	11.494.158.989	93,08
48	BTN Baluran	13.983.090.000	13.374.805.040	95,65
49	BTN Meru Betiri	13.679.895.000	12.977.455.867	94,87
50	BTN Alas Purwo	17.760.051.000	16.253.425.004	91,52
51	BTN Batang Gadis	10.274.227.000	9.180.645.572	89,36
52	BTN Siberut	12.846.103.000	11.381.071.863	88,60
53	BTN Tesso Nilo	9.993.987.000	8.476.995.160	84,82
54	BTN Bukit Tigapuluh	13.520.136.000	11.158.758.487	82,53
55	BTN Bukit Duabelas	9.154.485.000	8.735.759.784	95,43
56	BTN Berbak	15.648.709.000	14.649.085.009	93,61
57	BTN Sembilang	10.184.820.000	9.464.297.153	92,93
58	BTN Way Kambas	29.602.622.000	28.115.133.035	94,98
59	BTN Danau Sentarum	12.359.130.000	10.701.443.119	86,59
60	BTN Gunung Palung	12.340.944.000	11.294.153.481	91,52
61	BTN Bukit Baka Bukit Raya	11.641.796.000	10.835.488.752	93,07
62	BTN Tanjung Puting	15.703.610.000	14.425.849.187	91,86
63	BTN Sebangau	11.103.936.000	10.486.853.280	94,44
64	BTN Kutai	18.116.847.000	16.539.703.646	91,29
65	BTN Bogani Nani Wartabone	19.590.658.000	19.043.255.587	97,21
66	BTN Bunaken	10.835.358.000	10.064.801.564	92,89
67	BTN Kepulauan Togean	8.499.742.000	7.753.736.989	91,22
68	BTN Bantimurung Bulusaraung	16.117.499.000	14.768.475.082	91,63
69	BTN Taka Bonerate	12.701.474.000	11.609.390.615	91,40
70	BTN Rawa Aopa Watumohai	17.151.999.000	16.549.121.403	96,49
71	BTN Wakatobi	13.027.220.000	11.744.221.012	90,15
72	BTN Manusela	11.487.286.000	10.602.113.466	92,29
73	BTN Bali Barat	20.015.201.000	19.044.969.592	95,15
74	BTN Gunung Rinjani	16.541.257.000	15.141.803.328	91,54
75	BTN Komodo	14.767.420.000	13.283.515.211	89,95
76	BTN Laiwangi Wanggameti	10.921.800.000	9.936.028.434	90,97
77	BTN Manupeu Tanadaru	10.423.604.000	10.130.275.841	97,19
78	BTN Kelimutu	11.027.965.000	10.007.884.373	90,75
79	BTN Lorentz	19.354.037.000	17.750.534.972	91,71
80	BTN Wasur	15.378.546.000	12.576.286.249	81,78
81	BTN Aketajawe Lolobata	11.046.933.000	10.435.751.567	94,47
82	BTN Ujung Kulon	19.185.554.000	18.818.505.906	98,09
83	BTN Kayan Mentarang	11.388.323.000	10.079.696.435	88,51
	Jumlah Balai Besar/Balai Taman Nasional	783.275.947.000	729.331.855.330	93,11
	Total Ditjen KSDAE	1.590.879.426.000	1.438.933.254.093	90,45